



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010-2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, menengah, dan pendek ;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010–2015;

- Mengingat
- : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
33. Peraturan Presiden Nomor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

dan

**BUPATI SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 – 2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Semarang;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2014;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2015;
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah;
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
17. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan;

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

#### **Pasal 3**

Sistematika RPJMD Tahun 2010-2015 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

#### **Pasal 4**

**Penjabaran** RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

#### **Pasal 6**

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2010-2015.

#### **Pasal 7**

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

### **Pasal 8**

SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Semarang dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.

## **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

RPJMD dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2015-2020 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 13 - 05 - 2011

**BUPATI SEMARANG,**

CAP TTD

**MUNDJIRIN**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 13 - 05 - 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah

CAP TTD

**ANWAR HUDAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 7.

Diperbanyak sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

**JATI TRIMULYANTO**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR .. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010-2015 .....</b>	<b>i -viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I- 1</b>
A. Latar Belakang .....	I- 1
B. Landasan Hukum .....	I- 2
C. Maksud dan Tujuan .....	I- 4
D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I- 5
E. Sistematika .....	I- 11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II- 1</b>
A. Kondisi Geografis .....	II- 1
B. Kondisi Demografis .....	II- 3
C. Kondisi Ekonomi Daerah .....	II- 7
D. Kondisi Pembangunan Kewilayahan .....	II- 16
E. Kondisi Kemiskinan .....	II- 21
F. Kondisi Urusan Pemerintahan Daerah .....	II- 23
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>III - 1</b>
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III- 2
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III- 12
C. Kerangka Pendanaan .....	III- 17
<b>BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>IV - 1</b>
A. Permasalahan Pembangunan .....	IV- 1
B. Identifikasi Faktor Lingkungan .....	IV- 2
C. Isu Strategis .....	IV - 5

<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ....</b>	V - 1
A. Visi .....	V-1
B. Misi .....	V-1
C. Tujuan .....	V - 3
D. Sasaran .....	V - 3
<b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	VI - 1
A. Strategi Pembangunan Daerah .....	VI-1
B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	VI-1
C. Agenda Pembangunan Tahunan .....	VI - 4
<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	VII - 1
A. Kebijakan Umum Pembangunan .....	VII-1
B. Program Pembangunan Urusan Kewenangan .....	VII-14
<b>BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN .....</b>	VIII - 1
<b>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....</b>	IX-1
<b>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAI DAH PELAKSANAAN .....</b>	X-1
A. Pedoman Transisi .....	X-1
B. Kaidah Pelaksanaan .....	X-2



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Semarang
	Menurut Kecamatan..... II - 1
Tabel 2.2	Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 ..... II - 4
Tabel 2.3	Sebaran Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan Tahun 2005-2010 ..... II - 4
Tabel 2.4	Persentase Struktur Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Kelompok Umur Tahun 2005-2010 ..... II - 5
Tabel 2.5	Persentase Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2005-2010 ..... I - 5
Tabel 2.6	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 ..... II - 6
Tabel 2.7	Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 ..... II - 6
Tabel 2.8	Distribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 ..... II - 7
Tabel 2.9	Distribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 ..... II - 8
Tabel 2.10	Perkembangan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 ..... II - 9
Tabel 2.11	Sentra Pertanian dan Perkebunan Di Kabupaten Semarang .... II - 10
Tabel 2.12	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Kurun Waktu 2005-2010 ..... II - 11
Tabel 2.13	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2010 ..... II - 12
Tabel 2.14	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Semarang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2010 ..... II - 12
Tabel 2.15	Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 ..... II - 13
Tabel 2.16	Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Kabupaten Semarang Dalam Kurun Waktu 2005-2010 ..... II - 14

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan.....	II - 1
Tabel 2.2	Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 4
Tabel 2.3	Sebaran Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan Tahun 2005-2010 .....	II - 4
Tabel 2.4	Persentase Struktur Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Kelompok Umur Tahun 2005-2010 .....	II - 5
Tabel 2.5	Persentase Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2005-2010 .....	I - 5
Tabel 2.6	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 6
Tabel 2.7	Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 6
Tabel 2.8	Distribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 7
Tabel 2.9	Distribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 8
Tabel 2.10	Perkembangan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 9
Tabel 2.11	Sentra Pertanian dan Perkebunan Di Kabupaten Semarang ....	II - 10
Tabel 2.12	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Kurun Waktu 2005-2010 .....	II - 11
Tabel 2.13	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2010 .....	II - 12
Tabel 2.14	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Semarang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2010 .....	II - 12
Tabel 2.15	Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 13
Tabel 2.16	Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Kabupaten Semarang Dalam Kurun Waktu 2005-2010 .....	II - 14
Tabel 2.17	Pendapatan Per Kapita dan Pertumbuhannya Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 14

Tabel 2.37	Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Ungaran Tahun 2005-2010 .....	II - 41
Tabel 2.38	Indikator Pelayanan RSUD Ambarawa Tahun 2005-2010 .....	II - 43
Tabel 2.39	Jumlah/Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 44
Tabel 2.40	Jumlah/Panjang Jembatan Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 45
Tabel 2.41	Kondisi Saluran dan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 46
Tabel 2.42	Kondisi Bangunan Bendung Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 47
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Perumahan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 47
Tabel 2.44	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2009 .....	II - 48
Tabel 2.45	Status Rencana Tata Ruang Hingga Tahun 2010 .....	II - 49
Tabel 2.46	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah .....	II - 50
Tabel 2.47	Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah .....	II - 50
Tabel 2.48	Realisasi Perencanaan Bidang Ekonomi .....	II - 51
Tabel 2.49	Realisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya .....	II - 51
Tabel 2.50	Jumlah Potensi Titik Parkir Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 52
Tabel 2.51	Jumlah Terminal, Sub Terminal dan Emplasemen Angkutan Umum Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 53
Tabel 2.52	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 54
Tabel 2.53	Jumlah Jalur Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 54
Tabel 2.54	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenisnya Yang Diuji Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 55
Tabel 2.55	Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 55

Tabel 2.56	Capaian Kinerja Pelestarian dan Pengendalian LH .....	II - 56
Tabel 2.57	Realisasi Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan .....	II - 58
Tabel 2.58	Realisasi Pendapatan Lelang Bengkulu Tahun 2005-2010 .....	II - 59
Tabel 2.59	Rakor Penyelesaian Masalah Tanah Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 59
Tabel 2.60	Realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan .....	II - 60
Tabel 2.61	Indikator Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil .....	II - 61
Tabel 2.62	Database Kependudukan Kabupaten Semarang .....	II - 62
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2010 .....	II - 63
Tabel 2.64	Capaian Peserta KB Aktif (Akseptor) .....	II - 64
Tabel 2.65	Capaian Peserta KB Baru (PB) .....	II - 64
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Kunci Keluarga Sejahtera .....	II - 65
Tabel 2.67	Jumlah Panti Sosial Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010 .....	II - 65
Tabel 2.68	Perkembangan KUBE PMKS Kab. Semarang Tahun 2006-2010 .....	II - 66
Tabel 2.69	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 67
Tabel 2.70	Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal .....	II - 69
Tabel 2.71	Capaian Terciptanya Pelayanan Tenaga Kerja yang Optimal Untuk Mendukung Penempatan Tenaga Kerja .....	II - 69
Tabel 2.72	Realisasi Terwujudnya Informasi Pasar Kerja .....	II - 70
Tabel 2.73	Kondisi Pemutusan Hubungan Kerja .....	II - 70
Tabel 2.74	Kondisi Mogok/Unjuk Rasa .....	II - 71
Tabel 2.75	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010.....	II - 71
Tabel 2.76	Jumlah Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 72
Tabel 2.77	Daftar Binaan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2010 .....	II - 72
Tabel 2.78	Perkembangan Prakoperasi Tahun 2005-2010 .....	II - 73
Tabel 2.79	Volume Usaha Koperasi Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 73

Tabel 2.80	Penilaian Kesehatan KSP/USP .....	II - 73
Tabel 2.81	Capaian Data Investasi Kabupaten Semarang .....	II - 74
Tabel 2.82	Jumlah Data Perijinan Yang Diterbitkan Sampai Dengan Tahun 2010 .....	II - 75
Tabel 2.83	Data Upacara Adat Masyarakat Kab. Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 77
Tabel 2.84	Benda Cagar Budaya dan Situs Bersejarah Kabupaten Semarang .....	II - 78
Tabel 2.85	Kegiatan PPTT Bidang Kebudayaan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 81
Tabel 2.86	Data Seniman dan Seniwati Kabupaten Semarang .....	II - 81
Tabel 2.87	Data Group Kesenian Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 82
Tabel 2.88	Training Camp Olah Raga di Kabupaten Semarang Tahun 2009-2010 .....	II - 83
Tabel 2.89	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2005-April 2010 .....	II - 84
Tabel 2.90	Tingkatan Prestasi Olahraga (Pelajar) Tahun 2009-2010 .....	II - 85
Tabel 2.91	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010 .....	II - 86
Tabel 2.92	Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) DI Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 87
Tabel 2.93	Kegiatan Trantibum Tahun 2005-2010 .....	II - 87
Tabel 2.94	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Semarang Berdasarkan Partai Politik .....	II - 90
Tabel 2.95	Capaian Produk Hukum Daerah .....	II - 91
Tabel 2.96	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan .....	II - 91
Tabel 2.97	Temuan Administratif Tahun 2005-2010 .....	II - 92
Tabel 2.98	Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah .....	II - 92
Tabel 2.99	Capaian Kinerja Kepegawaian .....	II - 93

Tabel 2.100	Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah Tahun 2005-2010 .....	II - 94
Tabel 2.101	Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun 2010 .....	II - 95
Tabel 2.102	Partisipasi/Keterlibatan Masyarakat dalam Tahapan Kegiatan PPK/PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2005-2010 .....	II - 96
Tabel 2.103	Pelaksanaan Kegiatan PPK/PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2005-2010 .....	II - 97
Tabel 2.104	Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (sebelumnya P2KP) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 97
Tabel 2.105	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya .....	II - 98
Tabel 2.106	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2005-2010 .....	II - 100
Tabel 2.107	Jumlah Koleksi Buku Tahun 2005-2010 .....	II - 103
Tabel 2.108	Jumlah Perpustakaan Tahun 2005-2010 .....	II - 104
Tabel 2.109	Data Pengguna Perpustakaan .....	II - 104
Tabel 2.110	Data Peminjam Buku .....	II - 104
Tabel 2.111	Data Buku Yang Dipinjam .....	II - 105
Tabel 2.112	Luas, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 106
Tabel 2.113	Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias Tahun 2005-2010 .....	II - 107
Tabel 2.114	Luas, Produksi dan Produktivitas Sayur-sayuran Utama Tahun 2005-2010 .....	II - 108
Tabel 2.115	Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Biofarmaka Tahun 2005-2010 .....	II - 109
Tabel 2.116	Potensi Pengembangan Usaha Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 110
Tabel 2.117	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2005-2010 .....	II - 111
Tabel 2.118	Produksi Ternak Tahun 2005-2010 .....	II - 111
Tabel 2.119	Konsumsi Protein Hewani Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 112

Tabel 2.120	Jumlah Kelompok Tani Ternak Tahun 2005-2010 .....	II - 112
Tabel 2.121	Data Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan Tahun 2005-2010 .....	II - 112
Tabel 2.122	Jumlah Potensi Hutan Tahun 2005-2010 .....	II - 113
Tabel 2.123	Potensi Eksploitasi Pertambangan Batuan .....	II - 114
Tabel 2.124	Realisasi Jumlah Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan ABT/APT .....	II - 114
Tabel 2.125	Realisasi Jumlah Pemanfaatan ABT/APT .....	II - 115
Tabel 2.126	Jumlah LPJU dan Perluasan Listrik Masuk Desa .....	II - 115
Tabel 2.127	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 116
Tabel 2.128	Akomodasi Wilayah Kopeng .....	II - 117
Tabel 2.129	Akomodasi Wilayah Bandungan, Ambarawa, Bergas, Ungaran .....	II - 117
Tabel 2.130	Perkembangan Skala Usaha Perikanan Tahun 2005-2010 .....	II - 118
Tabel 2.131	Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2005-2010 .....	II - 118
Tabel 2.132	Konsumsi Protein Hewani Asal Ikan .....	II - 119
Tabel 2.133	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan .....	II - 119
Tabel 2.134	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perikanan .....	II - 119
Tabel 2.135	Data Penerbitan SIUP .....	II - 120
Tabel 2.136	Data Penerbitan TDP .....	II - 120
Tabel 2.137	Jumlah Sarana Perdagangan Per Kecamatan .....	II - 121
Tabel 2.138	Perkembangan Jenis Pasar Per Kecamatan Tahun 2005 Dibanding Tahun 2010 .....	II - 121
Tabel 2.139	Realisasi Perkembangan Industri Di Kabupaten Semarang .....	II - 123
Tabel 2.140	Jumlah Pendaftar Calon Transmigran Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 124
Tabel 2.141	Jumlah dan Tujuan Pemberangkatan Transmigrasi Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 .....	II - 125
Tabel 3.1	Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010 .....	III - 3

Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 Kabupaten Semarang .....	III - 5
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2006-2010 .....	III - 6
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006- 2010 .....	III - 7
Tabel 3.5	Neraca Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010 .....	III - 9
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Semarang .....	III - 12
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010 .....	III - 13
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Semarang .....	III - 14
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010 .....	III - 15
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010 .....	III - 15
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010 .....	III - 16
Tabel 3.12	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Semarang .....	III - 17
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah .....	III - 19
Tabel 3.14	Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama .....	III - 20
Tabel 3.15	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang .....	III - 21
Tabel 3.16	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang .....	III - 22
Tabel 7.1	Proporsi Kebutuhan Pendanaan Pada Setiap Urusan Pemerintahan Terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015 .....	VII - 31
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan .....	VIII - 2



<b>Tabel 9.1</b>	<b>Kondisi Ekonomi Makro Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 .....</b>	<b>IX - 1</b>
<b>Tabel 9.2</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2009-2015 .....</b>	<b>IX - 2</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Distribusi PDRB Tiap Kecamatan Tahun 2009 Berdasarkan Harga Konstan .....	<b>II - 17</b>
<b>Gambar 2.2</b> PDRB Perkapita Tiap Kecamatan Tahun 2009 Berdasarkan Harga Berlaku .....	<b>II - 18</b>
<b>Gambar 2.3</b> Persentase Keluarga Pra KS Per Kecamatan Tahun 2010.....	<b>II - 19</b>
<b>Gambar 2.4</b> Indikator Dasar Kondisi Kesehatan Tiap Kecamatan Tahun 2010 .....	<b>II - 20</b>
<b>Gambar 3.1</b> Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD Dengan RKPD dan Visi Misi, Strategi RPJMD .....	<b>III - 1</b>
<b>Gambar 3.2</b> Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD .....	<b>III - 2</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Disamping itu pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (RENJA) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (3) disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih periode 2010–2015 dan untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Kabupaten Semarang menyusun RPJMD Tahun 2010–2015 yang merupakan jbaran Visi - Misi Kepala Daerah terpilih setelah disesuaikan dengan RPJPD, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu RPJMD juga digunakan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010–2015.

## **B. Landasan Hukum**

**Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005–2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, prioritas program dan proyeksi indikatif pendanaan. Dokumen ini menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD, penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Maksud disusunnya RPJMD adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sejalan dengan tujuan nasional dan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Sedangkan tujuan disusunnya RPJMD adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan dapat berjalan secara terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak, sehingga penggunaan sumberdaya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

### **D. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJMD merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2010–2015 disusun mengacu pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010–2014, RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008-2013, RTRW Kabupaten Semarang, MDG's dan mempertimbangkan Dokumen Perencanaan Daerah tetangga.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015 merupakan tahapan ke-2 pada upaya pencapaian Visi Daerah 2025 yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Semarang 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, yaitu **"KABUPATEN SEMARANG YANG ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA"**, yang dimaknakan sebagai berikut :

**Adil** : seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan dan mengemukakan pendapat, melaksanakan politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

**Mandiri** : mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Sejahtera** : kondisi masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Sejahtera secara lahiriah dapat diartikan dengan semakin meningkatnya kemakmuran masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan adalah terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat, meningkatnya daya beli, serta tersedianya pelayanan publik yang dibutuhkan, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi maupun komunikasi. Sementara sejahtera secara batiniah adalah terciptanya ketentraman ketertiban, keamanan serta kerukunan hidup bermasyarakat dan terjaminnya kesempatan aktualisasi diri.



Sebagai pelaksanaan tahapan ke-2 dari RPJPD tahun 2005-2025 sasaran pokok kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2010-2015 menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian daerah, serta upaya perbaikan kondisi aman dan damai yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, oleh karena itu RPJMD harus memperhatikan prioritas pembangunan nasional 2010-2014 sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014 yaitu :

**a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik

**b. Program Aksi Bidang Pendidikan**

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara

ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan : 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

**c. Rencana Aksi Bidang Kesehatan**

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

**d. Penanggulangan Kemiskinan**

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

**e. Program Aksi Bidang Pangan**

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

**f. Program Aksi Bidang Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**g. Iklim Investasi dan Iklim Usaha**

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

**h. Program Aksi Bidang Energi**

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

**i. Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim

**j. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik**

Pengutamakan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik

### **k. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi**

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat yaitu :

#### **a. Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup:**

- pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme;
- pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme;
- peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia;
- peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
- penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor;
- pengembalian aset (asset recovery);
- peningkatan kepastian hukum;
- penguatan perlindungan HAM; dan
- pemberdayaan industri strategis pertahanan.

b. Di bidang perekonomian mencakup:

- pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional;
- peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama proses persiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta
- peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri.

c. Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup :

- pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010;
- peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun;
- promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif;
- perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
- peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia;

- perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya;
  - pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012;
  - peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta
  - revitalisasi gerakan pramuka.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013.

Dalam rangka mendukung pembangunan regional Jawa Tengah, RPJMD juga memperhatikan prioritas tujuan pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Jawa Tengah di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berdaya kemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.
- c. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi,

untuk pengurangan resiko bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

- d. Mengembangkan kawasan agropolitan dan klaster-klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan daya tarik investasi.
  - e. Menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha Milik Petani, dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh swasta.
  - f. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat.
  - g. Meningkatkan demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  - h. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melalui *electronic government* di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Semarang 2010–2015 agar sesuai dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, maka dalam menyusun RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2010-2030 memuat :

- a. Rencana Struktur Ruang Wilayah, merupakan penetapan perumusan sistem pusat pelayanan sesuai hirarki perwilayahannya, yang didukung dengan sistem jaringan prasarana wilayah berupa sistem jaringan jalan dan prasarana transportasi lainnya, prasarana energi, sumberdaya air prasarana pengelolaan lingkungan. Rencana struktur ruang wilayah difokuskan pada :
  - 1) Pengembangan pusat pelayanan pada wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan yang dipusatkan pada kawasan perkotaan Tenganan dan Suruh.
  - 2) Pemerataan pembangunan prasarana wilayah terutama pada wilayah perbatasan.
- b. Rencana Pola Ruang Wilayah, merupakan penetapan perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang difokuskan pada :
  - 1) Pemantapan kawasan fungsi lindung.
  - 2) Pengembangan kawasan budidaya produktif terutama dalam mendukung sektor Intanpari.
- c. Rencana Kawasan Strategis meliputi Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan, Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi dan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

## 5. Pembangunan Milenium

Selain berpedoman pada dokumen-dokumen tersebut diatas, penyusunan RPJMD juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti Millenium Development



Goals (MDGs) yang meliputi :

- a. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
  - b. Mewujudkan pendidikan dasar
  - c. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  - d. Mengurangi angka kematian bayi
  - e. Meningkatkan kesehatan Ibu
  - f. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
  - g. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
  - h. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan
6. Pembangunan Regional Kedungsapur

Kabupaten Semarang merupakan bagian dari daerah eks karesidenan Semarang yang terdiri dari : Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga dan Purwodadi (KEDUNGSAPUR) dan berbatasan dengan daerah Boyolali, Magelang, Temanggung sehingga Kabupaten Semarang dalam menyusun RPJMD perlu memperhatikan rencana pembangunan daerah sekitar agar :

- a. Tercapai keselarasan pembangunan antar wilayah dalam mendukung tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mengembangkan potensi Kabupaten Semarang di wilayah perbatasan
- c. Memperluas peluang kerjasama antar daerah

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing- masing urusan/sektor, RPJMD Tahun 2010–2015 digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang lain seperti Renstra dan Renja SKPD maupun lintas sektoral seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

## E. Sistematika

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan
- BAB II** : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III** : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV** : Analisis Isu-isu Strategis
- BAB V** : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI** : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII** : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII** : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.
- BAB IX** : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X** : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **A. Kondisi Geografis**

##### **1. Batas Administrasi**

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada  $110^{\circ}14'54,75''$  sampai dengan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}3'57''$  sampai dengan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang dibatasi oleh 6 Kabupaten pada sisi-sisinya. Di sisi barat, Wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sementara di sisi timur wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak dan sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang. Selain itu ditengah-tengah Kabupaten Semarang juga terdapat Wilayah Administrasi yaitu Kota Salatiga.

##### **2. Luas Wilayah**

Luas Kabupaten Semarang secara keseluruhan sebesar 950,2067 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Kabupaten Semarang diuntungkan secara geografis mengingat posisinya yang strategis terletak diantara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar). Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan**

NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)	%
1	Getasan	6.579,55	6,92
2	Tengaran	4.729,55	4,98
3	Susukan	4.866,60	5,14
4	Kaliwungu	2.995,00	3,15
5	Suruh	6.401,52	6,74
6	Pabelan	4.797,60	5,05
7	Tuntang	5.624,20	5,92
8	Banyubiru	5.441,45	5,73
9	Jambu	5.163,00	5,43
10	Sumowono	5.563,20	5,85
11	Ambarawa	2.822,10	2,97
12	Bandungan	4.823,30	5,08
13	Bawen	4.657,00	4,90
14	Biringin	6.189,10	6,51
15	Bancak	4.384,55	4,61
16	Pringapus	7.834,70	8,25
17	Bergas	4.733,10	4,98
18	Ungaran Barat	3.596,05	3,78
19	Ungaran Timur	3.799,10	4,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.020,67</b>	<b>100</b>

### 3. Topografis

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318 - 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat dan tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467 Hektar.

### 4. Daerah Rawan Bencana Alam

Di Kabupaten Semarang terdapat daerah rawan bencana yaitu daerah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Daerah rawan bencana alam berupa kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan longsor dan kawasan rawan banjir.

**a. Rawan Letusan Gunung Api**

Daerah rawan bencana gunung berapi merupakan daerah yang diperkirakan akan dilalui luncuran awan panas dan lahar maupun jatuhnya material. Berdasarkan peta bencana gunung api yang dibuat oleh Direktorat Vulkanologi Bandung, meskipun Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran sudah lama tidak aktif namun bahaya gunung api masih berpotensi terjadi pada wilayah ini sehingga daerah yang berada di sekitar puncak Gunung Ungaran sampai ke Sumowono, Bandungan, Munding dan Gunung Tungku (sebelah atas Nyatnyono) merupakan daerah yang diperkirakan luncuran awan panas dan lahar dan jatuhnya material. Sedang untuk Gunung Merbabu adalah mulai puncaknya gunung sampai Desa Batur.

**b. Rawan Tanah Longsor**

Daerah rawan bencana gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor/bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Kabupaten Semarang penyebaran kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Bringin, Suruh dan Susukan.

**c. Rawan Banjir**

Daerah rawan bencana banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam berupa banjir atau

tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan tergenang lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan normal. Pada wilayah Kabupaten Semarang kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada dataran sekitar Rawa Pening dan dataran bagian timur wilayah kabupaten, tepatnya sekitar Desa Boto Kecamatan Bancak pada daerah aliran Sungai Tuntang. Disamping itu di beberapa wilayah kota juga berpotensi rawan banjir sebagai akibat dari berkembangnya permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan.

## **5. Penggunaan Lahan dan Iklim**

Dari luas wilayah Kabupaten Semarang sebesar 95.020,67 Ha yang digunakan sebagai areal persawahan hanya sebesar 25,69% atau 24.411,46 Ha dan sisanya 74,3% atau 70.609,21 Ha merupakan areal bukan persawahan. Luas lahan sawah tersebut terbagi menjadi sawah irigasi teknis seluas 5.475,91 Ha, sawah irigasi setengah teknis 4.027,45 Ha, sawah irigasi sederhana 7.717,24 Ha, sawah irigasi desa 526,54 Ha dan sawah tadah hujan 6.664,33 Ha. Sementara lahan areal bukan sawah meliputi pekarangan dan bangunan 19.851,32 Ha, tegalan dan kebun 25.442,59 Ha, tambak/kolam 40,00 Ha, rawa 2.623,00 Ha, perkebunan 5.068,13 Ha, hutan negara dan hutan rakyat 14.640,37 Ha serta lain-lain lahan kering 2.943,81 Ha.

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.383 mm/tahun, suhu udara berkisar antara 18-32 derajat C, kecepatan angin 0,37-0,71 knot, dan kelembaban udara 38,5-98%.

## A. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2005 sebanyak 896.048 jiwa dan pada akhir tahun 2010 menurut data sementara dari BPS berjumlah 933.668 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2005 terdapat penambahan netto sebanyak 37.620 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 adalah sebesar 1,73 %. Laju pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Bergas sebesar 2,91% dan terendah di Kecamatan Bancak sebesar -0,68%, yang artinya selama 10 tahun terakhir penduduk berkurang sebesar 0,68%. Hal ini disebabkan banyak penduduk Kecamatan Bancak yang bekerja di luar Kabupaten Semarang, terutama di Sumatera. Sementara bila dilihat sex ratio penduduk tahun 2010 diketahui bahwa perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 97, artinya jumlah penduduk perempuan lebih besar 3% dibanding laki-laki.

Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Semarang, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2005 sebesar 943 jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 983 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2005–2010**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Jumlah penduduk	896.048	899.549	906.112	913.022	917.745	933.668
	- Laki-laki (jiwa)	444.690	446.397	449.740	453.250	455.695	459.381
	- Perempuan (jiwa)	451.358	453.152	456.372	459.772	462.050	474.287
2	Pertumbuhan penduduk (%)	0,46	0,36	0,76	0,76	0,52	1,73
3	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	232.238	238.878	246.583	252.677	259.557	272.243
4	Rata-rata jiwa per keluarga	3,86	3,76	3,67	3,61	3,54	3,43
5	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	943.00	946.40	953.59	960.87	966.00	983.00

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka sementara BPS th. 2010

**Tabel 2.3**  
**Sebaran Penduduk Kabupaten Semarang**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2005-2010**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1.	Getasan	47.400	47.749	48.089	48.268	48.565	47.959
2.	Tengaran	60.782	61.185	61.534	62.172	62.636	64.157
3.	Susukan	44.401	44.527	44.510	44.675	44.710	43.149
4.	Kaliwungu	28.669	28.636	28.687	28.749	28.791	26.302
5.	Suruh	63.880	64.002	64.077	64.228	64.276	59.588
6.	Pabelan	37.170	37.516	37.658	37.663	37.758	37.277
7.	Tuntang	58.241	58.452	58.713	59.144	59.466	60.334
8.	Banyubiru	39.573	39.746	39.883	40.273	40.482	40.200
9.	Jambu	42.510	42.591	36.252	36.435	36.611	36.548
10.	Sumowono	31.138	31.169	31.364	31.567	31.735	29.664
11.	Ambarawa	87.001 <sup>1)</sup>	87.104 <sup>1)</sup>	56.348	56.446	56.501	58.508
12.	Bandungan	-	-	50.358	50.426	50.611	52.502
13.	Bawen	61.970	62.121	49.956	50.413	50.989	53.959
14.	Bringin	43.724	43.987	44.093	44.250	44.372	40.982
15.	Bancak	22.497	22.514	22.495	22.515	22.530	19.971
16.	Pringapus	45.630	45.650	47.758	49.962	50.222	50.547
17.	Bergas	56.590	57.232	57.912	58.659	58.843	68.881
18.	Ungaran Barat	124.872 <sup>2)</sup>	66.614	66.772	66.895	67.736	74.555
19.	Ungaran Timur	-	58.754	59.653	60.282	60.911	68.285
	<b>Total</b>	<b>896.048</b>	<b>899.549</b>	<b>906.112</b>	<b>913.022</b>	<b>917.745</b>	<b>933.668</b>

Sumber: BPS Kabupaten Semarang,

<sup>1)</sup> 2005-2006: Ambarawa (Ambarawa + Bandungan)

<sup>2)</sup> 2005: Ungaran (Ungaran Barat + Ungaran Timur)

<sup>\*)</sup> 2010 Angka Sementara akhir tahun 2010

Struktur penduduk Kabupaten Semarang menurut kelompok umur tahun 2005–2010 seperti terlihat dalam Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Persentase Struktur Penduduk Kabupaten Semarang**

NO.	KELOMPOK UMUR	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	—	24,51%	24,52%	24,51%	25,08%	25,19%	29,30%
2	15 – 64 tahun	68,28%	67,68%	67,52%	66,26%	65,67%	68,42%
3	65 tahun ke atas	7,21%	7,80%	7,97%	8,66%	9,14%	7,68%
4	Dependency ratio	0,46	0,48	0,48	0,50	0,52	0,46

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Dari Tabel 2.4 terlihat angka Dependency ratio atau tingkat beban/tanggungannya penduduk Kabupaten Semarang, yaitu perbandingan jumlah penduduk bukan usia kerja (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan



jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) dari tahun 2005–2010 mengalami kenaikan.

Mata pencaharian utama penduduk dari tahun 2005-2010 masih didominasi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Selanjutnya 3 besar berturut-turut yaitu di sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Persentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Semarang terlihat pada Tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5**  
**Persentase Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Semarang**  
**Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2005–2010**

NO.	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	TAHUN / (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan	38,08	39,60	41,77	29,67	36,50	29,17
2	Pertambangan dan penggalian	0,20	0,28	0,52	0,20	0,23	0,27
3	Industri pengolahan	22,62	19,80	19,11	23,17	21,77	26,57
4	Listrik, gas dan air minum	0,01	0,51	0,26	0,28	0,22	0,21
5	Konstruksi	6,44	7,25	4,53	6,36	6,93	7,27
6	Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi	16,19	16,65	16,12	18,94	15,71	18,19
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	4,49	3,67	3,23	3,64	2,69	2,67
8	Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan	1,36	0,99	0,85	1,70	0,83	1,60
9	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	10,48	11,18	12,63	15,27	14,78	13,61
10	Lainnya	0,13	0,07	0,98	0,77	0,34	0,44

Sumber: BPS Kabupaten Semarang (Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang adalah pemeluk agama Islam, menyusul Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Secara terperinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.6 berikut

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO.	AGAMA	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Islam	802.563	838.814	846.406	846.406	876.139	876.139
2	Kristen	30.041	25.662	36.360	36.360	35.218	35.218
3	Katholik	23.708	24.102	27.244	27.244	24.275	24.275
4	Hindu	517	508	283	283	354	354
5	Budha	6.242	6.905	5.280	5.280	6.605	6.605
6	Konghucu	0	0	405	405	400	400

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang  
\*) angka sementara

Kehidupan beragama dari penduduk Kabupaten Semarang tersebut ditunjang dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana Tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Sarana Peribadatan**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO.	SARANA PERIBADATAN	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Masjid	1490	1.491	1.494	1.494	1.562	1.562
2	Langgar/Mushola	2802	2.802	2.666	2.666	2.876	2.876
3	Gereja Kristen	200	200	200	200	217	217
4	Gereja Katholik/Kapel	27	27	28	28	32	32
5	Pura/Kuil/Sanggah	8	8	8	8	8	8
6	Vihara/Cetya/Klenteng	53	53	54	54	54	54

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang  
\*) angka sementara

## C. Kondisi Ekonomi Daerah

### 1. Potensi Unggulan Daerah

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada di wilayah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Semarang tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan daerah yang dilaksanakan saat ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

**Tabel 2.8**  
**Distribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	SEKTOR	Distribusi ADHK 2000 (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Pertanian	13,30	13,25	13,14	12,99	13,02	13,12
2	Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3	Industri Pengolahan	47,05	46,81	46,85	46,76	46,62	46,32
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,81	0,84	0,84	1,29	0,87	0,88
5	Konstruksi/Bangunan	3,79	3,77	3,77	4,04	3,60	3,55
6	Pertdagangan, Hotel dan Restoran	21,78	21,87	21,79	20,36	21,49	21,49
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,08	2,11	2,20	2,20	2,21	2,19
8	Lemb.Keu, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,15	3,22	3,28	3,42	3,53	3,62
9	Jasa – jasa	7,92	8,01	8,01	8,33	8,55	8,72
	<b>TOTAL PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka Sementara

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang terutama di bidang industri, pertanian dan pariwisata. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Semarang yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin. Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang tahun 2005-2010 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Distribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	SEKTOR	Distribusi ADHB 2000 (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Pertanian	14,86	15,08	14,74	14,58	15,04	15,20
2	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3	Industri Pengolahan	43,91	43,70	44,00	43,65	43,08	42,83
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1,33	1,36	1,29	1,31	1,29	1,29
5	Konstruksi/Bangunan	4,13	4,12	4,08	4,01	4,04	3,90

NO	SEKTOR	Distribusi ADHB 2000 (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,82	20,81	20,90	20,63	20,36	20,34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,73	2,65	2,62	2,68	2,69	2,67
8	Lemb.Keu, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,58	3,69	3,76	4,01	4,16	4,32
9	Jasa – jasa	8,53	8,47	8,49	9,00	9,22	9,33
	<b>TOTAL PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka Sementara

Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun yang selalu menjadi 3 (tiga) penyumbang terbesar dalam PDRB, berturut-turut yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

Sektor industri merupakan sektor andalan, tiap tahun jumlah industri di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Industri kecil terdiri dari industri formal dan non formal pada tahun 2005 berjumlah 9.773 meningkat menjadi 11.062 pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan rata-rata pertahun 2,51%. Penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari 24.091 orang pada tahun 2005, menjadi 29.667 orang pada tahun 2010 atau peningkatan rata-rata 4,27% per tahun.

Industri menengah besar pada tahun 2005 berjumlah 138 unit menjadi 176 unit tahun 2010 atau meningkat 4,99% rata-rata per tahun, dengan penyerapan tenaga kerja meningkat dari 63.763 orang pada tahun 2005 menjadi 72.246 orang tahun 2010 atau meningkat rata-rata pertahun 2,55%. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut :

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Industri**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005–2010**

NO	JENIS DATA	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>1</b>	<b>Industri Kecil</b>							
a	Jumlah Unit Usaha		9.773	10.025	10.303	10.570	10.746	11.062
	- Formal	Unit	951	1.060	1.192	1.313	1.341	1.469
	- Non Formal	Unit	8.822	8.965	9.111	9.257	9.405	9.593
b	Jml Tenaga Kerja		24.091	25.075	26.091	27.245	27.722	29.667
	- Formal	Orang	8.329	9.056	9.812	10.706	10.918	12.003
	- Non Formal	Orang	15.762	16.019	16.279	16.539	16.804	17.664
c	Nilai Produksi	Rp.(milyar)	315.091	350.328	393.242	401.789	404.174	543.837
<b>2</b>	<b>Industri Menengah Besar</b>							
	Jumlah	Unit	138	145	154	161	166	176
	Tenaga Kerja	Orang	63.763	64.805	68.461	69.009	71.506	72.246

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Semarang

Potensi unggulan lain yaitu sektor pariwisata. Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang sedang dalam taraf perkembangan, potensi kepariwisataan Kabupaten Semarang telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Obyek wisata Kabupaten Semarang tersebar di 12 kecamatan, meliputi wisata alam, wisata budaya/religi, wisata air, wisata industri, wisata rekreasi dan restoran, wisata nostalgia Jawa Tengah dan Desa Wisata. Sedangkan persebaran fasilitas akomodasi yang ada di Kabupaten Semarang saat ini baru terkonsentrasi di beberapa kawasan saja seperti di Ungaran Barat, Bandungan, Bawen, Ambarawa dan Getasan khususnya di kawasan Kopeng.

Sektor pariwisata yang diwakili oleh berkembangnya lapangan usaha di bidang perdagangan, hotel dan restoran, selain mampu menjadi penyumbang kedua terbesar bagi perekonomian daerah juga merupakan bentuk realita bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Semarang

menawarkan sebuah peluang untuk segera dijadikan sektor tulang punggung dalam pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dengan limpahan sumberdayanya yang masih teramat besar.

Kabupaten Semarang mempunyai potensi sumberdaya alam yang didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan disektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

Berbagai komoditi yang potensial di Kabupaten Semarang diantaranya dari tanaman pangan, tanaman buah-buahan, tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka dan tanaman perkebunan. Adapun sentra tanaman pertanian dan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.11 :

**Tabel 2.11**  
**Sentra Pertanian dan Perkebunan Di Kabupaten Semarang**

NO.	JENIS KOMODITI	SENTRA PRODUKSI
<b>A.</b>	<b>Tanaman Pangan</b>	
1.	Padi	Banyubiru, Suruh, Susukan, Ambarawa, Bringin, Pabelan
2.	Jagung	Tengaran, Getasan, Bringin, Sumowono dan Jambu
3.	Kedelai	Bringin, Bancak, Susukan, Kaliwungu
4.	Kacang Tanah	Pabelan, Suruh, Bringin
5.	Ubi Kayu	Susukan, Kaliwungu, Suruh
6.	Ubi Jalar	Sumowono, Jambu, Banyubiru
<b>B.</b>	<b>Tanaman Buah-buahan</b>	
1.	Alpukat	Sumowono, Ambarawa, Getasan
2.	Mangga	Bringin, Susukan, Bergas
3.	Rambutan	Susukan, Ungaran
4.	Durian	Jambu, Banyubiru, Tuntang
5.	Pisang	Ambarawa
6.	Salak	Ambarawa, Tengaran, Banyubiru
7.	Kelengkeng	Ambarawa, Jambu, Banyubiru
8.	Manggis	Ungaran, Tuntang, Getasan, Tengaran

**Tabel 2.11**  
**Sentra Pertanian dan Perkebunan Di Kabupaten Semarang**

NO	BIENIS KOMODITI	SENTRA PRODUKSI
9.	Nangka	Jambu, Sumowono, Banyubiru
<b>C.</b>	<b>Tanaman Hias</b>	
1.	Gladiol	Ambarawa
2.	Krisant	Ambarawa, Sumowono
3.	Mawar	Ambarawa, Sumowono, Bawen
4.	Angrek	Ungaran, Ambarawa
5.	Sedap malam	Ambarawa
<b>D.</b>	<b>Tanaman Sayur-sayuran</b>	
1.	Bawang Daun	Ambarawa, Bawen, Sumowono, Getasan
2.	Kentang	Getasan
3.	Kubis	Getasan, Ambarawa, Sumowono
4.	Petai/Sawi	Ambarawa, Bawen, Sumowono, Getasan
5.	Wortel	Getasan, Ambarawa, Sumowono
6.	Cabe Besar	Getasan, Ambarawa, Sumowono
7.	Cabe Rawit	Getasan, Ambarawa, Sumowono
8.	Tomat	Getasan, Ambarawa, Sumowono, Bawen
9.	Buncis	Ambarawa, Bawen Sumowono
<b>E.</b>	<b>Tanaman Biofarmaka</b>	
1.	Jahe	Sumowono, Getasan, Tenganan
2.	Temulawak	Susukan, Suruh
3.	Kencur	Bringin, Bawen, Tuntang
4.	Kunyit	Bringin, Bancak, Ungaran
<b>F.</b>	<b>Tanaman Perkebunan</b>	
1.	Kelapa	Suruh, Banyubiru, Tuntang
2.	Kelapa Deres	Suruh
3.	Kopi	Sumowono, Jambu
4.	Cengkeh	Suruh, Tenganan
5.	Aren	Banyubiru, Sumowono
6.	Kapok	Pringapus, Bergas, Bawen, Bringin
7.	Wijen	Bancak
8.	Panili	Sumowono, Jambu, Banyubiru
9.	Tebu	Pabelan, Bringin, Getasan
10.	Kakao	Jambu, Sumowono, Bawen
11.	Tembakau	Getasan, Banyubiru

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

## 2. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Semarang, pada lima tahun terakhir berdasar data PDRB Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi, Nilai PDRB Kabupaten Semarang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK Tahun 2000) walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan, namun selalu mengalami pertumbuhan yang positif.

Secara rinci Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2005–2010 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini :

**Tabel 2.12**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang**  
**Kurun Waktu 2005–2010\*)**

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000	
	Nilai (Rp.000)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.000)	Pertumbuhan (%)
2005	6.488.712.943	14,09	4.481.358.290	3,11
2006	7.340.034.640	13,19	4.652.041.800	3,81
2007	8.175.899.230	11,39	4.871.444.250	4,72
2008	9.284.507.640	13,56	5.079.003.740	4,26
2009	10.066.845.500	11,41	5.300.723.400	4,37
2010*)	11.208.917.950	11,34	5.532.672.500	4,38

Sumber : BPS Kabupaten Semarang  
\*) Angka perkiraan

Perkembangan PDRB masing-masing sektor dalam kurun waktu 2005-2010 dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.13, Tabel 2.14, dan Tabel 2.15 berikut ini :

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Semarang**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2010**

NO	SEKTOR	PDRB ADHB					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Pertanian	963.544,5	1.107.069,6	1.204.851,5	1.354.111,8	1.490.281,0	1.703.849,9
2	Pertambangan dan Penggalian	7.383,4	8.681,0	9.834,6	11.163,8	12.280,4	13.606,74
3	Industri Pengolahan	2.847.190,8	3.207.309,6	3.597.211,3	4.052.317,2	4.364.042,7	4.800.513,3
4	Listrik, Gas dan Air Minum	86.024,9	99.508,1	105.546,6	121.282,7	130.744,8	144.253,4
5	Konstruksi/ Bangunan	267.960,2	302.663,4	333.635,9	372.681,1	390.250,8	437.537,5
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.350.332,1	1.527.679,0	1.709.048,1	1.915.822,9	2.070.685,2	2.280.079,5



NO	SEKTOR	PDRB ADHB					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
5	Konstruksi/ Bangunan	267.960,2	302.663,4	333.635,9	372.681,1	390.250,8	437.537,5
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.350.332,1	1.527.679,0	1.709.048,1	1.915.822,9	2.070.685,2	2.280.079,5
7	Pengangkutan dan Komunikasi	176.955,0	194.853,1	214.282,9	248.784,3	267.111,6	299.011,4
8	Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	232.230,6	270.665,2	307.388,8	372.326,8	421.871,2	484.274,4
9	Jasa – jasa	552.851,1	621.605,6	694.099,6	836.017,0	919.577,7	1.045.791,7
	<b>TOTAL PDRB</b>	<b>6.484.472,5</b>	<b>7.340.034,6</b>	<b>8.175.899,2</b>	<b>9.284.507,6</b>	<b>10.066.845,5</b>	<b>11.208.917,9</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka Sementara

**Tabel 2.14**  
**Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Semarang**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2010**

NO	SEKTOR	PDRB ADHK 2000					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Pertanian	596.026,3	616.562,8	640.077,5	699.841,3	693.711,3	725.613,7
2	Pertambangan dan Penggalian	5.181,7	5.491,5	5.912,1	6.187,1	6.454,5	6.658,0
3	Industri Pengolahan	2.108.699,3	2.177.770,3	2.282.473,7	2.375.116,9	2.467.388,8	2.562.657,1
4	Listrik, Gas dan Air Minum	36.364,1	38.847,0	40.834,1	43.409,6	46.168,4	48.811,7
5	Konstruksi/ Bangunan	169.911,1	175.538,4	183.884,6	186.358,7	191.825,8	196.301,1
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	975.945,5	1.017.185,2	1.061.261,9	1.099.624,6	1.143.056,6	1.189.021,4
7	Pengangkutan dan Komunikasi	93.210,7	98.132,1	106.943,3	111.501,0	115.643,8	121.104,5
8	Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	141.176,1	149.703,2	159.958,3	173.828,4	186.583,2	200.096,0
9	Jasa – jasa	354.843,5	372.811,3	390.098,7	423.136,2	449.891,0	482.409,1
	<b>TOTAL PDRB</b>	<b>4.481.358,3</b>	<b>4.652.041,8</b>	<b>4.871.444,3</b>	<b>5.079.003,7</b>	<b>5.300.723,4</b>	<b>5.532.672,5</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka Sementara

**Tabel 2.15**  
**Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	SEKTOR	Distribusi ADHK 2000 (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Pertanian	-2,14	3,45	3,81	3,09	5,13	4,60
2	Pertambangan dan Penggalian	4,40	5,98	7,66	4,65	4,32	3,15
3	Industri Pengolahan	4,72	3,28	4,81	4,06	3,88	3,86
4	Listrik, Gas dan Air Minum	3,95	6,83	5,12	6,31	6,36	5,73
5	Konstruksi/Bangunan	7,73	3,31	4,75	1,35	2,93	2,33
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,78	4,23	4,33	3,61	3,95	4,02
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9,66	5,28	8,98	4,26	3,72	4,72
8	Lemb.Keu, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,73	6,04	6,85	8,67	7,34	7,24
9	Jasa – jasa	0,72	5,06	4,64	8,47	6,32	7,23
	<b>RATA-RATA</b>	<b>3,11</b>	<b>3,81</b>	<b>4,72</b>	<b>4,26</b>	<b>4,37</b>	<b>4,38</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka Sementara

Dari tabel diatas dapat diketahui sektor yang mengalami pertumbuhan relatif cukup tinggi berdasarkan harga konstan adalah sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan di atas 7 %, sedangkan sektor listrik, gas dan air minum di atas 5 %.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat menunjukkan gambaran riil dari kondisi pembangunan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2005 dan 2010 masing-masing rata-rata sebesar 4,04% dan 8,35%. Angka pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Semarang selama 6 tahun terakhir selalu lebih rendah bila dibanding dengan angka tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sedangkan Angka Inflasi cenderung selalu mendekati angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Perkembangan Angka Pertumbuhan dan Inflasi Kabupaten Semarang dari tahun 2005–2010 seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.16 berikut :

**Tabel 2.16**  
**Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Kabupaten Semarang**  
**Dalam Kurun Waktu 2005–2010**

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI			INFLASI		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Semarang
2005	5,70	5,35	3,11	17,11	16,46	17,16
2006	5,50	5,33	3,81	6,60	6,50	6,43
2007	6,30	5,59	4,72	6,59	6,24	6,03
2008	6,10	5,46	4,26	11,06	9,55	11,03
2009	4,30	4,47	3,98	3,70	3,32	3,17
2010*)	6,10	5,80	4,38	6,96	6,88	6,29
Rata-rata	5,67	5,33	4,04	8,67	8,16	8,35

Sumber data : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka Sementara

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Semarang, maka PDRB perkapita/pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Semarang juga mengalami kenaikan.

PDRB per kapita/pendapatan perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2005–2010 tiap tahun mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,87% pertahun atas dasar harga berlaku atau 3,20% atas dasar harga konstan 2000, selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.17 sebagai berikut :

**Tabel 2.17**  
**Pendapatan Per Kapita dan Pertumbuhannya**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005–2010**

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	ADHB	ADHK 2000	ADHB	ADHK 2000
2005	6.460.164,00	4.389.545,00	14,09	2,09
2006	7.243.735,00	4.535.574,00	12,13	3,33
2007	8.030.714,00	4.738.868,00	10,86	4,48
2008	8.895.647,00	4.875.509,00	10,77	2,88
2009	9.621.069,88	5.056.033,42	8,15	3,70
2010*)	10.504.937,56	5.192.801,06	9,19	2,71
<b>Rata-rata</b>			<b>10,87</b>	<b>3,20</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Semarang,

\*) Angka sementara

#### 4. Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dapat ditunjukkan dengan beberapa kelompok indikator kinerja yaitu :

- 1) Kinerja Ekonomi
- 2) Lingkungan Usaha
- 3) Kinerja Pemerintah
- 4) Investasi
- 5) Infrastruktur
- 6) Dinamika Bisnis

Berdasarkan hasil Survey Daya Saing Daerah Tahun 2010 Jawa Tengah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit (GTZ) dan Suara Merdeka, Kabupaten Semarang menempati peringkat 21 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan nilai indeks kumulatif 4,22. Indikator daya saing daerah Kabupaten Semarang sebagaimana Tabel 2.18 berikut :

**Tabel 2.18**  
**Aspek Daya Saing Daerah**

No	Kelompok	Indeks	Peringkat Provinsi
1	Kinerja Ekonomi	4,81	22
2	Lingkungan Usaha	4,69	25
3	Kinerja Pemerintah	3,94	29
4	Investasi	3,41	4
5	Infrastruktur	3,90	22
6	Dinamika Bisnis	5,66	22

Sumber : Survey Daya Saing Daerah 2010 Jawa Tengah

Faktor utama penentu keberhasilan pembangunan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Semakin baik pendidikan yang diperoleh oleh penduduk suatu daerah, semakin cepat pembangunan daerah menampakkan hasil. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Tingkat Pendidikan/Ijazah Yang dimiliki Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

Ijazah/STTB tertinggal yang dimiliki	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Tidak punya ijazah SD	206.372	218.132	235.602	219.238	208.238	185.699	212.214
SD/MI/SDLB	255.992	249.062	253.050	231.851	247.653	231.397	244.834
SMP/MTS/SMPLB	155.392	137.883	128.013	142.344	142.827	164.960	145.237
SMU/MA/SMK/SMULB	118.654	117.209	114.504	120.371	137.013	166.973	129.121
Akademi/Universitas	31.222	34.308	35.058	39.471	35.804	49.259	37.520
Jumlah	767.632	756.594	766.227	753.275	771.535	798.288	

Sumber: BPS Kabupaten Semarang (Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 71,90 pada tahun 2005 menjadi 73,82 pada tahun 2009, namun bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah terjadi penurunan peringkat, yaitu dari peringkat 5 menjadi peringkat 7. Perkembangan dan peringkat IPM Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 2.20 :

**Tabel 2.20**  
**Kabupaten Semarang dan Daerah Sekitar Tahun 2005–2009**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia**

NO	KABUPATEN/KOTA	2005		2009		PERTUMBUHAN 2005-2009
		IPM	PERINGKAT PROV.	IPM	PERINGKAT PROV.	
1	Kota Semarang	75,30	2	76,11	2	0,81
2	Kota Salatiga	74,80	3	76,90	4	2,10
3	Kabupaten Temanggung	71,80	7	73,85	6	2,05
4	Kabupaten Semarang	71,90	5	73,66	7	1,76
5	Kabupaten Demak	69,40	18	72,10	16	2,70
6	Kabupaten Grobogan	68,20	25	70,60	25	2,40
7	Kabupaten Boyolali	69,00	21	70,44	26	1,44
8	Kabupaten Kendal	67,50	30	70,07	31	2,57
	<b>IPM Prov. Jawa Tengah</b>	<b>69,80</b>		<b>72,10</b>		<b>2,30</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

#### **D. Kondisi Pembangunan Kewilayahan**

Secara kewilayahan, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Semarang memiliki kondisi, potensi dan permasalahan yang berbeda-beda, dimana dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya ekonomi yang tidak sama. Sumberdaya ekonomi yang paling mendasar adalah letak geografis dan sumberdaya alam. Terdapat beberapa kecamatan yang secara geografis terletak pada jalur perekonomian regional seperti pada jalur jalan Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta, yang tentunya lebih memberikan peluang perkembangan ekonomi lokal dibandingkan dengan kecamatan yang tidak dilalui jalur ekonomi regional seperti Kecamatan Bancak dan Kecamatan Kaliwungu. Demikian pula dengan daerah yang memiliki sumberdaya alam melimpah misalnya tanah subur dan sumberdaya air mencukupi relatif lebih

berkembang daripada daerah yang sumberdaya alamnya terbatas. Hal ini dapat dilihat pada daerah di bagian barat Kabupaten Semarang cenderung lebih produktif dibandingkan dengan daerah di bagian timur wilayah seperti Kecamatan Bancak, Kecamatan Bringin dan Kecamatan Suruh. Distribusi PDRB tiap Kecamatan Tahun 2005-2009 sebagaimana Tabel 2.21 berikut ini :

**Tabel 2.21**  
**Distribusi PDRB Tiap Kecamatan Tahun 2005-2009**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000**

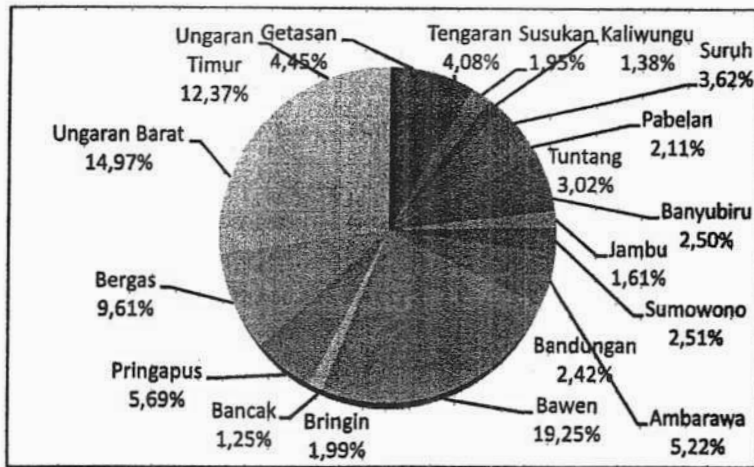
NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Getasan	3,37	3,16	3,73	4,24	4,45
2.	Tengaran	4,36	4,40	4,37	4,16	4,08
3.	Susukan	2,06	2,05	1,97	1,89	1,95
4.	Kaliwungu	1,64	1,58	1,40	1,43	1,38
5.	Suruh	3,80	3,78	3,85	3,61	3,62
6.	Pabelan	2,14	2,31	2,23	2,12	2,11
7.	Tuntang	3,12	3,25	3,14	2,98	3,02
8.	Banyubiru	2,69	2,66	2,59	2,54	2,50
9.	Jambu	1,55	1,67	1,74	1,47	1,61
10.	Sumowono	2,66	2,63	2,60	2,47	2,51
11.	Ambarawa	6,32	6,38	6,33	5,29	5,22
12.	Bandungan	**)	**)	**)	2,50	2,42
13.	Bawen	19,69	19,69	19,64	19,44	19,25
14.	Bringin	2,15	2,13	2,05	1,96	1,99
15.	Bancak	0,96	0,94	0,97	0,98	1,25
16.	Pringapus	5,97	5,85	5,85	5,77	5,69
17.	Bergas	9,82	9,70	9,75	9,63	9,61
18.	Ungaran Barat	27,71	27,82	15,14	14,99	14,97
19.	Ungaran Timur	*)	*)	12,67	12,53	12,37
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Masih gabung dengan Kec.Ungaran Barat

\*\*\*) Belum terbentuk Kec.Bandungan

Dilihat dari persentase distribusi PDRB di tiap kecamatan menunjukkan seberapa besar kontribusi output perekonomian kecamatan terhadap kabupaten. Aktifitas ekonomi masih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan yang ditunjukkan dengan angka distribusi PDRB di atas 5 %. Dengan kata lain kecamatan-kecamatan lain relatif tertinggal dengan kontribusi di bawah 2 %. Distribusi PDRB tiap Kecamatan pada tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2.1 Distribusi PDRB Tiap Kecamatan Tahun 2009 Berdasarkan Harga Konstan**

Kondisi tersebut juga dapat digambarkan pada data PDRB perkapita kecamatan yang menunjukkan beberapa kecamatan dengan PDRB perkapita cukup tinggi yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, dan Kecamatan Bergas. Sementara kecamatan dengan PDRB perkapita rendah adalah Kecamatan Jambu, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak. Sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.22  
PDRB Perkapita Tiap Kecamatan Th. 2005-2009  
Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Rp.000)**

NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Getasan	4.554,99	4.596,85	6.192,50	7.433,03	8.424,90
2.	Tengaran	4.895,67	5.525,39	6.309,16	6.811,60	7.204,65
3.	Susukan	2.998,27	3.446,92	3.755,42	4.141,03	4.602,54
4.	Kaliwungu	3.657,92	4.040,19	4.176,90	4.781,73	5.198,05
5.	Suruh	4.037,68	4.576,13	5.094,67	5.430,40	6.001,33
6.	Pabelan	3.765,22	4.548,74	4.830,05	5.268,75	5.778,45
7.	Tuntang	3.598,28	4.242,59	4.688,54	5.061,24	5.670,80
8.	Banyubiru	4.661,16	5.198,17	5.718,34	6.156,56	6.603,34
9.	Jambu	2.596,80	3.374,84	4.745,32	3.948,48	5.207,52
10.	Sumowono	5.729,13	6.308,19	7.157,33	7.328,64	7.989,41

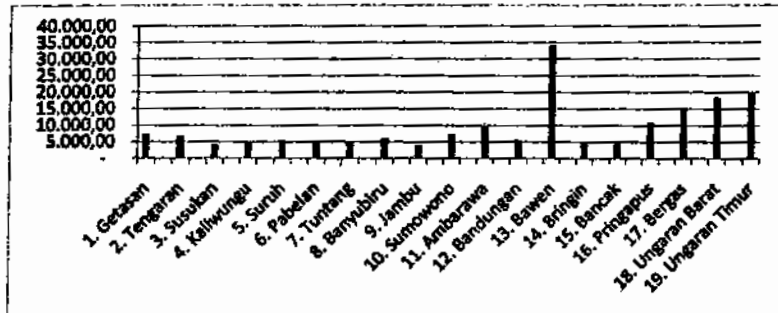
NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
11.	Ambarawa	4.980,87	5.742,99	10.164,65	9.973,48	10.634,78
12.	Bandungan	**)	**)	**)	5.660,59	5.991,70
13.	Bawen	19.508,67	22.077,75	31.074,85	34.424,74	36.509,62
14.	Bringin	3.309,03	3.682,78	3.942,73	4.502,39	4.897,00
15.	Bancak	3.122,70	3.385,21	3.747,32	4.359,32	5.995,72
16.	Pringapus	8.624,75	9.471,61	10.483,11	11.068,74	11.403,20
17.	Bergas	11.677,57	12.557,49	13.889,33	15.413,42	16.599,89
18.	Ungaran Barat	14.122,40	30.168,66	16.391,18	18.349,91	19.073,75
19.	Ungaran Timur	*)	*)	17.742,94	19.794,30	20.926,87
	<b>Rata-rata</b>	<b>7.255,17</b>	<b>8.177,61</b>	<b>9.064,61</b>	<b>10.215,87</b>	<b>10.997,23</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Masih gabung dengan Kec.Ungaran Barat

\*\*\*) Belum terbentuk Kec.Bandungan

PDRB perkapita tiap Kecamatan tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut :

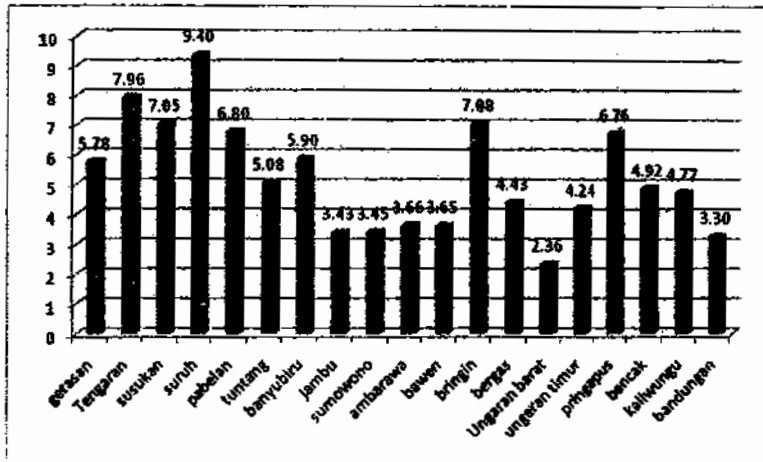


**Gambar 2.2 PDRB Perkapita Tiap Kecamatan Th. 2009 Berdasarkan Harga Berlaku (dalam Rp.000)**

Indikator lain yang menunjukkan taraf kesejahteraan masyarakat adalah besarnya jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera (Keluarga Pra KS). Prosentase jumlah Pra KS yang terbesar berada di Kecamatan Suruh, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Bringin, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Pringapus. Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah Keluarga Pra KS pada daerah ini adalah faktor aksesibilitas pada sumberdaya ekonomi, yaitu umumnya daerah ini tidak berada pada jalur ekonomi regional, dan beberapa bagian wilayah termasuk daerah dengan jangkauan aksesibilitas

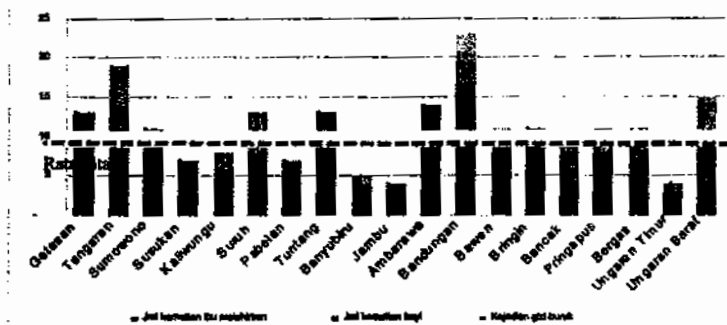


terbatas. Berbeda kondisinya dengan daerah-daerah yang aksesibilitasnya cukup mudah dan sebagian besar sudah berupa kawasan perkotaan, persentase Keluarga Pra KS relatif rendah, misalnya di Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Ungaran Timur, dan Kecamatan Bandungan (lihat Gambar 2.3)



**Gambar 2.3 Persentase Keluarga Pra KS Per Kecamatan Tahun 2010**

Sementara itu pada aspek sosial dapat diketahui dengan indikator dasar kondisi kesehatan masyarakat, yaitu jumlah kematian ibu melahirkan, jumlah kematian bayi dan kejadian gizi buruk pada kurun waktu tertentu. Dari data tahun 2010 diketahui bahwa kecamatan-kecamatan dengan taraf kesehatan relatif rendah diukur dengan ketiga indikator tersebut adalah Kecamatan Bandungan, Kecamatan Tngaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Getasan, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Tuntang..



Gambar 2.4 Indikator dasar kondisi kesehatan tiap kecamatan tahun 2010

Dengan memperhatikan beberapa kondisi tiap kecamatan di atas diketahui bahwa terdapat kondisi yang tidak merata ( timpang ) antar kecamatan. Ketimpangan ini terutama dalam hal besarnya aktifitas ekonomi lokal yang tumbuh. Aktifitas ekonomi ini sangat penting karena dengan melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat mendapatkan pendapatan, meningkatkan daya beli yang berlimbas pada tumbuhnya kegiatan ekonomi lain, serta pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan.

Dengan memperhatikan beberapa indikator makro di atas, wilayah-wilayah dengan kondisi relatif tertinggal yang perlu menjadi prioritas pembangunan kewilayahan adalah Kecamatan Bancak, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Pabelan.

Pada wilayah-wilayah tersebut di atas terletak agak jauh dari pusat perekonomian atau memiliki sumberdaya alam yang relatif terbatas misalnya ketersediaan air yang tidak mencukupi, tanah kurang subur, serta kurangnya dukungan infrastruktur ekonomi yang cukup baik.

Sementara itu terdapat daerah-daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang cukup, terletak tidak terlalu jauh dengan pusat

perekonomian, atau sebenarnya memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung tetapi belum dikelola secara optimal, sehingga masih mengalami ketertinggalan, seperti yang terjadi di Kecamatan Bandungan, Jambu, Sumowono, Getasan, Banyubiru, dan Bawen.

Pada wilayah tertentu seperti Kecamatan Bawen, memberikan sumbangan PDRB cukup tinggi (didominasi sektor industri) tetapi sebagian kondisi sosial masyarakat masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa sektor industri skala besar belum memberikan dampak ekonomi langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

#### **E. Kondisi Kemiskinan**

Kondisi **kemiskinan suatu daerah pada dasarnya dapat di kategori menjadi dua kategori**, pertama kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural - Fakir Miskin; dan yang kedua kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, krisis ekonomi, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial, yang jumlahnya relatif lebih besar dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat dan ekonomi global pada suatu daerah.

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kabupaten Semarang digunakan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu melalui data Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Rumah Tangga Miskin, dengan kriteria yang berbeda.

## 1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin dihitung berdasarkan pada hasil Survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan baik pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan pemenuhan 2100 kkal perkapita.

Berdasarkan kriteria tersebut, selama kurun waktu tahun 2005–2010 terjadi penurunan angka dari 13,16% menjadi 10,06%. Dibanding angka Nasional dan Angka Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang relatif lebih rendah, dimana secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.23

**Tabel 2.23**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2005-2010**

NO	TINGKAT	2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Nasional	15.97	17.75	16.58	15.42	14.15	13,33
2	Provinsi Jawa Tengah	20.49	22.19	20.43	19.23	17.72	16,56
3	Kabupaten Semarang	13.16	13.62	12.34	11.37	10.66	10,06**)

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka Maret 2010

\*\*) Data diolah

## 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan data kemiskinan secara jelas baik nama, alamat dan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut data kemiskinan diperoleh dengan menggunakan 14 kriteria sebagai berikut :

- Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
- Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan;

- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00 perbulan;
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tak tamat SD/hanya SD;
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Dari keempat belas kriteria tersebut, kondisi jumlah keluarga miskin Kabupaten Semarang tahun 2008 berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.24 :

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Sasaran Hasil PPLS 2008 di Kabupaten Semarang**

NO.	KECAMATAN	KATEGORI			Jumlah	ART
		HAMPIR MISKIN	MISKIN	SANGAT MISKIN		
1	JAMBU	1.185	2.050	1.298	4.533	15.141
2	BANYUBIRU	1.832	1.764	845	4.441	14.117
3	BANCAK	1.536	1.312	748	3.596	11.309
4	GETASAN	1.390	930	290	2.610	7.590
5	BRINGIN	2.477	2.372	1.068	5.917	17.925
6	SUMOWONO	1.379	1.877	983	4.239	12.618
7	BERGAS	1.837	1.863	901	4.601	14.793
8	SUSUKAN	1.451	1.570	770	3.791	12.087
9	BANDUNGAN	1.251	980	313	2.544	7.951
10	TENGARAN	545	933	688	2.166	7.495
11	PRINGAPUS	1.267	849	335	2.451	7.973
12	TUNTANG	757	1.083	774	2.614	9.151
13	BAWEN	1.257	1.461	574	3.292	9.854
14	SURUH	2.126	1.961	874	4.961	15.160
15	KALIWUNGU	715	1.292	767	2.774	8.539
16	PABELAN	1.977	1.390	450	3.817	11.320
17	AMBARAWA	1.989	1.187	405	3.581	11.237
18	UNGERAN BARAT	1.114	767	263	2.144	6.699
19	UNGERAN TIMUR	1.407	993	328	2.728	7.740
<b>JUMLAH</b>		<b>27.492</b>	<b>26.634</b>	<b>12.674</b>	<b>66.800</b>	<b>208.699</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

## F. Kondisi Urusan Pemerintahan Daerah

### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Semarang telah menunjukkan peningkatan, antara lain terlihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), penurunan angka putus sekolah, peningkatan angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, serta adanya peningkatan jumlah sarana pendukung seperti ruang kelas dan perpustakaan. Untuk lebih jelasnya capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2005–2010 yang terkait urusan pendidikan sebagai berikut:

1) Perkembangan pencapaian Angka Prestasi Bidang Pendidikan :

**Tabel 2.25**  
**Pencapaian Angka Indikator Bidang Pendidikan**  
**di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	TAHUN					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	-SD/MI	%	119,48	103,79	109,14	107,09	104,85	103,30
	-SLTP/MTs	%	88,19	88,96	95,11	95,46	95,77	95,82
	-SMU/SMK/MA	%	44,16	44,34	39,52	40,80	40,90	47,91
2	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	-SD/MI	%	98,94	90,56	95,04	94,89	94,95	94,98
	-SLTP/MTs	%	82,80	84,67	81,97	81,37	81,50	81,58
	-SMU/SMK/MA	%	32,74	26,38	31,75	32,10	34,34	39,12
3	Angka Putus Sekolah							
	-SD/MI	%	0,24	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	-SLTP/MTs	%	0,78	0,90	0,79	0,71	0,71	0,66
	-SMU/SMK/MA	%	1,73	1,24	1,30	1,26	1,26	0,95
4	Angka Kelulusan							
	-SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	97,32	98,04	99,88
	-SLTP/MTs	%	98,92	95,57	98,02	83,88	88,13	99,40
	-SMU/SMK/MA	%	92,00	93,10	93,31	92,18	92,17	99,23
5	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	85,15	87,42	88,21	89,35	90,03	90,50
6	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	51,59	55,27	57,12	60,72	67,63	67,90

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Selama kurun waktu Tahun 2005-2010 terjadi kenaikan APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 7,63% dan jenjang pendidikan SMU/SMK/MA sebesar 3,75%. Sedangkan penurunan APK terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 16,18%. Penurunan APK pada jenjang SD/MI karena pada tahun 2005 banyak anak usia dibawah 7 tahun (under) langsung masuk SD/MI, hal ini disebabkan belum berkembangnya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di masyarakat Kabupaten Semarang pada waktu itu. Pada perkembangannya, selama kurun waktu lima tahun Program PAUD di Kabupaten Semarang semakin berkembang. Lembaga-lambaga PAUD baik formal maupun non formal semakin banyak didirikan, disertai dengan semakin meningkatnya kesadaran orang tua untuk

memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu sebelum masuk SD/MI.

Dalam kurun waktu tahun 2005-2010 pada jenjang pendidikan SMU/SMK/MA mengalami kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 6,38%. Sedangkan penurunan APM terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 3,96% dan jenjang SMP/MTs sebesar 1,22%. Hal ini disebabkan keberhasilan program Keluarga Berencana dari pemerintah dan masih banyaknya anak di Kabupaten Semarang yang bersekolah di kota-kota perbatasan (Kota Salatiga dan Semarang) sehingga menyebabkan jumlah usia sekolah siswa mengalami kenaikan yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk. Disamping itu banyaknya korban Putus Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang juga menyebabkan turunnya angka APM. Tenaga kerja korban PHK yang sebagian adalah urban akan kembali ke daerah asal beserta anggota keluarganya, sehingga anak usia sekolah korban PHK juga akan kembali ke daerah asal. Hal ini tentu mengurangi jumlah siswa di Kabupaten Semarang.

Terdapat penurunan angka putus sekolah tahun 2010 dibanding tahun 2005 di semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/MI angka putus sekolah turun sebesar 0,13%; jenjang SMP/MTs turun sebesar 0,12%; dan jenjang SMU/SMK/MA turun sebesar 0,78%.

Terdapat kenaikan angka kelulusan Tahun 2010 dibanding tahun 2005 pada jenjang pendidikan SMU/SMK/MA sebesar 7,23% dan pada jenjang SLTP/ MTs sebesar 0,48%. Sedangkan penurunan



angka kelulusan terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,12%. Hal ini disebabkan karena angka kelulusan yang semula ditentukan dengan Ujian Sekolah mulai tahun 2007/2008 ditentukan dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

Terdapat kenaikan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2010 dibanding tahun 2005 sebesar 5,35%. Terdapat kenaikan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2010 dibanding tahun 2005 sebesar 16,31%.

- 2) Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal untuk mengantisipasi masyarakat yang Drop Out dan buta aksara melalui berbagai kegiatan pemberantasan buta aksara, Kejar Paket A/B/C, Pendidikan Anak Usia Dini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus.

Jumlah warga belajar pendidikan anak usia dini pada 5 tahun terakhir meningkat dari 25,55% pada tahun 2005 menjadi 33,70% pada tahun 2010. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan anak usia dini serta makin meningkatnya fasilitasi program PAUD oleh Pemerintah.

Jumlah masyarakat buta aksara di Kabupaten Semarang pada tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15 Tahun Ke Atas**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Buta Aksara (Jiwa)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Laki-laki	19.590	15.481	8.607	8.907	5.580	428
2.	Perempuan	71.064	46.393	35.259	24.708	13.476	926
	Total	90.654	61.874	43.866	33.615	19.056	1.354

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

3) Perkembangan data pokok pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2005–2010 sebagai berikut:

a. SD/MI

**Tabel 2.27**  
**Perkembangan Data Pokok SD/MI Tahun 2005-2010**

		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Sekolah	701	702	702	701	700	697
2	Siswa Baru Tk. I	16.265	18.332	17.061	17.721	15.806	15.446
3	Siswa	102.200	107.950	107.400	108.120	100.224	98.831
4	Lulusan	15.928	15.851	15.736	15.642	14.366	15.080
5	Ruang Kelas:	4.229	4.247	4.247	4.322	4.274	4.252
	Balk	1.924	1.952	1.952	1.900	2.234	2.264
	Ringan	1.466	1.415	1.415	1.431	1.000	1.192
	Berat	839	880	880	991	1.040	796
6	Kelas	4.229	4.247	4.247	4.322	4.274	4.282
7	Guru:	6.083	5.083	5.758	5.866	6.047	6.288
	Layak mengajar (D3, S1)	4.841	4.016	4.647	4.784	5.050	5.016
	Semi layak (SPG, PGA D1, D2)	62	749	797	786	997	729
	Tidak Layak (SMA, SMK)	1.180	318	314	296	287	240
8	Fasilitas:						
	Perpustakaan	208	208	205	277	371	368
	Lapangan		701	734	699	692	697
	LKS	610	610	651	689	651	651

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Jumlah sekolah SD/MI pada tahun 2009 ke tahun 2010 berkurang sebanyak 3 (tiga) sekolah, hal ini dikarenakan adanya regrouping yaitu SD Lerep Kecamatan Ungaran Barat, SD Tukang Kecamatan Pabelan, dan SD Bringin 4 Kecamatan Bringin.

b. SMP/MTs

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Data Pokok SMP/ MTs Tahun 2005-2010**

NO	KETERANGAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Sekolah	139	139	140	145	142	143
2	Siswa Baru Tk. I	13.792	13.756	13.566	13.476	13.762	13.647
3	Siswa	40.433	39.089	40.408	41.012	42.360	40.689
4	Lulusan	11.858	11.789	11.621	11.618	11.047	11.186
5	Ruang Kelas:	1.064	1.053	1.085	1.139	1.213	1.236
	Balk	619	917	946	994	1.062	1.077
	Ringan	104	107	104	122	125	133
	Berat	341	29	35	23	26	26
6	Kelas	1.005	1.053	1.085	1.139	1.213	1.279

NO	KETERANGAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
7	Guru:	2.384	2.531	2.420	2.416	2.484	2.562
	Layak mengajar (D3, S1)	1.991	2.006	1.242	1.540	2.269	2.345
	Semi layak (SPG,PGA D1,D2)	152	260	1.131	515	283	135
	Tidak Layak (SMA, SMK)	241	265	47	361	95	82
8	Fasilitas:						
	Perpustakaan	93	95	102	149	179	180
	Lapangan	110	122	120	120	128	129
	UKS	79	78	95	120	102	103
	Laboratorium	79	69	79	88	230	231

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Jumlah sekolah SMP/MTs pada tahun 2009 ke tahun 2010 berkurang sebanyak 2 (dua) sekolah, hal ini dikarenakan adanya penutupan sekolah swasta yaitu SMP Muhammadiyah Pringapus dan MTs Kesongo Tuntang.

### c. SMA/SMK/MA

**Tabel 2.29**  
**Perkembangan Data Pokok SMA/ SMK/ MA Tahun 2005-2010**

NO	KETERANGAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Sekolah	54	54	55	57	62	61
2	Siswa Baru Tk. I	6.118	6.516	6.996	6.940	7.398	7.583
3	Siswa	17.161	18.085	18.962	19.378	20.397	21.752
4	Lulusan	5.065	4.241	5.034	4.571	5.459	6.053
5	Ruang Kelas:	551	555	594	620	617	756
	Baik	521	521	540	554	581	700
	Ringan	26	34	34	57	31	48
	Berat	4	0	20	9	5	8
6	Kelas	510	555	594	620	617	703
7	Guru:	1.338	1.384	1.331	1.470	1.603	1.648
	Layak mengajar (D3, S1)	1.121	1.171	1.147	1.292	1.456	1.540
	Semi layak (SPG,PGA D1,D2)	163	160	143	130	116	108
	Tidak Layak (SMA, SMK)	54	53	41	48	31	0
8	Fasilitas						
	a. Perpustakaan	38	38	34	38	48	61
	b. UKS	51	45	48	48	48	44
	c. Lap. O R	38	38	34	43	55	68
	d. Laboratorium	51	51	90	95	141	152
	e. Ketrampilan	8	8	8	9	9	16
	f. BP	32	35	38	36	42	45
	g. Serbaguna	11	11	18	19	21	27
	h. Bengkel	10	10	18	18	20	15
	i. Ruang Praktik	24	24	32	33	34	33

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Jumlah sekolah SMA/ SMK/ MA pada tahun 2009 ke tahun 2010 berkurang sebanyak 1 (satu) sekolah, hal ini dikarenakan adanya penutupan sekolah swasta yaitu SMK Wirausaha Bandungan.

#### 4) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

Berdasarkan capaian pada indikator kinerja kunci yang ditetapkan, kinerja Dinas Pendidikan tahun 2005-2010 dalam peningkatan mutu dan daya saing pendidikan secara umum cukup baik. Capaian tersebut di atas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut ini :

**Tabel 2.30**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan**

No	Indikator Kunci Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Rata-Rata Nilai UASBN SD	6,86	6,95	7,005	7,005	7,020	7,10
2.	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	5,98	6,16	6,07	5,74	6,11	6,24
3.	Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA	5,98	5,93	5,87	6,61	6,99	6,45
5.	Guru bersertifikat pendidik	0	96	792	1.712	2.498	2.543
6.	Sekolah bertaraf atau dirintis utk bertaraf Internasional	0	0	2	3	4	4

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa ada peningkatan rata-rata nilai UASBN tingkat SD, nilai UN tingkat SMP/MTs. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA mengalami penurunan pada Tahun 2010.

Selain itu keberhasilan yang diraih terkait peningkatan mutu dan daya saing pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Program Depdiknas mulai awal tahun 2008 telah membangun jejaring pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Jardiknas), baik untuk mendukung e-pembelajaran maupun e-administrasi. Semua jenjang sekolah baik swasta maupun negeri telah dapat melakukan koneksi Jardiknas.
- b. Semua SMA dan SMK serta 70% SMALB memiliki laboratorium lengkap termasuk laboratorium multimedia yang tersambung ke internet dan menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- c. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan non formal dimana ditunjukkan dengan prestasi pendidikan non formal di tingkat Propinsi maupun Nasional. Selain itu Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) seperti lembaga kursus, lembaga PAUD, lembaga PKBM, lembaga Taman Bacaan Masyarakat (TBM), program life skill (Kursus Wirausaha Desa/Kursus Wirausaha Kota) serta lembaga penyelenggaran program kesetaraan dan keaksaraan bisa menjadi pendidikan alternatif bagi kalangan masyarakat yang belum mampu menikmati pendidikan formal.
- d. Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikat mengajar dimana sampai dengan tahun 2010 sebanyak 2.543 orang.
- e. Sampai dengan tahun 2010 jumlah sekolah yang memenuhi Standard Sekolah Nasional (SSN) untuk jenjang SD/MI jumlah sekolah yang sebanyak 15 sekolah, SMP sebanyak 13 sekolah dan untuk jenjang SMA terdapat 8 sekolah berkategori mandiri (SKM). Sedangkan untuk kategori sekolah Rintisan Sekolah Berstandar

Internasional (RSBI) untuk jenjang SMP 1 sekolah, SMA 2 sekolah dan SMK 1 sekolah

## **2. Urusan Wajib Kesehatan**

Dalam rangka menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, serta mengupayakan terlaksananya pelayanan prima pada institusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang didukung 4 Rumah Sakit Umum (2 RSUD dan 2 RSU Swasta), 26 Puskesmas (12 Puskesmas Rawat Inap dan 14 Puskesmas Rawat Jalan), 68 Puskesmas Pembantu, dan 45 Unit Puskesmas Keliling, 152 Pos Kesehatan Desa, 25 Poliklinik Desa. Disamping itu tercakup pula 67 Balai Pengobatan, 11 Rumah Bersalin, 57 Apotik, 1 buah industri obat tradisional, 4 buah industri kecil obat tradisional, 1.612 Posyandu.

Sumberdaya manusia untuk mendukung pelayanan dalam sektor kesehatan di Kabupaten Semarang terdiri dari 192 Dokter Umum, 30 Dokter Spesialis, 44 Dokter Gigi, 499 Perawat, 372 Bidan, 42 perawat gigi, 63 apoteker, 69 asisten apoteker, 40 Ahli Kesehatan Masyarakat, 30 Sanitarian, 36 Ahli Gizi, 5 Keterampilan fisik, 72 Keteknisian Medik.

### **a. Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar**

Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Capaian kinerja pelayanan kesehatan dasar dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.31 berikut :

**Tabel 2.31**  
**apaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Dasar**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	INDIKATOR	REALISASI					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kunjungan Bumil K4	70,26%	81,96%	87,75%	87,83%	90,10%	90,70%
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	97,25%	46,31%	74,30%	100%	100%
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	71,25%	82,47%	95,78%	89,67%	93,1%	92,9%
4	Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	98,18%	81,84%	80,24%	95,11%	93,75%	100%
5	Cakupan kunjungan bayi	94,73%	133,42%	131,81 %	99,17%	97,96%	100,84%
6	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	62,13%	75,32%	85,11%	90,21%	97,02%	100%
7	Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	52,47%	100%	65,75%	49,51%	15,00%	100%
8	Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan GAKIN dan masyarakat rentan (yang mendapat pelayanan)	24,25%	32,72%	21,79%	27,00%	30,82%	31,03% pelayanan (100% kepesertaan)
9	Persentase cakupan rawat jalan (jumlah dengan Puskesmas)	28,83%	32,06%	27,57%	31,1%	40,00%	26,58%
10	Persentase cakupan rawat inap (jumlah dengan puskesmas)	0,42%	0,52%	0,62%	3,06%	3,00%	0,62%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Kunjungan K4 ibu hamil sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 selalu meningkat, akan tetapi belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2005, kunjungan K4 baru mencapai 70,26% dan pada tahun 2010 baru mencapai 90,70% dari target 95%, sehingga masih harus lebih ditingkatkan lagi melalui

peningkatan jumlah serta kompetensi bidan di desa serta peningkatan kesadaran ibu hamil melalui penyuluhan oleh bidan desa tersebut.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani selama 2005 sampai dengan 2010 terjadi fluktuasi. Hal ini disebabkan tahun 2006 dan 2007 belum ada kegiatan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi, sehingga banyak ibu hamil terlambat ditangani, dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kematian ibu bersalin. Deteksi dini ibu hamil mulai dilaksanakan intensif tahun 2008 dan menghasilkan kinerja yang optimal sampai tahun 2010 mencapai 100 %. Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan yang terus menerus dan penambahan bidan desa.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 juga mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan program stiker Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) belum berjalan dengan baik, masih ada ibu hamil yang rumahnya tidak mau ditempel stiker P4K, sehingga kunjungan dan penanganan ibu hamil dengan resiko tinggi tidak optimal bahkan masih ada yang memilih melahirkan di dukun bayi.

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 telah mencapai target yang ditetapkan walaupun pada tahun tertentu sedikit menurun.

Cakupan kunjungan bayi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 90%. Hal ini kemungkinan adanya kunjungan bayi dari luar daerah yang diperiksa di wilayah Kabupaten Semarang.



Pada tahun 2005, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 62,13% meningkat menjadi 100% pada tahun 2010 (235 desa UCI). Pencapaian target 100% ini dikarenakan gencarnya kegiatan sweeping Imunisasi dan bimbingan kepada petugas imunisasi, bidan desa maupun masyarakat

Capaian pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) anak usia 6-24 bulan keluarga miskin tahun 2010 meningkat signifikan menjadi 100% dikarenakan mendapat dropping dari Kemenkes RI.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi program nasional di seluruh Indonesia yang dilayani melalui Program JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Sebelumnya program ini bernama program Askeskin dan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM). Dari evaluasi pelaksanaan, jumlah masyarakat miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan pemerintah sebesar 20-35% dari total peserta jamkesmas. Sedangkan cakupan kepesertaannya 100% (Masyarakat miskin yang terdata sebagai peserta jamkesmas sama dengan jumlah kuotanya).

Untuk cakupan rawat jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) maupun di Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit) Kabupaten Semarang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan trend kenaikan walaupun berfluktuasi. Persentase cakupan rawat jalan di Kabupaten Semarang sudah di atas target nasional. Angka cakupan rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan dasar tahun 2010 sebesar 26,58 %, sudah melampaui target minimal 15 %. Trend kenaikan cakupan rawat jalan disebabkan antara lain :

- Adanya program pengobatan gratis untuk rawat jalan di puskesmas bagi penduduk Kabupaten Semarang sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008;
- Adanya program jamkesmas dan jamkesda.

Cakupan rawat inap di Puskesmas menunjukkan trend kenaikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Kenaikan tersebut disebabkan jumlah puskesmas yang melayani rawat inap bertambah, dan lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal pasien sehingga menghemat biaya transportasi. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2009 dari 3 % menjadi sebesar 0,62% dan masih dibawah target yaitu 1,5%. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang berubah, lebih memilih pelayanan rawat inap di rumah sakit daripada di puskesmas.

#### **b. Derajat Kesehatan**

Derajat kesehatan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya. Dengan indikator sebagai berikut :

##### **1) Mortalitas (Angka Kematian)**

Jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.32**  
**Realisasi Indikator Kinerja Mortalitas**

NO	INDIKATOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 rb kh	114,98	126,63	125,37	114,61	125,66	101,92
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kh	10,19	8,3	8,2	8,16	8,17	10,46
3	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kh	11,8	8,72	13,59	11	5,83	11,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Angka Kematian Ibu (AKI) sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 berdasarkan target rata-rata menurun sebesar 7,15%. Akan tetapi realisasi tahun 2006 terjadi peningkatan AKI yang disebabkan terjadi peningkatan kasus eklampsia pada ibu bersalin, dan adanya risiko tinggi ibu hamil seperti TB paru, jantung dan hipertensi. Peningkatan AKI tahun 2009 dibanding tahun 2008 dikarenakan adanya 18 kasus kematian ibu bersalin. Penyebab kematian tertinggi adalah perdarahan, disusul dengan eklampsia. Selain itu adanya penyakit penyerta kronik pada 5 (lima) orang ibu hamil, yaitu 1 (satu) orang menderita tumor otak dan 4 (empat) orang menderita penyakit jantung. Hal ini meningkatkan kefatalan ibu bersalin. Tahun 2010, Angka Kematian Ibu mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 101,92 per 100.000 kelahiran hidup dibanding tahun 2009, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kegiatan fasilitasi bidan desa ke ibu hamil sehingga mampu menekan resiko kematian pada ibu hamil.

Angka Kematian Bayi (AKB), sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 selalu menurun. Dari 10,19 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 8,16. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 2,29 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 10,46 dibanding tahun 2009 sebesar 8,17. Penyebab utama kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia (kekurangan oksigen), untuk itu perlu adanya pelatihan manajemen BBLR dan asfiksia untuk bidan.

Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2007 terjadi peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2006, dari 8,72 per

1.000 kelahiran hidup menjadi 13,59. Hal ini disebabkan karena adanya kasus diare yang dibarengi dengan Bawah Garis Merah (BGM), meningitis, bronkopneumoni dan jantung. Angka Kematian Balita kemudian turun pada tahun 2008 menjadi 11 dan 5,83 tahun 2009. Sedang tahun 2010 AKABA mengalami peningkatan sangat drastis menjadi sebesar 11,96 per 1000 kelahiran hidup yang disebabkan karena penyakit menular, yaitu 2 balita Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Dengue Shock Syndrom (DSS), 20 balita lainnya meninggal karena penyakit tidak menular seperti kanker limfe, kecelakaan lalu lintas, kejang demam, keracunan, leukimia dan meningitis.

Untuk mempercepat penurunan AKI, AKB dan AKABA diperlukan adanya kerjasama lintas sektor terkait dan peningkatan kemampuan bidan melalui pembinaan dan pelatihan ketrampilan diantaranya pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal). Sampai dengan tahun 2010 bidan yang dilatih APN baru 16 bidan dari 292 bidan di 26 puskesmas (5,48%) dan masih banyak bidan yang berpendidikan D1 Kebidanan, sehingga perlu adanya peningkatan SDM bidan dengan jenjang pendidikan minimal D3 kebidanan.

## 2) Morbiditas (Angka Kesakitan)

Jumlah angka kesakitan di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.33**  
**Capaian Kinerja Morbiditas Tahun 2005-2010**

NO	INDIKATOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100 rb penduduk	1.82	0,001	1.8	1.5	2.6	2,6
2	Penemuan penderita pneumonia bakta	28.34%	16.31%	20.68%	15.44%	27.75%	15,5%
3	Cakupan penemuan pasien Baru TB BTA Positif	18.03%	16.31%	20.68%	15.44%	22.17%	25,48%
4	Persentase kesembuhan penderita TBC BTA + (CDR/Cure Rate)	82.83%	91.14%	99.77%	93.6%	95%	89%
5	Cakupan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Incident Rate DBD per 10.000 penduduk	1,7	4,75	9,3	3,16	3,8	5,7
7	Persentase CFR / Angka kematian DBD	3,29 %	1,2%	0,6%	0%	0,56 %	1,14%
8	Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Target Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk sebesar  $\geq 1$ . Tahun 2006 mengalami penurunan dibawah 1, yakni berada pada angka 0,001. Hal ini disebabkan karena kurang aktifnya kegiatan surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menemukan kasus/penderita AFP. Solusinya telah dilaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada petugas surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas, dengan hasil positif yaitu tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010, AFP rate sudah melebihi target.

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 masih jauh dari target standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan definisi operasional angka cakupan tersebut adalah angka estimasi dari yang seharusnya ditemukan, sehingga angka yang muncul kecil sekali. Beberapa permasalahan yang turut berpengaruh terhadap rendahnya capaian tersebut adalah :

- Belum digunakannya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam pemeriksaan balita;
- Kurangnya sarana prasarana MTBS termasuk tidak ada ruang khusus di puskesmas;
- Banyak penderita pneumonia tidak diketahui oleh ibu/pengasuhnya.

Pencapaian angka penemuan penderita Tuberculose Bassil Tahan Asam (TB BTA) positif selalu berada di bawah target nasional (70%). Beberapa faktor penyebab diantaranya adalah kurangnya tenaga laboratorium puskesmas yang terlatih dan kurang kuatnya komitmen Pengawasan Minum Obat Tuberkulose oleh anggota keluarga, masyarakat dan petugas kesehatan, serta adanya anggapan dari masyarakat bahwa pengidap penyakit TB itu adalah aib keluarga sehingga mereka berusaha menyembunyikan anggota keluarga yang diduga menderita TB.

Pelayanan dan tata laksana pengobatan kepada pasien TBC di Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pengobatan nasional. Terbukti angka kesembuhan penderita lima tahun terakhir sudah melebihi target

yang ditentukan sebesar 85%. Walaupun untuk tahun 2010 angka kesembuhan TB BTA+ sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2009, dikarenakan adanya penderita TB yang pindah, mati dan drop out. Keberhasilan tersebut antara lain karena ditunjang adanya bantuan transport bagi penderita TB untuk datang mengambil obat di puskesmas sehingga penderita tidak pernah terlambat untuk minum obat TBC.

Cakupan penderita DBD yang ditangani, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sudah mencapai angka 100% sesuai target yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa seluruh penderita DBD dapat ditangani oleh institusi kesehatan yang ada di Kabupaten Semarang, baik Rumah Sakit, Balai Pengobatan maupun Puskesmas.

Target Incident Rate (IR) DBD adalah <2 per 10.000 penduduk. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan capaian IR DBD belum memenuhi target. Keberhasilan upaya memberantas DBD sangat tergantung dengan kesadaran masyarakat dalam melakukan gerakan 3M. Selain itu, di tahun 2010 terjadi musim penghujan yang berkepanjangan sehingga kepadatan nyamuk meningkat dan berpotensi menularkan penyakit DBD.

Target Persentase Case Fatality Rate (CFR)/angka kematian DBD sebesar <1%. Sampai dengan tahun 2009 telah berhasil di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,56%. Namun di tahun 2010, terjadi peningkatan angka kematian DBD melebihi target. Hal ini disebabkan masih

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala DBD dan keterlambatan penanganan (rujukan) karena tanda dan gejala tidak khas. Upaya pencegahan terus dilaksanakan baik promotif berupa penyuluhan 3M maupun preventif dengan pemantauan jentik oleh kader Jumantik di tiap desa.

Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Semarang di tahun 2010 terjadi di 20 desa di 14 Kecamatan dan semuanya (100%) telah ditangani kurang dari 24 jam sesuai standar operasional prosedur.

### 3) Status Gizi (Keadaan Gizi)

Proyeksi dan capaian indikator kinerja hasil pemantauan status gizi periode 2005-2010 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.34**  
**Capaian Kinerja Status Gizi 2005-2010**

NO	INDIKATOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Balita Gizi Kurang	10,60%	11,58%	11,59%	11,58%	3,72%	3,47%
2	Balita Gizi Buruk	1,39%	1,30%	1,12%	0,20%	0,14%	0,06%
3	Balita Gizi Buruk ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Balita Gizi Baik	86,46%	85,41%	84,68%	84,59%	92,04%	93,13%
5	Balita Gizi Lebih	1,66%	1,58%	2,1%	1,96%	4,1%	3,33%
6	Prevalensi BBLR ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Balita gizi kurang pada tahun 2005 sebesar 10,60%, meningkat pada tahun 2008 menjadi 11,58%. Kenaikan ini dikarenakan sejak tahun 2006 dilakukan intervensi pada anak gizi buruk berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan, sehingga balita yang semula berstatus gizi buruk meningkat ke status gizi kurang. Hal ini dapat dilihat dari data gizi buruk yang



selalu turun angkanya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

Pada balita gizi buruk, sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 angkanya selalu turun, baik dibandingkan dengan target maupun capalannya. Dari data tersebut terlihat penanganan balita gizi buruk setiap tahun selalu mencapai target yang ditetapkan.

Balita gizi baik dari tahun 2005 sampai dengan 2010 mengalami pasang surut. Penurunan angka balita gizi baik dari tahun 2006 sampai dengan 2008 disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terutama ibu balita dalam kegiatan penimbangan balitanya. Sehingga banyak ibu balita yang tidak mendapat penyuluhan kesehatan dan gizi, akibatnya balita tidak mendapatkan asupan gizi cukup yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Disamping itu, dengan bertambahnya pabrik di Kabupaten Semarang maka semakin banyak ibu yang bekerja sehingga mempengaruhi pola asuh pada balita.

#### **4) Peningkatan dan Pengembangan Mutu Obat**

Indikator kinerja di bidang kefarmasian hampir semuanya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun sampai akhir tahun 2010 masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum memenuhi target yaitu ketersediaan obat sesuai kebutuhan dan cakupan penulisan resep obat generik. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja mutu obat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.35**  
**Capaian Kinerja Indikator Mutu Obat Tahun 2005-2010**

NO	INDIKATOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Cakupan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	45,45%	83,33%	84,49%	84,68%	90%	90%
2	Cakupan pengadaan obat esensial	95,29%	85,66%	100%	100%	105%	100%
3	Cakupan pengadaan obat generik	78,65%	86,62%	100%	100%	103%	100%
4	Cakupan ketersediaan obat narkotik, psiko tropik sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	100%	100%	84,49%	100%	116%	100%
5	Cakupan penulisan resep obat generik	60,22%	Tidak ada data	88,86%	89,83%	98%	94,41%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Tidak terpenuhinya cakupan ketersediaan obat sesuai kebutuhan disebabkan sebagian besar obat adalah dropping dari Provinsi maupun Pusat, sehingga terkadang obat yang diperoleh dari provinsi/pusat tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang diajukan, selain itu bervariasi jenis obat yang dibutuhkan oleh Puskesmas membuat sulitnya pemenuhan obat.

Cakupan pengadaan obat esensial dan obat generik pada tahun 2006 belum memenuhi target dan realisasinya menurun dari tahun sebelumnya, disebabkan pengadaan obat mengacu pada permintaan puskesmas tanpa mempertimbangkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Baru mulai tahun 2007 pelaksanaan pengadaan obat mengacu pada DOEN sehingga selalu mencapai target.

Sedangkan cakupan penulisan resep obat generik belum mencapai target 100 % walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan masih ada beberapa obat paten di dalam pelayanan kesehatan dasar, karena tidak tersedianya obat generik sesuai dengan anjuran pemerintah.

## 5) Perilaku Sehat, Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dimulai dari tingkat individu dan keluarga melalui perilaku yang bersih dan sehat. Perilaku sehat masyarakat dapat dilihat dari perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Capaian kinerja perilaku sehat, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.36**  
**Capaian Indikator Kinerja Perilaku Sehat Masyarakat**  
**Tahun 2005-2010**

No	INDIKATOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penyuluhan P3 NAPZA	3,43%	5,00%	18,08%	21,85%	26,45%	28,19%
2	Angka Bebas Jentik	83,66%	91,98%	91,3%	93,07%	94,00%	94,17%
3	Cakupan Jamban	63,39%	66,96%	60,39%	72,56%	82,7%	83,17%
4	Cakupan air bersih	61,16%	56,6%	75,25%	84,33%	87,26%	88,01%
5	Cakupan pengawasan sanitasi TTU	20,24%	21,23%	65,36%	71,48%	78,32%	80,4%
6	Rumah Sehat	55,62%	60,94%	69,73%	72,19%	73,21%	75,03%
7	HIV Ditangani	100% (10 kasus)	100% (16 kasus)	100% (43 kasus)	100% (26 kasus)	100% (24 kasus)	100% (33 kasus)
8	Desa Siaga	0 (0%)	1 (0,42%)	52 (22,12%)	185 (78,7%)	235 (100%)	235 (100%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Angka cakupan upaya penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (P3 NAPZA) oleh petugas kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meskipun tahun 2005 dan 2006 angka tersebut belum memenuhi target yaitu sebesar 10%. Hal tersebut disebabkan :

- 1) Kurangnya kesadaran petugas kesehatan tentang bahaya NAPZA;

- 2) Belum adanya kesamaan persepsi para petugas kesehatan bahwa penyuluhan Napza tidak hanya tentang narkoba dan psikotropika (heroin, morfin, ganja, diazepam, ekstasi dll), tetapi juga tentang zat-zat adiktif yang bahkan lebih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rokok, kopi, minuman keras.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan bahaya Napza.

Peningkatan angka bebas jentik dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan menurunnya kasus DBD. Hal ini disebabkan pelaksanaan pemantauan bebas jentik hanya pada wilayah-wilayah tertentu dengan frekuensi tidak teratur tiap bulannya dan dilakukan hanya 2 kali dalam setahun. Idealnya pemantauan dilakukan 2 kali tiap bulannya.

Target cakupan jamban setiap tahun tidak sama dan selalu naik. Capaian kinerja dari tahun 2005 sampai dengan 2010 mengalami fluktuasi, namun tidak semua mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2007 cakupan jamban mencapai 60,39%, mengalami penurunan sebesar 6,57% dibanding tahun 2006 dan tidak memenuhi target (66 %). Hal ini disebabkan kegiatan pembangunan sarana sanitasi masyarakat tahun 2007 lebih terfokus kepada kegiatan pemenuhan air bersih, karena cakupan air bersih tahun 2006 masih rendah. Banyak desa-desa mengalokasikan anggaran untuk sarana air bersih, meliputi wilayah Kecamatan Kaliwungu, Bancak, Bringin, Sumowono dan Suruh. Hal tersebut menyebabkan kenaikan cakupan air bersih,

sedangkan kegiatan pembangunan fisik jamban keluarga agak terabaikan. Sebab lain adalah kegiatan pemeriksaan rumah pada tahun 2007 lebih banyak ke daerah-daerah kantong/desa-desa miskin sehingga jumlah pemilik jamban keluarga yang dijumpai lebih sedikit, meskipun jumlah rumah yang diperiksa lebih banyak dibandingkan pemeriksaan di tahun 2006. Cakupan jamban tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 masing-masing mengalami peningkatan, namun tahun 2008 dan 2010 belum memenuhi target yaitu (74%) dan (90%). Sedangkan tahun 2009 mampu memenuhi target (82%). Peningkatan cakupan jamban dikarenakan adanya kegiatan BHBK/bantuan keuangan kepada 5 desa yang digunakan untuk pembangunan jamban keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Adanya program PAMSIMAS memberikan kontribusi terhadap naiknya cakupan air bersih tahun 2007 sampai dengan 2010. Akan tetapi capaian cakupan air bersih masih belum memenuhi target. Hal ini berkaitan erat dengan beberapa hal sebagai berikut :

- Keadaan geografi, wilayah Kabupaten Semarang mempunyai beberapa daerah yang karena keadaan geografinya sulit mendapatkan air bersih, seperti di Kecamatan Bringin, Bancak, Susukan, Kaliwungu, Desa Dadapayam Kec.Suruh, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat memanfaatkan air permukaan, air hujan, dan lain-lain.
- Kondisi ekonomi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

- Kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih masih kurang.
- Perkembangan penduduk tidak sebanding dengan bertambahannya sarana air bersih yang ada.

Cakupan pengawasan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan tiap tahunnya, berturut-turut sebesar 20,24%; 21,23%; 65,36%; 71,48%, 78,32% dan 80,4%. Pada tahun 2010 mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Cakupan rumah sehat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan tiap tahunnya, berturut-turut sebesar 55,62%; 60,94%; 69,73%; 72,19%, 73,21%, 75,03%. Hanya pada tahun 2006 belum bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Kasus penderita HIV/AIDS di Kabupaten Semarang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 secara kumulatif sebanyak 152 kasus dan semuanya sudah ditangani 100% sesuai dengan standar operasional. Capaian kinerja tersebut karena di Kabupaten Semarang telah tersedia layanan klinik *Voluntary Counseling and Testing (VCT)* dan *Care Support and Treatment (CST)*, sehingga setiap kasus HIV positif bisa segera mendapatkan penanganan, dukungan dan penyediaan obat Anti Retroviral (ARV) di Rumah Sakit untuk memudahkan klien HIV positif mengambil ARV.

## 6) Pelayanan Rujukan Kesehatan Masyarakat.

Pelayanan rujukan kesehatan masyarakat di Kabupaten Semarang dilayani oleh RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa. Capaian kinerja pelayanan RSUD Ungaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.37**  
**Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Ungaran**  
**Tahun 2005-2010**

NO	INDIKATOR	SAT	Capaian					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	<b>Rawat Jalan (termasuk IGD)</b>							
	Baru	pasien	22.351	24.986	26.241	27.853	28.268	30.306
	Lama	pasien	24.799	27.033	28.889	29.845	27.402	30.724
	<b>Jumlah</b>		<b>47.150</b>	<b>52.019</b>	<b>55.130</b>	<b>57.698</b>	<b>55.670</b>	<b>61.030</b>
	Rujuk				126	127	270	279
2	<b>Rawat Inap (termasuk ODC)</b>							
	Jml Penderita	pasien	8.741	9.750	9.653	10.238	11.377	12.556
	Rujuk	pasien	164	195	177	182	213	149
	Meninggal <48 Jam	pasien	53	56	62	72	81	157
	Meninggal >48 Jam	pasien	53	58	38	53	70	92
	Hari Perawatan		33488	39.362	39.270	40.322	42.119	47.230
	BOR ( % )	Persen	65,5	77,0	77	79	72	73,5
	LOS	hari	3,9	4,0	4	4	4	3,8
	BTO	kali	62,4	70,9	69	73	69	71,2
	TOI	hari	2	1,2	1	1	2	1,3
3	<b>ODC</b>							
	Jml Penderita	pasien	-	-	-	-	424	342
	Rujuk	pasien	-	-	-	-	1	1
	Meninggal <48 Jam	pasien	-	-	-	-	7	1
	Meninggal >48 Jam	pasien	-	-	-	-	-	-
	Hari Perawatan		-	-	-	-	935	619
	BOR ( % )	persen	-	-	-	-	51,5	42,4
	LOS	hari	-	-	-	-	2,5	2,0
	BTO	kali	-	-	-	-	85,8	85,0
	TOI	hari	-	-	-	-	3,8	2,5
4	<b>Radiologi</b>							
	Kunjungan	kunj	5387	5220	5692	6154	6.626	6.412
	Pemeriksaan	pmerks	5.852	5.499	6.145	6.677	7.003	7.045

NO	INDIKATOR	SAT	Periode 2005-2010					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
5	Laboratorium							
	Kunjungan	kunj	-	-	-	-	19.957	35.679
	Pemeriksaan	pmerks	92.949	51.924	59.749	67.564	71.489	88.812
6	Instalasi Farmasi							
	Jml Resep masuk	resep	58.618	76.475	71.725	93.889	121.037	131.120
7	IGD							
	Pulang/Rawat Jalan	pasien	5.260	6.324	8325	8.607	8.482	9.737
	Operasi	pasien	5.631	6.244	5.930	6.398	7.492	8.417
	Rujuk	pasien	424	666	860	637	349	359
	Meninggal	pasien	106	77	109	120	137	122
	<b>JUMLAH</b>		<b>11.421</b>	<b>13.314</b>	<b>15.218</b>	<b>18.762</b>	<b>18.460</b>	
8	Operasi							
	Bedah	kasus	520	499	473	645	764	875
	Obgyn	kasus	328	377	295	360	329	309
	THT	kasus	38	50	48	39	31	51
	Mata	kasus	79	99	59	59	39	73
	KUK Kelenjir	kasus	14	18	20	34	18	47
	<b>JUMLAH</b>		<b>977</b>	<b>1.043</b>	<b>895</b>	<b>1.137</b>	<b>1.181</b>	<b>1.355</b>
9	Persalinan	pasien	799	864	770	807	882	741

Sumber : RSUD Ungaran Kabupaten Semarang

Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Ungaran untuk pasien baru selama periode 2005-2010 mengalami kenaikan rata-rata 6,33%. Sedangkan untuk pasien lama juga mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2009 mengalami penurunan disebabkan:

- Pelayanan Poli Syaraf dan Poli Kulit kosong selama  $\pm$  6 bulan karena dokter spesialis pindah sebagai staf pengajar di RS Dr Kariadi; dan
- Perbaikan sarana fisik Rawat Jalan.

Jumlah pasien rawat inap periode 2005-2010 mengalami kenaikan rata-rata 7,62%. Kenaikan jumlah pasien disebabkan oleh :

- Penambahan jumlah tempat tidur untuk kelas III;
- Meminimalisir rujukan pasien ketingkat lebih lanjut;



- Perbaikan sarana dan prasarana di ruang;
- Peningkatan mutu layanan medis dan Keperawatan.

Pelayanan rawat inap satu hari (One Day Care) merupakan layanan baru, dan dibuka tahun 2009. Layanan ini juga menerima Askes PNS, maupun Jamkesmas.

Sedangkan capaian kinerja pelayanan RSUD Ambarawa adalah sebagai berikut

**Tabel 2.38**  
**Indikator Pelayanan RSUD Ambarawa Tahun 2005-2010**

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	<b>JUMLAH PASIEN</b>						
<b>1</b>	<b>RAWAT JALAN</b>	108.887	122.940	130.253	136.436	106.945	151.161
	*. IGD	12.228	11.392	12.411	13.124	10.742	14.015
	*. Poliklinik Spesialis	39.001	50.875	44.935	57.509	47.418	57.806
	*. Poliklinik Umum	1.099	1.130	1.094	949	328	687
	*. Poliklinik Gigi Umum	1.355	1.581	2.126	2.335	1.725	2.327
	*. Pemeriksaan Laborat	50.095	50.968	63.855	56.374	41.647	70.339
	*. Pemeriksaan Radiologi	5.109	6.994	5.832	6.145	5.085	6.311
<b>2</b>	<b>RAWAT INAP</b>						
	*. Jumlah Pasien Rawat Inap	10.301	12.473	11.129	13.636	11.931	13.464
	*. Jumlah Hari Rawat	46.729	59.808	64.260	60.902	46.106	53.587
	*. BOR	77,5	88,0	84,7	85	70,4	67,4
	*. LOS	5,1	4,5	4,7	4,7	5,0	4,9
	*. TOI	1,3	0,84	1,05	1,0	1,4	2
	*. BTO	59,4	58,0	51,7	54	51	59,8
	*. GDR	34,6	35,3	30,83	31,2	34,76	32,29
	*. NDR	17,2	19,2	16,81	12,4	16,8	18,03

Sumber : RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang

Jumlah Pasien Rawat Jalan dan rawat inap di RSUD Ambarawa secara umum mengalami peningkatan sebesar rata-rata 8,67% dan 6,63% per tahun. Pada tahun 2009 mengalami penurunan dikarenakan adanya kenaikan tarif pelayanan.

Disamping kenaikan tarif yang mulai berlaku bulan Desember 2008, juga dikarenakan adanya pelayanan kesehatan gratis di PUSKESMAS.

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Tolok ukur urusan pekerjaan umum, adalah kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi. Infrastruktur dan sarana prasarana belum mampu mendorong potensi ekonomi lokal yang terkandung dalam slogan INTANPARI (INDUSTRI, perTANian, dan PARIwisata) secara optimal. Dari kondisi awal tahun 2005, infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Kabupaten Semarang menuntut perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas untuk mendukung sektor strategis tersebut. Sedangkan prasarana pengairan, berfungsi strategis dalam mendorong produktifitas pertanian sebagai salah satu sektor unggulan. Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dapat terlihat pada:

1. Perkembangan jumlah/panjang dan kondisi jalan untuk Tahun 2005-2010 yang ditunjukkan Tabel 2.39 berikut:

**Tabel 2.39**  
**Jumlah/Panjang Jalan dan Kondisi Jalan**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	Sat	Kondisi Awal (2005)	CAPAIAN				
				2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah/Panjang Jalan							
	A. Jalan Nasional	Km	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65
	B. Jalan Provinsi	Km	83,65	83,65	83,65	83,65	83,65	83,65
	C. Jalan Kabupaten	Km	733,62	733,62	733,62	733,62	733,62	733,62
	Jumlah	Km	869,92	869,92	869,92	869,92	869,92	869,92
2	Kelas Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Perkotaan							
	A. Kelas I	Km	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65
	B. Kelas II	Km	83,65	83,65	83,65	83,65	83,65	83,65
	C. Kelas III.A	Km	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51
	D. Kelas III.B	Km	644,16	644,16	644,16	644,16	644,16	644,16

No	URAIAN	Sat	Kondisi Awal (2005)	Tahun				
				2006	2007	2008	2009	2010
	E. Kelas III.C	Km	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46
	Jumlah	Km	869,92	869,92	869,92	869,92	869,92	869,92
3	Kondisi Jalan Kabupaten							
	A. Aspal Baik	Km	358,00	364,15	352,75	363,50	360,00	210,48
	B. Aspal Sedang	Km	196,46	190,20	189,46	184,46	175,46	226,32
	C. Aspal Rusak Ringan	Km	62,00	69,32	70,25	70,00	84,70	164,99
	D. Aspal Rusak Berat	Km	73,21	72,50	79,71	74,21	72,61	131,83
	E. Jalan Kerikil	Km	0	0	0	0	0	0
	E. Jalan Batu	Km	33,45	30,95	37,45	37,45	41,45	0
	F. Jalan Tanah	Km	10,50	6,50	4,00	4,00	0	0
	Jumlah	Km	733,62	733,62	733,62	733,62	733,62	733,62

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel di atas jumlah/panjang jalan dengan status jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dari tahun 2005 sampai dengan 2010 masih tetap. Hal ini karena penetapan status jalan terkait dengan aspek hukum, administrasi, kewenangan dan pertanahan. Program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan serta mempertahankan kondisi jalan baik. Kondisi jalan kabupaten secara umum terjaga, jalan dengan kondisi aspal baik tahun 2010 sepanjang 210,48 km atau 28,69% dari panjang jalan kabupaten 733,62 km.

Pada tahun 2010 jalan batu dimasukkan pada kondisi jalan Aspal Rusak Berat. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya penurunan adalah :

- Kondisi ekstrim berupa curah hujan tinggi selama tahun 2010, kondisi ini menyebabkan badan jalan pada tanah lempung (geologi labil) mudah amblas akibat lalu lintas.
- Bencana alam, berupa tanah longsor dan banjir.
- Aktifitas pembangunan di masyarakat yang meningkat dengan menggunakan mobilitas (truck pembawa material) yang melebihi beban.

2. Perkembangan jumlah dan panjang jembatan Tahun 2005-2010 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.40 berikut :

**Tabel 2.40**  
**Jumlah/Panjang Jembatan**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	KONDISI AWAL 2005	CAPAIAN				
				2006	2007	2008	2009	2010
1	Jenis Jembatan							
	a. beton	Buah	253,00	257,00	266,00	274,00	280,00	280,00
	b. besi	Buah	72,00	68,00	65,00	57,00	51,00	51,00
	c. kayu	Buah	11,00	11,00	8,00	6,00	6,00	6,00
	Jumlah	Buah	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
2	Parjang Jembatan							
	a. beton	m	1.540,5	1.645,5	1.734,5	1.777,5	1.822,5	1.822,5
	b. besi	m	1.051,0	946,0	857,0	825,0	780,0	780,0
	c. kayu	m	38,0	38,0	38,0	27,0	27,0	27,0
	Jumlah	m	2.629,5	2.629,5	2.629,5	2.629,5	2.629,5	2.629,5
3	Kondisi Jembatan Baik							
	a. beton	m	1.540,5	1.645,5	1.734,5	1.747,5	1.822,5	1.802,5
	b. besi	m	163,0	88,0	45,5	48,5	61,0	355,0
	c. kayu	m	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	m	1.703,5	1.733,5	1.780,0	1.796,0	1.883,5	2.157,5
4	Kondisi Jembatan Rusak							
	a. beton	m	-	-	-	30,0	-	20,0
	b. besi	m	888,0	858,0	811,5	776,5	719,0	425,0
	c. kayu	m	38,0	38,0	38,0	27,0	27,0	27,0
	Jumlah		926,0	896,0	849,5	833,5	746,0	472,0

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah dan panjang jembatan konstruksi beton meningkat setiap tahunnya, sehingga memperlancar arus lalu lintas kendaraan.

3. Kondisi saluran dan jaringan irigasi pada tahun 2005-2010 secara umum mengalami penurunan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.41**  
**Kondisi Saluran dan Jaringan Irigasi**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	KONDISI SALURAN					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Saluran irigasi primer							
	a. panjang	KM	783,82	783,82	783,82	783,82	783,82	823,94
	b. kondisi baik	%	75,54	70,99	71,87	73,03	73,74	71,97
	baik	KM	592,12	553,32	563,32	572,42	577,98	592,98
	rusak ringan	KM	112,80	96,50	115,20	125,00	106,32	96,32
	rusak berat	KM	78,90	134,00	105,30	86,40	99,52	134,64
	Jumlah	KM	783,82	783,82	783,82	783,82	783,82	823,94
2	Saluran irigasi sekunder							
	a. panjang	KM	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	68,23
	b. kondisi baik	%	54,43	56,64	65,62	58,15	57,84	73,62
	baik	KM	44,74	46,55	53,93	47,79	47,54	50,23
	rusak ringan	KM	26,25	20,22	15,50	25,10	21,24	7,63
	rusak berat	KM	1,20	15,42	12,76	9,30	13,41	10,34
	Jumlah	KM	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	68,20
3	saluran irigasi fensier							
	a. panjang	KM	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96
	b. kondisi baik	%	48,44	23,96	22,11	21,36	28,56	28,58
	baik	KM	13,06	6,46	5,96	5,76	7,70	7,70
	rusak ringan	KM	8,2	9,8	11,20	12,30	6,76	6,78
	rusak berat	KM	5,7	10,7	9,80	8,90	12,50	12,50
	Jumlah	KM	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Semarang

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan kondisi saluran dan jaringan irigasi antara lain :

- Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan alih fungsi irigasi menjadi saluran drainase.
- Masih rendahnya kesadaran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi secara partisipatif.
- Menurunnya alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat terkait dengan pemeliharaan/rehabilitasi saluran dan jaringan irigasi.

4. Kondisi bangunan bendung untuk daerah irigasi teknis, ½ teknis dan sederhana pada tahun 2005-2010 terlihat pada Tabel 2.42 berikut :

**Tabel 2.42**  
**Kondisi Bangunan Bendung**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

Uraian	Capaian Kinerja 5 Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kondisi Bangunan Bendung dalam kondisi baik (buah)						
Daerah Irigasi Teknis	25	30	27	26	31	36
Daerah Irigasi 1/2 Teknis	15	17	14	15	14	24
Daerah Irigasi Sederhana	241	250	260	267	283	472
Jumlah	281	297	301	308	328	532

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Semarang

#### 4. Urusan Wajib Perumahan

Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum seperti pasar, dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat.

Tolok ukur kinerja pada urusan perumahan selama tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut :

**Tabel 2.43**  
**Capaian Kinerja Perumahan**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	INFRASTRUKTUR DASAR	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ket
1	Perbaikan Lingkungan	Lokal	21	25	30	35	40	*129	
2	Perbaikan Fasilitas Umum (Pasar)	Unit	7	8	10	12	14	17	Angka Kumulatif
3	Penyediaan Air Bersih	desa	12	14	16	18	20	25	
4	Bantuan Rehab Rumah	KK	-	-	-	-	100	200	Program BSP2S Kemenera

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Semarang

Selama kurun waktu tahun 2005-2010 perbaikan lingkungan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 58,5%, perbaikan fasilitas umum

naik sebanyak 10 pasar, penyediaan air bersih sebesar rata-rata 15,9%. Pada tahun 2009 dan 2010 dilaksanakan program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) yang bersumber dari Kementerian Perumahan Rakyat.

## 5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Penataan ruang Kabupaten Semarang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi.

Penataan ruang Kabupaten Semarang disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kawasan Kedungsepur. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Perubahan fungsi lahan pertanian tersebut antara lain berubah fungsi menjadi industri dan perumahan. Berikut ini tabel penggunaan lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2009 :

**Tabel 2.44**  
**Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2005-2009 (Ha)**

<b>PENGUNAAN LAHAN</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Sawah	24.423,98	24.421,07	24.417,94	24.415,01	24.411,46
Pekarangan dan Bangunan	19.703,61	19.572,00	19.578,00	19.700,58	19.851,32
Tegalan dan Kebun	28.337,00	26.617,00	26.616,00	26452,30	25442,59

PENGUNAAN LAHAN	2005	2006	2007	2008	2009
Tambak/ Kolam	26,00	42,00	41,00	41,10	40,00
Rawa	2.623,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00
Perkebunan	5.069,00	5.068,00	5.068,00	5.068,13	5.068,13
Hutan Negara/ Rakyat	11.589,00	13.428,00	13.428,00	14.217,86	14.640,37
Lain-lain Tanah Kering	3.249,09	3.249,00	3.250,00	3.033,79	2.943,81
<b>JUMLAH</b>	<b>95.020,69</b>	<b>95.020,69</b>	<b>95.020,69</b>	<b>95.020,69</b>	<b>95.020,69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Upaya yang ditempuh dalam pengendalian pemanfaatan ruang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran BKPRD Kabupaten Semarang terutama pokja pengendalian pemanfaatan ruang
2. Penetapan perda-perda tata ruang (Rencana Detail Tata Ruang)
3. Pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana tata ruang

Berikut ini data status Rencana Tata Ruang hingga Tahun 2010 :

**Tabel 2.45**  
**Status Rencana Tata Ruang Hingga Tahun 2010**

No	JENIS RENCANA TATA RUANG	TAHUN	STATUS PERDA			Penyesuaian Dengan UU 26/2007
			Sudah Raperda	Sudah Ditetapkan	No. Pengesahan Perda	
I	RTRW Kabupaten Semarang	2011-2031	√			
II	Rencana Tata Ruang Kota/Kawasan					
1	RDTR Kaw Perkotaan IKK Ambarawa	2007-2027	-	√	No. 7 Th 2008	Telah disesuaikan
2	RDTR Kaw Perkotaan IKK Bergas	2007-2027	-	√	No. 6 Th 2008	Telah disesuaikan
4	RDTR Kaw Perkotaan IKK Suruh	2008-2028	-	√	No. 4 Th 1995	Direncanakan Revisi Perda Tahun 2013
5	RDTR Kaw Perkotaan IKK Bawen	2008-2028	-	√	No. 10 Th 1997	Direncanakan revisi Perda Tahun 2012
6	RUTRK-RDTRK IKK Tuntang	1997-2007	-	√	11 Th 1997	Direncanakan revisi Perda Tahun 2012
7	RUTRK-RDTRK IKK Sumowono	1998-2008	-	√	5 Th 2002	Direncanakan revisi Perda Tahun 2011



No	JENIS RENCANA TATA RUANG	TAHUN	STATUS PERDA			Penyesuaian Dengan UU 26/2007
			Sudah Raperda	Sudah Ditetapkan	No. Pengesahan Perda	
8	RUTRK-RDTRK IKK Banyubiru	1998-2008	-	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2013
9	RUTRK-RDTRK IKK Getasan	2000-2010	-	√	6 Th 2002	Direncanakan revisi Perda Tahun 2011
10	RDTR Kaw Perkotaan Ungaran	1994-2009	-	√	1 Th. 1995	Direncanakan Revisi Perda Tahun 2011
11	RUTRK-RDTRK IKK Pringapus	2003-2013	-	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2012
12	RUTRK-RDTRK IKK Tengaran	2007-2017	√	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2011
13	RUTRK-RDTRK IKK Susukan	2007-2017	√	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2011
14	RDTR Kaw Perkotaan Bandungan	2008-2028	√	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2012
15	RDTR Kaw Perkotaan IKK Pabelan	2009-2029	√	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2011
16	RDTR Kaw Perkotaan IKK Bringin	-	-	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2014
17	RDTR Kaw Perkotaan IKK Kaliwungu	-	-	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2014
18	RDTR Kaw Perkotaan IKK Bancak	-	-	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2014
19	RDTR Kaw Perkotaan IKK Jambu	-	-	-	-	Direncanakan Perda Tahun 2013

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Semarang

## 6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah mengakomodasi redesign sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan selama kurun waktu 2006-2010 adalah:

- 1) Perencanaan umum pembangunan daerah dapat dilihat seperti pada tabel berikut

**Tabel 2.46**  
**Perencanaan Umum Pembangunan Daerah**

NO	Jenis Dokumen	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penyusunan Rancangan RPJPD		1			-
2	Penyusunan Hsl Mulusrebang RPJPD		1			-
3	Penyusunan Rancangan RPJMD	1				1
4	Penyusunan Hsl Mulusrebang RPJMD	1				1
5	Evaluasi RPJMD				1	1
6	Penyusunan Rancangan RKPD	1	1	1	1	1
7	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah	1	1	1	1	1
8	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1	1	1	1	1
9	LAKIP SKPD	1	1	1	1	1
10	AMU Bupati					1
11	Penyusunan Profil Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang

- 2) Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.47**  
**Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah**

NO	Jenis Dokumen	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kajian prasarana jalan dan transportasi	1	1	1		-
2	Kajian kawasan strategis/prioritas		3	2	3	2
3	Kajian perumahan dan permukiman			1		-
4	Kajian kesehatan lingkungan permukiman		1			-
5	Kajian lngas				1	-
6	Kajian air bersih			1		-
7	Koordinasi Perencanaan masalah pembangunan prasarana wilayah dan SDA	1	1	1	1	1

Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang

- 3) Perencanaan Bidang Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.48**  
**Realisasi Perencanaan Bidang Ekonomi**

No	Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	2006	2007	2008	2009	2010
1	Profil Agropolitan		1	1		-
2	Profil PPK	1	1	1		-
3	Profil PZKP	1	1	1		-
4	Kajian Lembaga Ekonomi Desa	1				-
5	Dokumen analisis data Informasi perencanaan pembangunan ekonomi				1	-
6	Indikator ekonomi daerah		1	1		-
7	Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan			0		-
8	perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat					-
9	Dokumen Tabel Input output daerah	1		1		1
10	Dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan		1	-		-
11	Masterplan Pembangunan ekonomi		-			-
12	Koordinasi bidang ekonomi	1	1	1		1
13	Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Agropolitan	1	1	1		1
14	Koordinasi dan fasilitasi penguatan FEDEP	1	1	1		1
15	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan KLUSTER	1	1	1		1
16	Laporan Movev Lembaga Ekonomi Desa		1	1		1
17	Laporan Movev Bidang Ekonomi	1	1	1		-

Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang

- 4) Perencanaan Bidang Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.49**  
**Realisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya**

NO	Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	2006	2007	2008	2009	2010
1	Profil pengarusutamaan gender	-	-	1	-	-
2	Profil pembangunan pendidikan	-	-	1	-	-
3	Profil pembangunan kesehatan	-	-	-	-	-
4	Kajian pengarusutamaan gender	1	1	1	1	-
5	Kajian perencanaan bidang pendidikan	1	1	1	-	-
6	Kajian perencanaan bidang kesehatan	-	1	2	-	-
7	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan kesehatan	-	1	1	-	-
8	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia	1	-	-	-	-
9	Masterplan bidang kesehatan	-	-	-	1	-
10	Monitoring Bidang Sosial Budaya	-	-	1	-	1

Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang

## 7. Urusan Wajib Perhubungan

Capain kinerja pembangunan urusan perhubungan selama tahun 2005-2010 adalah:

- 1) Jumlah Potensi Titik Parkir se-wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Potensi Titik Parkir**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum	Titik	166	160	160	106	102	31
2	Tempat Parkir Khusus	Titik	16	16	16	16	11	71
3	Tempat Pengusahaan Perparkiran	Titik	19	26	7	14	8	16
	<b>JUMLAH</b>		<b>201</b>	<b>202</b>	<b>183</b>	<b>136</b>	<b>121</b>	<b>118</b>

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Semarang

Pada tahun 2005, jumlah titik parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh UPTD Perparkiran sebanyak 166 titik. Jumlah ini berkurang drastis menjadi 31 titik pada tahun 2010. Penurunan jumlah titik parkir di tepi jalan disebabkan antara lain perubahan status retribusi menjadi pajak parkir, dan perubahan status dari semula parkir di tepi jalan umum menjadi parkir khusus. Disamping perubahan status tersebut, secara alamiah mengalami perubahan fungsi lahan sehingga tidak memiliki potensi untuk dipungut retribusi perparkiran.

Jumlah titik parkir khusus yang dikelola oleh UPTD Perparkiran mengalami fluktuasi. Tahun 2009 turun 5 titik menjadi 11 titik dibanding tahun 2005 sejumlah 16 titik. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan status dari semula retribusi parkir menjadi pajak parkir. Sedang pada tahun 2010, meningkat menjadi

71 titik, disebabkan perubahan status dari semula parkir di tepi jalan umum menjadi parkir khusus.

- 2) Jumlah terminal dan sub terminal angkutan umum Kabupaten Semarang tahun 2005-2010 ditunjukkan tabel sebagai berikut

**Tabel 2.51**  
**Jumlah Terminal, Sub Terminal dan Emplasemen**  
**Angkutan Umum Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	Tipe	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	TERMINAL BAWEN	B	1	1	1	1	1	1
2	SUB TERMINAL AMBARAWA	C	1	1	1	1	1	1
3	SUB TERMINAL UNGARAN	C	1	1	1	1	1	1
4	SUB TERMINAL SUMOWONO	C	1	1	1	1	1	1
5	SUB TERMINAL SRUWEN	C	1	1	1	1	1	1
6	EMPLASEMEN MARGOSARI SUSUKAN	-	-	-	1	1	1	1
7	EMPLASEMEN RPH PASAR PROJO AMBARAWA	-	-	1	1	1	1	1
	JUMLAH		5	6	7	7	7	7

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Semarang

Idealnya pada setiap kecamatan tersedia fasilitas angkutan umum berupa terminal dan/atau emplasemen, namun sampai dengan tahun 2010, baru tersedia 7 lokasi terminal dan emplasemen. Disamping keterbatasan dana, penyebab dari belum terbangunnya fasilitas terminal pada tiap-tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan lahan pada kawasan Ibukota Kecamatan Central Business Distric (CBD). Kasus pada berbagai daerah menunjukkan bahwa pembangunan terminal yang tidak terencana dengan baik dan tidak terintegrasi dengan fasilitas

umum lainnya seperti pasar, akan menyebabkan fungsi dari terminal tidak menjadi optimal;

- Belum tersusunnya Detail Engineering Desain (DED) terminal pada tiap kecamatan;
- Belum seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang terlayani oleh angkutan umum;
- Tidak seluruh kecamatan memerlukan fasilitas terminal karena kecamatan tersebut tidak berada pada titik akhir atau awal perjalanan trayek angkutan umum.

3) Jumlah kendaraan angkutan umum di Kabupaten Semarang tahun 2005-2010 ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.52**  
**Jumlah Kendaraan Angkutan Umum**  
**DI Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Mobil Penumpang	kend	517	616	660	645	600	535
2	Mobil Bus	kend	799	858	858	842	851	872
3	Pick-Up	Kend	29	29	29	27	27	85
4	Bestel	kend	-	-	-	-	-	-
5	Truck	kend	10	10	13	31	86	681
6	Tangki Sumbu III	kend	-	-	-	-	-	-
7	Truck Sumbu III	kend	5	5	5	5	6	14
8	Sumbu Tangki	kend	-	-	-	-	-	-
9	Kendaraan Khusus	kend	-	-	-	-	-	-
10	Kereta Gandeng	kend	2	2	2	2	2	2
11	Kereta Tempel	kend	-	-	-	-	2	4
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.362</b>	<b>1.520</b>	<b>1.567</b>	<b>1.552</b>	<b>1.574</b>	<b>2.229</b>

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Semarang

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2005 jumlah kendaraan umum sebanyak 1.362 unit dan pada tahun 2010 menjadi 2.229 unit atau mengalami peningkatan 64%. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan,

kebijakan mengenai penurunan pajak kendaraan angkutan umum serta berbagai kemudahan dalam pengurusan administrasi kendaraan umum

- 4) Jumlah trayek angkutan umum di Kabupaten Semarang tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.53**  
**Jumlah Jalur Trayek Angkutan Umum**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Angkutan Pedesaan Dalam Kota	Jurusan	27	33	33	33	33	33
2	Angkutan Pedesaan Antar Kota	Jurusan	26	24	24	24	24	30
<b>JUMLAH</b>			<b>53</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>66</b>

Sumber: DishubkonInfo Kabupaten Semarang

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2005 jumlah trayek sebanyak 53 jurusan dan pada tahun 2010 menjadi 66 jurusan atau mengalami peningkatan 25%. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya kawasan perkotaan dan meningkatnya bangkitan perjalanan sehingga perlu untuk dilakukan pemenuhan kebutuhan jalur angkutan sesuai Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 551.2/0396 Tahun 2007 tentang Penetapan Kebutuhan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum.

- 5) Jumlah kendaraan bermotor dan jenisnya yang diuji di Kabupaten Semarang tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.54**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenisnya Yang Diuji**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
			Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum
1	MOBIL BUS	kend	2245	119	2270	130	2043	128	1677	177	1765	156	1689	194
2	MOBIL PENUMPANG	kend	533	69	576	19	785	19	1106	8	1106	13	1094	6

NO	URAIAN	SAT	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
			Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum	Umum	Tidak Umum
3	TRUCK	kend	104	8990	33	2876	35	2839	727	2816	274	3.017	413	3336
4	PICK UP	kend	-	-	62	5817	62	6020	18	6402	18	6.457	54	7974
5	KERETA TEMPEL	kend	-	14	-	15	-	15	2	23	10	19	33	8
6	KERETA GANDENG	kend	-	39	-	32	-	34	2	26	4	32	17	9
7	TANKI	kend	4	-	7	78	6	88	-	66	-	72	41	54
	JUMLAH	kend	2886	9131	2948	8967	2932	9149	3032	9518	3177	9766	3345	10481
	JUMLAH TOTAL			12.017		11.915		12.074		12.890		12.843		14.022

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Semarang

Tabel diatas merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang diuji di Kabupaten Semarang. Tahun 2005 diuji 12.017 kendaraan dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 14.022 kendaraan diuji atau mengalami peningkatan 17%. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, mengungkit daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan sehingga pertumbuhan rata-rata kendaraan yang diuji per tahun sebesar 3,5%. Hal lain yang mempengaruhi adalah kemudahan dalam pelayanan perijinan numpang uji, baik masuk maupun keluar.

- 6) Jumlah fasilitas lalu lintas di Kabupaten Semarang untuk tahun 2005-2010 ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.55**  
**Jumlah Fasilitas Lalu Lintas**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Rambu Lalu Lintas	Buah	1.150	1.433	1.416	1.458	1.630	1.765
2	Rppj	Buah	22	30	34	42	32	36
3	Aplil (Traffic Light)	Buah	9	9	9	9	9	9
4	Flashing Amber	Buah	27	31	33	35	35	37
5	Guardrail	Meter	300	300	300	600	1.108	1.181
6	Halte	Buah	-	12	12	12	12	12
7	Marka Jalan	m2	-	-	325	1.392	3.252	4.424
8	Medan Fortable	Buah	-	49	49	93	73	96
9	Zebra Cross	m2	-	-	-	-	81	81
10	Meterisasi Listrik	Titik	-	-	34	41	41	41



NO	URAIAN	SAT	2005	2006	2007	2008	2009	2010
11	Rambu Tiang F	Buah	-	-	-	4	4	4
12	Led Lamp	Buah	-	-	34	110	113	113
13	Rambu Fortabel	Buah	-	-	-	27	27	27
14	Rambu Papan Himbauan	Buah	-	-	-	2	7	7
15	Traffic Cone	Buah	-	45	20	45	77	77
16	Count Down	Buah	-	-	-	8	8	8
17	Pita Penggadu	Meter	-	-	-	-	300	550
18	Paku Jalan	Buah	-	-	-	-	340	340

Sumber: Dishubkaminfo Kabupaten Semarang

Pada tahun 2005 fasilitas lalu lintas berjumlah 1.508 meningkat menjadi 8.808 tahun 2010, atau mengalami kenaikan sebesar 484%. Hal ini dikarenakan tingginya atensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan fasilitas lalu lintas, dengan harapan dapat meningkatkan faktor keselamatan pengguna lalu lintas di jalan.

## 8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan dan perilaku dunia usaha disegala sektor akan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup baik positif maupun negatif. Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan memaksimalkan dampak positif dan mengeliminir dampak negatif.

Berdasarkan karakteristik dan aktivitas manusia dan kegiatan usahanya diperkirakan akan mempengaruhi perubahan-perubahan pada air permukaan, pada kualitas udara dan pada Rona Awal Lingkungan Hidup.

Capaian indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.56**  
**Capaian Kinerja Pelestarian dan Pengendalian LH**

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penilaian Adipura	-	-	33	28	20	Belum diumumkan
2	Workshop pengelolaan sampah (orang)	-	-	40	20	75	20
3	Pengawasan dampak kegiatan usaha						
	a. Industri	71	106	102	101	93	26
	b. Perhotelan	20	22	15	26	16	7
	c. Peternakan	30	35	21	32	15	-
4	Penegakan Hukum Lingkungan						
	- Dokumen UKL-UPL	15	15	20	32	18	-
	- Dokumen AMDAL	1	2	2	4	4	10
5	Program Kali Bersih						
	a. Gerakan bersih Sungai/org	300	-	200	-	150	100
	b. Pemberian Bantuan Alat Kebersihan (Gerobag)	5	8	10	10	22	50
	a. Pemasangan Papan Peringatan	8	-	-	-	-	40
6	Pemulihan Kerusakan Lingkungan						
	a. DAM Penahan	-	-	13	19	2	-
	b. Gully Plug	-	-	-	-	2	-
	c. Tanaman Tegakan	1.000	29.520	5.000	3.475	53.633	98.000
	d. Sumur Resapan	50	-	8	-	32	85
	e. Rorak Resapan	-	-	50	-	20	-
	f. Pengadaan Gedung Laboratorium Lingkungan	-	-	1	-	-	-
	g. Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	20	-	1	11	-
	h. Papan Informasi Perlindungan SDA	-	-	-	-	50	40
	i. Pemantauan/ Pengujian Kualitas Lingkungan (air/udara)	57	-	15	10	19	29

Sumber : BLH Kab. Semarang

1. Meningkatnya peringkat dalam Penilaian Adipura dimana pada tahun 2007 meraih peringkat 33, naik ke peringkat 28 tahun 2008 dan naik ke peringkat 24 pada tahun 2009. Sedang untuk tahun 2010 hasil penilaian Adipura belum diumumkan.
2. Workshop pengelolaan sampah dilaksanakan dalam rangka pengendalian sampah.
3. Dilaksanakan pengawasan dampak kegiatan usaha industri, perhotelan, peternakan dan usaha lainnya dalam rangka pengendalian lingkungan hidup dengan mengharuskan membuat dokumen UKL-UPL atau Amdal.
4. Gerakan kali bersih dengan pemberian bantuan gerobak dan pemasangan papan peringatan, agar tidak membuang sampah di sungai/kali.
5. Pemulihan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan pembuatan dam penahan, gully plug, tanaman tegakan, sumur dan rovak resapan, papan informasi perlindungan SDA, serta pengujian kualitas lingkungan (air dan udara ambient) yang didukung tersedianya gedung dan peralatan laboratorium lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka kelestarian lingkungan hidup.

Capaian kinerja persampahan dan pertamanan seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 2.57**  
**Realisasi Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan**

JENIS	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Luas Taman Kota (m <sup>2</sup> )	22.136	22.136	25.350	30.659	30.659	31.019
Pelayanan Sampah (m <sup>3</sup> /tahun)	89.790	95.560	99.873	104.381	108.981	112.804
Produksi timbulan sampah (m <sup>3</sup> /tahun)	654.115	656.671	661.462	666.506	669.950	679.660
Prosentase pelayanan sampah (%)	13,72	14,55	15,09	15,66	16,26	16,59
Kecamatan Terlayani (IKK)	6	8	10	12	12	12

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Kab. Semarang

Tersedianya taman kota seluas 31.019 m<sup>2</sup> yang terdiri dari Taman Batas Kota, Taman Alun-alun Mini Ungaran, Taman Alun-alun Ungaran, Taman Benteng Willem II Ungaran, Taman Serasi Ungaran, Jl. Protokol Ungaran, Taman Serasi Ambarawa, Taman Pertigaan Bawen, Taman Pojoksari Ambarawa.

Produksi timbulan sampah tiap tahun mengalami kenaikan, namun hal tersebut diimbangi dengan meningkatnya pelayanan sampah. Sampah-sampah ini berasal dari domestik, industri, pertokoan, perkantoran, pasar dan Terminal.

Jumlah kecamatan yang terlayani angkutan sampah sebanyak 12 kecamatan sampai dengan tahun 2010.

### 9. Urusan Wajib Pertanahan

Untuk menghindari sengketa/konflik terkait dengan fungsi pemanfaatannya yang sesuai dengan RTRW baik fungsi lindung maupun budi daya, maka urusan pertanahan menjadi hal yang harus ditata dan dijaga.

Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2005-2010 yang terkait urusan pertanahan sebagai berikut:

- 1) Realisasi pendapatan lelang bengkok tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.58**  
**Realisasi Pendapatan Lelang Bengkok**  
**Tahun 2005-2010**

NO	TAHUN	REALISASI PENDAPATAN LELANG BENGKOK (Rp)
1	2005	382.751.600
2	2006	601.949.750
3	2007	780.698.810
4	2008	947.325.048
5	2009	1.254.938.875
6	2010	1.314.372.368

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab.Semarang

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa realisasi pendapatan lelang aset tanah Pemerintah Daerah berupa bengkok telah menambah pendapatan daerah yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2005 sebesar Rp. 382.751.000,00 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.314.372.368,-.

Terlaksananya rapat koordinasi terkait penyelesaian masalah tanah di Kabupaten Semarang tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.59**  
**Rakor Penyelesaian Masalah Tanah**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

URAIAN	SAT	Kondisi Awal 2005	Capaian				
			2006	2007	2008	2009	2010
Rapat Koordinasi Permasa-lahan dan Alih fungsi	kali	25	49	3	16	25	25

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab.Semarang

- 2) Terlaksananya pensertifikatan tanah Jalan Lingkar Ambarawa dan tanah pengganti tanah TNI AD yang terkena Jalan Lingkar Ambarawa.
- 3) Tersedianya tanah untuk lokasi kantor Kecamatan Sumowono yang representatif. Berdasarkan SK Alih Status Penggunaan Barang No.50.181/0148/2009, mulai tanggal 5 Maret 2009 dipakai untuk Puskesmas Pembantu dan Rumah Bersalin di Dusun Jlegong Desa Jubelan Kecamatan Sumowono.
- 4) Pengadaan Tanah untuk lokasi Mapolsek Bandungan dengan luas 1200 m<sup>2</sup> berstatus Hak Milik.
- 5) Tersedianya lahan untuk membangun alun-alun Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur.

## 10. Urusan Wajib/Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah salah satu penyelenggaraan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah. Selain itu penyelenggaraan administrasi kependudukan mempunyai tujuan untuk :

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan (pindah dan datang) dan peristiwa penting yang dialami penduduk (lahir, mati, kawin, cerai, dll).
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dengan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

### 1) Penerbitan dokumen kependudukan

Dokumen kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan adalah KTP, KK, Akte Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama, Akta Kematian dan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. Data selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.60**  
**Realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KTP	218.939	166.399	203.019	257.400	192.166	118.399
KK	121.332	95.648	130.825	133.683	84.508	86.348
Akta Kelahiran	15.453	16.353	38.572	46.848	35.775	54.851
Akta Perkawinan	462	429	421	447	467	445
Akta Perceraian	19	32	34	39	53	46
Akta Pengangkatan Anak	5	4	4	4	6	9
Akta Ganti Nama	2				4	13
Akta Kematian	20	18	36	38	39	38
Akta Pengakuan & Pengesahan Anak	15	-	2	3	10	12

Sumber : Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Semarang

Pada tahun 2006 penerbitan KTP dan KK mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2005 terjadi pemuktahiran database kependudukan dengan menggunakan Aplikasi pendukung SIAK (sebelumnya menggunakan SIMDUK) sekaligus penerbitan NIK dengan kode unik, sehingga pada tahun 2005 terjadi pelonjakan pemohon KTP dan KK dengan NIK yang baru. Hal ini berdampak terjadi penurunan jumlah pemohon pada tahun 2006, karena wajib KTP telah mengurus KTP/KK di tahun 2005.

Penerbitan Akte Kelahiran tahun 2009 mengalami penurunan, karena pada tahun 2008 telah dilaksanakan sosialisasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang akan menerapkan pemberian sanksi administratif bagi pengurusan Akte Kelahiran yang terlambat. Hal ini berdampak pada melonjaknya permohonan akte kelahiran tahun 2008.

2) Tingkat pelayanan administrasi kependudukan

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/3091/SJ tanggal

24 Agustus 2009 perihal Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, Kabupaten Semarang telah menyiapkan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional yang dilengkapi dengan kode keamanan/sistem pengendalian (sidik jari) dan rekaman elektronik (chip) yang wajib selesai pada akhir tahun 2011.

**Tabel 2.61**  
**Indikator Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil 2005-2010**

No	Uraian	Capaian Kinerja 5 Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kepemilikan KTP (%)	64,35	72,42	73,45	72,14	70,47	70
2	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk	361	378	402	443	442	498
3	Penerapan KTP berbasis NIK Nasional	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
4	Jumlah penduduk yang memiliki Akte kelahiran	331.347	347.700	386.272	433.120	468.895	523.746
5	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	439.979	425.649	452.781	532.353	557.920	551.510
6	Wajib KTP	683.719	587.741	616.413	737.990	791.742	786.695

Sumber : Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Semarang

- 3) Tersedianya database kependudukan secara online di 19 kecamatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.62**  
**Database kependudukan Kabupaten Semarang**

Tahun	Program	Dasar	Keterangan
2004	Aplikasi SIMDUK.	Permendagri No. 1 A Tahun 1995.	
2005	Aplikasi SIMDUK.	Permendagri No. 28 Tahun 2005.	Online di 14 kecamatan. Offline di 4 kecamatan.
2006	Aplikasi SIMDUK.		Offline di 4 kecamatan.
2007	- Aplikasi pendukung SIAK. - Output format SIAK.		Offline di 4 kecamatan
2008	- Aplikasi pendukung SIAK. - Format database sesuai format SIAK.		Offline di 2 kecamatan



Tahun	Program	Dasar	Kecamatan
2009	Jaringan komunikasi online ke semua kecamatan = - Dial Up, - FTP Internet ( Telkom dan M2 Indosat ).		Online di 19 kecamatan.
2010	SIA Online	UU No. 23 Tahun 2006	Online di 19 kecamatan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Semarang

## 11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

Arah pembangunan yang dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan jelas menempatkan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan yang terimplementasikan dalam program dan strategi pembangunan di tingkat kabupaten dan kota, dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pendekatan pembangunan Gender and Development tidak hanya dilihat dalam arti peningkatan akses pada sumberdaya dan perbaikan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menyangkut proses bagaimana manfaat pembangunan tersebut diperoleh. Artinya, bagaimana akses, manfaat, kontrol dan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya.

Kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender masih pada tahap sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi stakeholder terkait, khususnya bagi aparat perencana pada tingkat SKPD melalui pembentukan vocal point pada masing-masing SKPD.

Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan trafficking telah dibentuk Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Untuk memberdayakan P2TP2A telah dilaksanakan pelatihan terhadap 21 orang pengelola P2TP2A. Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDTR) yang berkaitan dengan perempuan maupun anak pada tahun 2010 mencapai 172 kasus, namun baru tertangani 10 kasus. Selain itu telah diadakan pelatihan kader khusus, sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan KDRT, dan pemberdayaan organisasi perempuan.

**Tabel 2.63**  
**Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Sosialisasi PUG (org)	100	100	95	575	60	57
2.	Sosialisasi KDRT (org/kali)	60	60	19	33	2	-
3.	Pelatihan kader Khusus (org)	68	68	90	95	136	60
4.	Pemberdayaan organisasi perempuan	5	10	10	11	10	5
5.	Pengembangan materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) (kali/org)	-	-	-	-	1 / 61	
6.	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (org)	-	-	-	-	50	50

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Semarang

## 12. Urusan Wajib Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga akan berpengaruh terhadap potensi peningkatan kesejahteraan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah antara lain manajemen pelaksanaan program, rendahnya tingkat kesertaan KB

secara mandiri, berkembangnya tuntutan pelayanan Keluarga Berencana dan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi serta pengayomannya.

Keterbatasan pengembangan teknologi kontrasepsi masih terfokus pada peserta KB wanita, dan akan berpengaruh pada upaya terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam program KB.

Capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio peserta KB aktif dibandingkan pasangan usia subur tiap tahun mengalami peningkatan sebesar rata-rata 0,10%. Lebih jelas data peserta KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.64**  
**Capaian Peserta KB Aktif (akseptor)**

No	Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Per Metode Kontrasepsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	IUD	24.715	23.485	23.064	22.143	21.144	19.120
2	MOP	2.869	2.783	2.728	2.553	2.403	2.128
3	MOW	9.248	9.146	9.035	9.154	8.837	8.252
4	IMP	22.735	22.139	22.637	24.240	25.103	24.530
5	SUNTIK	67.287	69.166	72.983	73.875	81.335	87.371
6	PIL	16.602	16.620	17.054	16.098	16.319	16.057
7	KONDOM	387	603	633	632	764	997
	JUMLAH (PA)	143.843	143.942	148.134	148.695	155.905	158.465
	JUMLAH PUS	171.997	175.236	179.123	183.074	187.643	190.577
	% PA THD PUS	83,63	82,14	82,70	81,22	83,09	83,15

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa rasio peserta KB pria dibandingkan dengan jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun menurun, yaitu sebesar 2,3% (Tahun 2005), 2,4% (Tahun 2006), 2,3% (Tahun 2007), 2,1% (Tahun 2008), 2,0% (Tahun 2009) dan 2,0% (Tahun 2010).

- 2) Peserta KB baru selama kurun waktu 2005-2010 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 10,72%, walaupun pada akhir tahun 2009 jumlah peserta KB baru menurun. Penurunan pada tahun 2009 disebabkan karena berkurangnya personil khususnya Petugas

Lapangan KB (PLKB) sebagai akibat dari alih profesi PLKB menjadi bidan dan tenaga administratif di kecamatan.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Peserta KB Baru (PB)**

No	Jumlah Peserta KB Baru (PB) Per Metode Kontrasepsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	IUD	561	600	953	1.348	1.348	2.262
2	MOP	51	21	62	58	36	106
3	MOW	271	275	287	482	321	306
4	IMP	1.606	1.783	2.894	4.536	3.014	4.455
5	SUNTIK	12.142	13.863	15.500	17.073	14.132	17.142
6	PIL	2.367	2.450	2.868	2.403	1.935	2.195
7	KONDOM	127	384	272	397	302	376
	<b>J U M L A H (PB)</b>	<b>17.125</b>	<b>19.376</b>	<b>22.836</b>	<b>26.297</b>	<b>21.088</b>	<b>26.842</b>

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Semarang

- 3) Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera, diikuti penurunan keluarga pra sejahtera. Jumlah keluarga pra sejahtera menurun rata-rata 4,9%, sementara keluarga sejahtera I, II, III dan III Plus meningkat berturut-turut rata-rata 7,5%, 12,9%, 8,7% dan 5,5%. Rincian indikator kinerja keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.66**  
**Indikator Kinerja Kunci Keluarga Sejahtera**

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Keluarga Pra Sejahtera	100.739	95.510	92.642	89.551	86.814	78.190
2	Keluarga Sejahtera I	31.804	34.495	32.745	35.006	37.096	44.981
3	Keluarga Sejahtera II	50.707	56.064	58.847	59.997	64.055	89.789
4	Keluarga Sejahtera III	52.203	59.860	69.059	74.803	78.074	78.822
5	Keluarga Sejahtera III Plus	2.980	3.146	3.287	3.284	3.521	3.876
	<b>Jumlah</b>	<b>238.433</b>	<b>249.075</b>	<b>256.580</b>	<b>262.641</b>	<b>269.560</b>	<b>295.658</b>

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Semarang

### 13. Urusan Wajib Sosial

Pembangunan pada Sektor Sosial merupakan upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kondisi krisis disegala bidang yang melanda Indonesia berpengaruh secara signifikan

terhadap peningkatan kuantitatif dan kualitatif Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dapat dilihat dari Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di sisi lain adanya tuntutan masyarakat agar penanganan PMKS dapat secara cepat, tepat dan transparan. Upaya penanganan PMKS dapat dilakukan melalui sistem panti dan non panti.

Jumlah panti sosial tahun 2005 sebanyak 25 panti dengan 1.125 penghuni, meningkat sebanyak 10 panti menjadi 35 panti pada tahun 2010 atau 40 % dengan 1.624 penghuni. Jumlah penghuni meningkat sebanyak 499 orang (44,35%) dibandingkan tahun 2005. Program pembinaan panti sosial di Kabupaten Semarang dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.67 berikut:

**Tabel 2.67**  
**Jumlah Panti Sosial**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010**

TAHUN	JUMLAH PANTI		
	ASUHAN	WREDA	CACAT
2006	21	2	3
2007	27	2	3
2008	27	2	3
2009	29	2	4
2010	29	2	4

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang

Perkembangan kondisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Semarang yang terdiri KUBE Penyandang cacat, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Remaja rawan narkoba, Tuna susila, Anak jalanan, Fakir miskin, Karang taruna, Pekerja sosial masyarakat, Keluarga komunitas adat terpencil dan Panti asuhan, dari tahun 2005-2010 selalu mengalami kenaikan, yaitu dari 26 KUBE menjadi 336 KUBE.

**Tabel 2.68**  
**Perkembangan KUBE PMKS Kab. Semarang**  
**Tahun 2006-2010**

KUBE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KUBE Penyandang cacat	5	11	16	29	36	27
KUBE Anak terlantar	6	12	18	24	30	-
KUBE Lanjut usia terlantar	3	6	9	12	15	40
KUBE Anak nakal	-	-	-	-	-	-
KUBE Remaja rawan narkoba	-	1	2	2	2	2
KUBE Tuna susila	-	4	4	4	4	4
KUBE Anak Jalanan	-	6	9	9	9	9
KUBE Fakir miskin	-	50	119	119	119	133
KUBE Karang taruna	4	23	48	48	48	67
KUBE Pekerja sosial masyarakat	4	8	27	27	27	30
KUBE Keluarga komunitas adat terpencil	1	1	17	17	17	17
KUBE Pantai Asuhan	3	5	7	7	7	7

Sumber : Dinasakertrans Kabupaten Semarang

Pada tahun 2010 telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui pelatihan dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembinaan diberikan kepada 80 orang anak terlantar, pelatihan untuk 218 orang penyandang cacat, pelatihan ketrampilan berusaha bagi 40 orang wanita rawan sosial ekonomi.

**Tabel 2.69**  
**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	TAKSIR	2005			2006			2007		
		Peserta (JK/Jwan)	Dilayani	%	Peserta (JK/Jwan)	Dilayani	%	Peserta (JK/Jwan)	Dilayani	%
1	Anak Balita Terlantar ( ABT )	1.930 JW	105	5,44	2.251 JW	2	0,09	2.315 JW	3	0,13
2	Anak Terlantar ( AT )	7.743 JW	753	9,72	7.291 JW	995	13,65	7.178 JW	1.025	14,28
3	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan ( AKTK )	147 JW	136	92,51	443 JW	-	0	509 JW	1	0,20
4	Anak Nakal ( AN )	269 JW	117	43,49	343 JW	8	2,33	425 JW	12	2,82
5	Anak Jalanan ( AJ )	639 JW	246	38,49	538 JW	-	0	490 JW	-	0
6	Anak Cacat ( AC )	1.491 JW	66	4,42	1.634 JW	81	4,96	1.759 JW	81	4,05
	a. Cacat Tubuh	486 JW	43	8,94	581 JW	-	0	638 JW	-	0
	b. Cacat Rungtu Wicara	199 JW	7	3,51	289 JW	67	23,18	325 JW	67	20,61
	c. Cacat Netra	191 JW	6	3,14	192 JW	-	0	167 JW	-	0
	d. Cacat Mental Reberdas	402 JW	5	1,24	317 JW	14	4,42	414 JW	14	3,38
	e. Cacat Mental Eks.Psikotik	52 JW	1	1,92	54 JW	-	0	38 JW	-	0
	f. Cacat Ganda	116 JW	4	3,44	139 JW	-	0	113 JW	-	0
	g. Cacat Bibir Sumbing	45 JW	0	0	62 JW	-	0	64 JW	-	0

NO	TAHUN	2005			2006			2007		
		Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%	Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%	Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	9.878 KK	1.975	19,99	9.570 JW	60	0,63	9.442 JW	60	0,63
8	Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (WKTK)	316 JW	285	90,18	249 JW	-	0	668 JW	1	0,15
9	Lanjut Usia Terlantar ( LUT )	6.300 JW	448	7,11	6.611 JW	240	3,63	7.385 JW	280	3,79
10	Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (LUTK)	3 JW	0	0	249 JW	-	0	253 JW	-	0
11	Penyandang Cacat ( PACA )	5.106 JW	702	13,74	5.378 JW	85	1,58	7.054 JW	93	1,32
	a. Cacat Tubuh	1.627 JW	227	13,95	1.689 JW	76	4,50	2.404 JW	83	3,45
	b. Cacat Rungu Wicara	510 JW	40	7,84	571 JW	-	0	756 JW	-	0
	c. Cacat Netra	894 JW	171	19,12	927 JW	5	0,54	1.077 JW	7	0,70
	d. Cacat Mental Reterdasi	591 JW	31	5,24	658 JW	-	0	754 JW	-	0
	e. Cacat Mental Eks.Psikotik	356 JW	24	6,74	398 JW	4	1,01	527 JW	3	0,57
	f. Cacat Ganda	171 JW	6	3,50	174 JW	-	0	257 JW	-	0
	g. Cacat Bibir Sumbing	88 JW	0	0	91 JW	-	0	86 JW	-	0
12	a. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis ( PACA BK )	828 JW	200	24,15	865 JW	-	0	1.154 JW	20	1,73
	b. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis ( Eks. Kusta )	41 JW	3	7,31	5 JW	-	0	39 JW	-	0
13	Penyandang HIV / AIDS	0	0	0	-	-	0	14 JW	-	0
14	Tuna Susila ( TS )	338 JW	100	29,58	419 JW	5	1,19	447 JW	25	5,59
15	Pengemis	15 JW	2	13,33	36 JW	6	16,07	39 JW	3	7,69
16	Gelandangan	10 JW	0	0	19 JW	11	57,89	18 JW	9	50
17	Bekas Narapidana	333 JW	111	33,33	379 JW	-	0	396 JW	-	0
18	Pekerja Migran Bermasalah ( PMB )	30 JW	0	0	6 JW	-	0	13 JW	-	0
19	Korban Penyalahgunaan NAPZA	244 JW	1	0,40	233 JW	16	6,87	80 JW	14	17,50
20	Keluarga Fakir Miskin ( KFM )	59.827 KK	7.373	12,32	62.955 KK	100	0,16	63.855 KK	250	0,39
21	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	8.026 KK	20	0,24	8.873 KK	-	0	10.389 KK	-	0
22	Keluarga Bermasalah Psikologis	399 KK	0	0	366 KK	-	0	274 KK	-	0
23	Keluarga Rentan	1.999 KK	42	2,10	1.932 KK	-	0	3.137 KK	-	0
24	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	85 KK	0	0	76 KK	76	100	76 KK	76	100
25	Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	1.761 KK	0	0	13.263 JW	870	6,56	1.299 JW	1.24	95,45
26	Korban Bencana Alam ( KBA )	9 KK	7	77,77	240 JW	240	100	444 JW	260	58,56
27	Korban Bencana Sosial ( KBS )	85 KK	82	96,47	92 JW	-	0	29 JW	-	0

NO	TAHUN	2008			2009			2010		
		Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%	Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%	Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%
1	Anak Balita Terlantar ( ABT )	2.488 JW	0	0	2.225 JW	3	0	1817 JW	0	0
2	Anak Terlantar ( AT )	6.897 JW	133	2	6.602 JW	1.394	2	5296 JW	80	1,5
3	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan ( AKTK )	388 JW	0	0	324 JW	2	0	247 JW	0	0
4	Anak Nakal ( AN )	347 JW	6	2	313 JW	7	2	436 JW	0	0
5	Anak Jalanan ( AJ )	395 JW	0	0	86 JW	0	0	62 JW	0	0
6	Anak Cacat ( AC )	1.871 JW	129	7	1.790 JW	6	7	2027 JW	19	0,94
	a. Cacat Tubuh	710 JW	80	11	718 JW	3	1	787 JW	11	1
	b. Cacat Rungu Wicara	348 JW	36	10	328 JW	1	1	341 JW	0	0

NO	TAHUN	2008			2009			2010		
		Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%	Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%	Pupulasi (KK/Jiwa)	Dilayani	%
	c. Cacat Netra	168 JW	13	8	154 JW	1	8	213 JW	0	0
	d. Cacat Mental Reterdasi	437 JW	0	0	370 JW	1	0	329 JW	0	0
	e. Cacat Mental Eks.Psikotik	34 JW	0	0	37 JW	0	0	131 JW	0	0
	f. Cacat Ganda	115 JW	0	0	154 JW	0	0	226 JW	8	
	g. Cacat Bibir Sumbing	59 JW	0	0	29 JW	0	0	0	0	0
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	7.660 KK	60	1	7.956 KK	60	1	7280 KK	40	
8	Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (WKTK)	642 JW	0	0	459 JW	0	0	352 JW	0	0
9	Lanjut Usia Terlantar ( LUT )	7.224 JW	0	0	7.733 JW	75	0	6498 JW	0	0
10	Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (LUTK)	2 JW	0	0	249 JW	0	0	232 JW	0	0
11	Penyandang Cacat ( PACA )	6.402 JW	212	3	5.993 JW	117	3	5676 JW	218	0,04
	a. Cacat Tubuh	2.533 JW	164	6	2.370 JW	101	6	2037 JW	218	
	b. Cacat Rungu Wicara	723 JW	0	0	680 JW	1	0	679 JW	0	0
	c. Cacat Netra	833 JW	5	1	785 JW	8	1	635 JW	0	0
	d. Cacat Mental Reterdasi	645 JW	4	1	638 JW	2	1	657 JW	0	0
	e. Cacat Mental Eks.Psikotik	298 JW	4	1	328 JW	5	1	457 JW	0	0
	f. Cacat Ganda	199 JW	17	9	195 JW	0	9	248 JW	0	0
	g. Cacat Bibir Sumbing	36 JW	1	3	30 JW	0	3	0	0	0
12	a. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis ( PACA BK )	1.056 JW	12	1	921 JW	0	1	963 JW	0	0
	b. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis ( Eks. Kusta )	79 JW	5	6	46 JW	0	6	0	0	0
13	Penyandang HIV / AIDS	19 JW	0	0	39 JW	0	0	143 JW	0	0
14	Tuna Susila ( TS )	466 JW	20	4	454 JW	0	4	593 JW	0	0
15	Pengemis	45 JW	0	0	29 JW	0	0	41 JW	4	9,5
16	Gelandangan	18 JW	0	0	3 JW	0	0	32 JW	12	
17	Bekas Narapidana	385 JW	25	6	381 JW	0	6	318 JW	0	0
18	Pekerja Migran Bermasalah ( PMB )	10 JW	0	0	27 JW	0	0	10 JW	0	0
19	Korban Penyalahgunaan NAPZA	55 JW	0	0	72 JW	0	0	58 JW	0	0
20	Keluarga Fakir Miskin ( KFM )	65.065 KK	500 KK	1	66.136 KK	0	1	62.363 KK	0	0
21	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	9.233 KK	10 KK	0,1	9.789 KK	0	0,1	9783 KK	113 KK	0,1
22	Keluarga Bermasalah Psikologis	367 KK	0	0	237 KK	0	0	352 KK	0	0
23	Keluarga Rentan	2.964 KK	0	0	2.963 KK	0	0	2779 KK	0	0
24	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	76 KK	76 KK	100	76 KK	0	0	76 KK	0	0
25	Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	0	0	0						
26	Korban Bencana Alam ( KBA )	444 JW	0	0	1.526 JW	168	0	55 KK	2 KK	3,6
27	Korban Bencana Sosial ( KBS )	29 JW	0	0	22 JW	0	0	0	0	0

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang



## 14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga.

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2005-2010 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal dari 75.003 tahun 2005 menjadi 87.140 tahun 2010 atau meningkat 16,18% per tahun. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.70**  
**Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal**

KLUJ	Setoran	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	Orang	3.857	3.665	3.665	3.445	4.723	2.910
II	Orang	133	174	174	21	21	126
III	Orang	63.994	67.906	67.906	76.327	132.619	75.311
IV	Orang	333	250	250	238	419	152
V	Orang	408	297	297	415	774	887
VI	Orang	2.536	2.957	2.957	2.689	2.742	2.885
VII	Orang	1.103	390	390	1.378	436	267
VIII	Orang	1.138	1.249	1.249	1.069	1.419	2.199
IX	Orang	1.501	1.552	1.552	1.379	1.126	2.403
Jumlah	Orang	75.003	78.440	78.440	85.582	144.279	87.140

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang

- b) Meningkatnya pelayanan tenaga kerja yang optimal dalam mendukung penempatan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.71**  
**Capaian Terciptanya Pelayanan Tenaga Kerja yang Optimal Untuk mendukung Penempatan Tenaga Kerja**

NO	Indikator	Set	2006	2007	2008	2009	2010
1	Antar Kerja Lokal (AKL)	Orang	1.897	3398	5.466	1.408	5.719
2	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Orang	6	3	0	0	0
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Orang	606	1136	1.077	967	738
4	Antar Kerja Khusus (AKSUS)	Orang	0	15	20	15	0
Jumlah			4.968	4.968	3.453	5.526	6.457

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang

- c) Tersedianya informasi pasar kerja yang menunjang ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang antara lain:
- Database ketenagakerjaan yang selalu uptodate setiap tahun.
  - Pelayanan kepada pencari kerja dengan penerbitan kartu kuning sebanyak 74.975 sampai dengan tahun 2010.
  - Terlaksananya analisa jabatan dan informasi jabatan sebanyak 62 orang sampai dengan tahun 2010.
  - Terlaksananya pemberdayaan bursa kerja khusus sebanyak 82 lembaga sampai dengan tahun 2010.

**Tabel 2.72**  
**Realisasi Terwujudnya Informasi Pasar Kerja**

NO	Indikator	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Tersusunnya Data Base KK dan RTKD	Dok		1	1	1	1	1
2	Layanan Pencari kerja	Orang	13.09 1	11.30 5	13.24 4	14.69 2	11.31 3	11.33 0
3	Penyebarluasan IPK secara konvensional dan on line	Kali		4	4	5	5	8
4	Terlaksananya Analisa Jabatan dan Informasi Jabatan	Orang/ SMK		4	20	25	8	5
5	Pemberdayaan Bursa Kerja Khusus	Lembag a	6	10	12	15	17	22

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Semarang

- d) Sampai dengan tahun 2010 kondisi pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Semarang cukup tinggi. Pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain krisis global, kurang harmonis hubungan karyawan dengan perusahaan dan tindakan indisipliner, sehingga memaksa perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Rincian karyawan yang di PHK sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.73**  
**Kondisi Pemutusan Hubungan Kerja**

Tahun	Kasus	Jumlah Tenaga Kerja	Upaya Penyelesaian			
			Bipartit	Persetujuan Bersama	PHI	Proses
2005	37	333	14	17	6	
2006	29	416	7	21	1	
2007	26	2.087	10	8	7	
2008	20	44	10	7	3	
2009	31	5447	21	8	2	
2010	37	150	11	22	3	1

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Semarang

- e) Menurunnya jumlah kasus dan tenaga kerja yang melakukan unjuk rasa. Pada tahun 2010 pemogokan kerja/unjuk rasa hanya 1 (satu) kasus yang melibatkan 45 tenaga kerja. Rincian kondisi mogok/unjuk rasa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.74**  
**Kondisi Mogok/Unjuk Rasa**

Tahun	Kasus	Jumlah Tenaga Kerja	Kerugian (Rp)	Jam Kerja yang Hilang
2005	3	570	330.000.000	5.505
2006	6	6289	329.934.950	58.706
2007	1	1200	-	4800
2008	1	235	20.000.000	14
2009	1	160	34.000.000	1.120
2010	1	45	241.000.000	45

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Semarang

- f) Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.75**  
**Kondisi Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	Keterangan	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,90	65,76	70,90	68,89	68,81	76,48
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,79	5,61	3,53	4,16	3,36	6,25
3	Rasio Penduduk Yang Bekerja	66,55	62,07	68,40	66,03	66,50	71,70
4	Rasio Ketergantungan	45,08	45,49	48,90	50,83	49,96	46,16

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

\*) Angka sementara

## 15. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan KUMKM (Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah) sangat strategis dalam perekonomian rakyat hal ini didasari kenyataan bahwa KUMKM cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, keberadaannya diharapkan mampu berperan nyata terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Capaian kinerja terkait urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya jumlah koperasi menjadi 622 atau 16,04% tahun 2010 dari 536 koperasi tahun 2005. Perkembangan jumlah koperasi tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.76**  
**Jumlah Koperasi di Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2005-2010**

No	Jenis	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	KUD	14	14	14	14	14	14
2	KPRI	104	105	106	107	107	107
3	Kopkar	69	69	70	70	70	70
4	KSU	22	37	45	69	77	84
5	Kopontren	12	12	12	13	13	13
6	KSP	8	9	10	12	13	22
7	Lain2	307	309	309	311	311	312
	<b>Jumlah</b>	<b>536</b>	<b>555</b>	<b>566</b>	<b>596</b>	<b>605</b>	<b>622</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang

- b) Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang terbina, dari 2.325 usaha pada tahun 2005 menjadi sebanyak 6.221 usaha pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 167,57%. Rincian daftar binaan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2010 tampak dalam tabel diberikut ini:

**Tabel 2.77**  
**Daftar Binaan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2010**

No	Bidang	Pengusaha Kecil (PK)	Pengusaha Menengah (PM)	Jumlah
1	Bidang Aneka Jasa	1.261	37	1.298
2	Bidang Perdagangan	1.676	62	1.738
3	Bidang Industri Pertanian	1.196	15	1.211
4	Bidang Industri Non Pertanian	1.174	19	1.193
5	Bidang Pertanian	776	5	781
	<b>Jumlah</b>	<b>6.083</b>	<b>138</b>	<b>6.221</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang

- c) Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dengan terbentuknya prakoperasi-prakoperasi baru, yang pada tahun 2010 sudah mencapai 886 prakoperasi.

**Tabel 2.78**  
**Perkembangan Prakoperasi Tahun 2005-2010**

No	Tahun	Penambahan	Jml Prakoperasi
1	2005	40	40
2	2006	173	213
3	2007	194	407
4	2008	220	627
5	2009	105	732
6	2010	154	886

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang

Prakoperasi-prakoperasi tersebut belum mampu menjadi koperasi karena tingginya dana yang harus dikeluarkan untuk menjadikannya berbadan hukum.

- d) Peningkatan volume usaha koperasi sebesar 142,45% yang pada tahun 2005 sebesar Rp.191.908.418.000,- menjadi Rp. 465.282.161.000,- pada tahun 2010. Ini berarti bahwa kepercayaan masyarakat/anggota pada koperasi meningkat.

**Tabel 2.79**  
**Volume Usaha Koperasi**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	Jenis	Volume Usaha (Rp.000)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	KUD	16,475,779	13,252,105	15,687,212	16,502,367	18,478,447	25.671.392
2	KPRI	8,892,623	8,247,580	9,367,523	10,119,904	10,163,585	19.927.760
3	Kopkar	96,923,159	103,279,200	124,749,867	125,603,987	124,826,854	215.833.295
4	KSU	28,199,210	40,165,404	60,823,003	62,814,773	63,055,356	124.697.731
5	Kopontren	706,466	904,252	1,277,255	1,340,407	1,343,772	2.130.380
6	KSP	33,509,026	37,238,778	42,710,010	44,918,382	44,048,218	69.470.265
7	Lain2	7,202,159	4,755,744	5,919,254	4,570,441	4,462,928	7.551.338
	Jumlah	191,998,418	207,843,863	260,534,124	269,870,361	266,379,160	465.282.161

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang

- e) Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP Kabupaten Semarang tahun 2010 dibandingkan tahun 2005 ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 2.80**  
**Penilaian Kesehatan KSP/USP**

No	Penilaian Kesehatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Koperasi Sehat	16	18	25	47	50	57
2	Koperasi Cukup Sehat	204	221	232	264	273	300
3	Koperasi Kurang Sehat	214	214	216	235	232	196
4	Koperasi Tidak Sehat	102	102	93	50	50	69
	Jumlah	536	555	566	596	605	622

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang

## 16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal dapat dijelaskan sesuai tabel berikut:

- Jumlah investasi yang masuk selama kurun waktu tahun 2005-2010 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.81**  
**Capaian Data Investasi Kabupaten Semarang**

NO	INVESTASI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	PROYEK						
	- PMA	1	3	5	2	10	3
	- PMDN	1	-	-	-	-	1
	- Non Fasilitas	601	778	794	848	421	585
	Jumlah	603	781	799	850	431	589

**Tabel 2.81**  
**Capaian Data Investasi Kabupaten Semarang**

NO	INVESTASI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
2	NILAI INVESTASI						
	- PMA (ribuan)	4.572.500	22.298.000	56.014.000	61.640.000	225.500.000	79.500.000
	- PMDN (ribuan)	46.000.000	-	-	-	-	63.076.000
	- Non Fasilitas (ribuan)	219.927.218,6	116.876.000	134.878.000	258.000.000	984.000	213.220.000
	Jumlah Investasi (ribuan)	270.499.718,6	139.174.000	190.922.000	319.640.000	226.484.000	355.796.000

Sumber : KPPT Kabupaten Semarang

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terus meningkat. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 225.500.000.000,00 dengan masuknya 10 proyek PMA di Kabupaten Semarang. Kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2010 sebanyak 24 proyek PMA dengan total nilai investasi sebesar Rp. 449.554.500.000,-

Sedangkan proyek investasi PMDN hanya 2 proyek, total nilai investasi sebesar Rp. 109.076.000.000,-. Hal ini disebabkan sangat minimnya fasilitas PMDN terkait dengan insentif fiskal (tidak ada keringanan pajak, bea masuk untuk peralatan, suku cadang, dan bahan baku), sehingga kurang diminati investor.

Proyek dan nilai investasi non fasilitas secara umum mengalami peningkatan fluktuatif, sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 943.885.218.600,-. Sehingga selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 total nilai investasi baik PMA, PMDN maupun Non Fasilitas yang mendukung perekonomian Kabupaten Semarang adalah sebesar Rp. 1.502.515.718.600,-.

2. Jumlah perijinan yang dilayani:

**Tabel 2.82**  
**Jumlah Data Perijinan yang Diterbitkan**  
**Sampai Dengan Tahun 2010**

KOD	URAIAN	SAT	TAHUN					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>I</b>	<b>IMB</b>							
1	Jumlah Ijin	Buah	376	221	283	291	221	354
2	Nilai Retribusi	Rp	584.104.000	634.818.000	668.398.000	700.541.000	547.821.445	831.748.603
<b>II</b>	<b>IPLC</b>							
1	Jumlah Ijin	Buah	5	10	3	5	8	5
2	Nilai Retribusi	Rp	2.325.000	4.650.000	1.395.000	2.325.000	6.510.000	2.325.000

Sumber : KPPT Kabupaten Semarang

Penerbitan ijin mendirikan bangunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 fluktuatif, peningkatan nilai retribusi sangat signifikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 283.927.158,- menjadi Rp. 831.748.603,- dari tahun 2009 sebesar Rp. 547.821.445,-. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Penerbitan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sampai dengan tahun 2010 juga mengalami fluktuasi, baik jumlah ijin maupun nilai retribusinya.

3. Dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan mekanisme yang sederhana antara lain sebagai berikut :
- Proses pengurusan perijinan kegiatan industri secara terpadu meliputi IMB, Ijin Gangguan/HO, Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Daftar Perusahaan (TDP) dan Ijin Usaha Industri/TDI, memakan waktu maksimal 14 hari lebih cepat dibandingkan Peraturan Daerah nya yaitu maksimal 29 hari.



- Pengurusan Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Baru dan perpanjangan, Ijin Pemakaman, Ijin Pengabuan Mayat dan Pemindahan Mayat/Kerangka hanya membutuhkan waktu penyelesaian 2 hari sedangkan dalam Peraturan Daerah ditetapkan 3 hari kerja.
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri membutuhkan 3 (tiga) hari penyelesaian, sedangkan menurut perda ditetapkan 5 hari kerja.
  - Ijin usaha akomodasi, ijin usaha rumah makan, ijin usaha obyek dan daya tarik wisata, ijin usaha rekreasi dan hiburan, ijin usaha penangkapan ikan, ijin usaha pertambangan bahan galian golongan c, reklame dan ijin pengelolaan sumber daya ikan diperlukan waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari, sesuai dengan perda yang ditetapkan.
  - Untuk ijin trayek diperlukan waktu 10 (sepuluh) hari, lebih cepat dibandingkan perda selama 14 hari.
  - Untuk ijin lokasi, ijin gangguan, ijin usaha peternakan dan TDUP serta ijin pembuangan limbah cair ke lingkungan diperlukan waktu 14 (empat belas) hari.
4. Dalam rangka menarik investor masuk ke Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah melalui KPPT memberikan insentif kepada calon investor sebagai wujud dari penyelenggaraan pemerintahan pro investasi dengan membebaskan biaya retribusi untuk 15 jenis ijin, sebagai berikut :

- a. Ijin Usaha Industri
- b. Ijin Usaha Akomodasi
- c. Ijin Usaha Rumah Makan
- d. Ijin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
- e. Ijin Reklame
- f. Ijin Tanda Daftar Gudang
- g. Ijin Tanda Daftar Industri
- h. Ijin Gallan C
- i. Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan
- j. Tanda Daftar Perusahaan
- k. Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- l. Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
- m. Ijin Usaha Perdagangan
- n. Ijin Pengolahan Air Tanah
- o. SIUP Minuman Keras Beralkohol (MKB)

## **17. Urusan Wajib Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan satu kesatuan didalam pengembangan kesenian di Kabupaten Semarang, memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat, maupun kreatifitas seniman dan seniwatinya.

Capaian kinerja pembangunan urusan kebudayaan, sebagai berikut :

1. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah serta nilai-nilai tradisional memperkuat jati diri daerah, yang diwujudkan dengan terlaksananya kegiatan upacara adat. Berikut perkembangan data upacara adat yang dilestarikan olah masyarakat Kabupaten Semarang dari tahun 2005-2010.

**Tabel 2.83**  
**Data Upacara Adat Masyarakat Kab. Semarang**  
**Tahun 2005-2010**

No	Kecamatan	Sat	Kondisi Awal 2005	Tahun				
				2006	2007	2008	2009	2010
1	Ambarawa	Keg	9	9	9	9	5	23
2	Bancak	Keg	4	4	4	4	9	36
3	Bandungan	Keg	-	-	-	-	7	13
4	Banyubiru	Keg	8	8	8	8	2	3
5	Bawen	Keg	8		8	8	4	12
6	Bergas	Keg	4	4	4	4	4	25
7	Bringin	Keg	4	4	4	4	6	42
8	Getasan	Keg	5	5	5	5	2	17
9	Kaliwungu	Keg	5	6	6	6	15	49
10	Jambu	Keg	5	5	5	5	5	14
11	Pabelan	Keg	5	5	5	5	11	68
12	Pringapus	Keg	4		4	4	4	20
13	Sumowono	Keg	3	3	3	3		
14	Suruh	Keg	7	7	7	7	5	10
15	Susukan	Keg	6	5	5	5	5	13
16	Tengaran	Keg	7	7	7	7	8	52
17	Tuntang	Keg	3	3	3	3	5	15
18	Ungaran Barat	Keg	6	6	6	6	5	6
19	Ungaran Timur	Keg	-	-	-	-	4	5
JUMLAH			93	81	93	93	106	433

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

Dari tabel diatas dapat dilihat, kurun waktu 2005 – 2010 upaya pelestarian upacara adat meningkat sangat signifikan sebanyak 340 kegiatan, dari 93 kegiatan pada tahun 2005 menjadi 433 kegiatan pada tahun 2010. Perkembangan upacara adat mendapat dukungan dari pemerintah daerah berupa bantuan keuangan dan efektifnya para pamong budaya dalam menjalankan tugas sehingga masyarakat termotivasi untuk melestarikan.

2. Perawatan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB) dan situs bersejarah di Kabupaten Semarang sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.84**  
**Benda Cagar Budaya dan Situs Bersejarah Kabupaten Semarang**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KONDISI</b>
1	Candi Ngempon	Kec. Bergas	Terawat
2	Candi Klero	kec. Tengaran	Terawat
3	Candi Gedongsongo	Kec. Bandungan	Terawat
4	Candi Sari	Kec. Pringapus	Terawat
5	Candi Brawijaya	Kec. Banyubiru	Terawat
6	Situs Candi Kalitaman	kec. Bergas	Tidak Terawat
7	Benteng Willem II	Kec. Ungaran	Tidak Terawat
8	Benteng Willem I	Kec. Ambarawa	Terawat
9	Masjid Nyatnyono	Kec. Ungaran Barat	Terawat
10	Masjid Wali Kutub	Kec.Susukan	Terawat
11	Masjid Gogodalem	Kec.Bringin	Terawat
12	Masjid Bermenara	Kec.Suruh	Terawat
13	Gereja Jago	Kec. Ambarawa	Terawat
14	Gereja Kristen Jateng Utara	Kec. Bringin	Terawat
15	Monumen Lemah Abang	Kec. Bergas	Terawat
16	Monumen Gencatan Senjata	Kec. Pringapus	Terawat
17	Monumen Isdiman	Kec. Jambu	Terawat
18	Monumen Tentara Rakyat Mataram	Kec. Jambu	Terawat
19	Monumen Pager	Kec. Kallwungu	Terawat
20	Monumen Isdiman	Kec. Ambarawa	Terawat
21	MonumenKadipiro	Kec. Ambarawa	Terawat
22	Klenteng	Kec. Ambarawa	Terawat
23	Gedung Kuning	Kec. Ungaran Barat	Tidak Terawat
24	Gedung Korsik	Kec. Ungaran Barat	Tidak Terawat
25	Gedung SMP I Ungaran	Kec. Ungaran Barat	Terawat
26	Rumah Tinggal Gatot Subroto	Kec. Ungaran Barat	Terawat
27	Rumah Singgah Jenderal Sudirman	Kec. Jambu	Tidak Terawat
28	Makam Waliyullah Khasan Munadi	Kec.Ungaran Barat	Terawat
29	Makam Dr.Tjipto Mangunkusumo	Kec. Ambarawa	Terawat
30	Makam Gatot Subroto	Kec. Ungaran Timur	Terawat
31	Makam Kyai Gusti	Kec.Sumowono	Terawat
32	Makam Kyai Ageng Cukil Wonokusumo	Kec.Suruh	Terawat

NO	NAMA	LOKASI	KONDISI
33	Makam Sekar Sinumpet	Kec.Susukan	Terawat
34	Makam Ki Ageng Alim	Kec.Kaliwungu	Terawat
35	Makam Syeh Gozali	Kec.Ambarawa	Terawat
36	Makam Nitinegoro	Kec.Bringin	Terawat
37	Makam Nyai Ageng Kebokanigoro	Kec.Tengaran	Terawat
38	Makam Syeh Gozali	Kec.Bergas	Terawat
39	Makam Syeh Basyarudin	Kec.Pringapus	Terawat
40	Makam Syeh Jago	Kec.Bergas	Terawat
41	Makam Gunung Sadang	Kec.Pabelan	Terawat
42	Museum Isdiman	Kec. Ambarawa	Terawat
43	Museum Kereta Api Ambarawa	Kec.Ambarawa	Terawat
44	Prasasti Tajuk	Kec.Getasan	Terawat
45	Prasasti Ngrawan	Kec.Getasan	Terawat
46	Prasasti Sakowolu	Kec.Getasan	Terawat
47	Prasati Klero	Kec.Tengaran	Terawat
48	Prasasti Watu lawang	Kec.Getasan	Tidak Terawat
49	Pintu Air Jelok	Kec.Tuntang	Terawat
50	Petirtaan Derekan	Kec.Pringapus	Terawat
51	Petirtaan Muncul	Kec.Banyubiru	Terawat
52	Stasiun Kereta Api Ambarawa	Kec. Ambarawa	Terawat
53	Stasiun Kereta Api Bedono	Kec.Jambu	Terawat
54	Stasiun Kereta Api Bringin	Kec.Bringin	Terawat
55	Stasiun Kereta Api Jambu	Kec.Jambu	Terawat
56	Stasiun Kereta Api Tuntang	Kec.Tuntang	Terawat
57	Api Abadi Gunung Kendil	Kec.Bringin	Tdk Terawat
58	Lingga Bukit Cinta	Kec.Banyubiru	Terawat
59	Lingga di PTP Getas	Kec.Pabelan	Tdk Terawat
60	Lingga Kunto Bimo	Kec.Sumowono	Terawat
61	Lingga Bandungan	Kec.Bandung	Tdk Terawat
62	Lingga Candigarón	Kec.Bandung	Tdk Terawat
63	Lingga Bantir	Kec.Sumowono	Tdk Terawat
64	Lingga Banyukuning	Kec.bandungan	Tdk Terawat
65	Lingga Kauman Lor	Kec.Pabelan	Tdk Terawat
66	Lingga Candi Asu	Kec.Sumowono	Terawat

NO	NAMA	LOKASI	KONDISI
67	Lingga Kompleks Gedong Songo	Kec.Bandungan	Terawat
68	Lingga Kompleks Klero	Kec.Tengaran	Terawat
69	Lingga Kompleks Candi Ngempon	Kec.Bergas	Terawat
70	Lingga PTP Getas	Kec.Pabelan	Terawat
71	Yoni Jambon	Kec.Ungaran Barat	Terawat
72	Yoni Slumprit	Kec.Ungaran Barat	Terawat
73	Yoni Wujil (4)	Kec.Bergas	Tdk Terawat
74	Yoni Doplang (2)	Kec.Bawen	Terawat
75	Yoni Nglarangan (2)	Kec. Ambarawa	Tdk Terawat
76	Yoni Candigaron	Kec.Sumowono	Tdk Terawat
77	Yoni Bedono	Kec.Jambu	Terawat
78	Yoni Cebur (Kalibeji)	Kec.Turtang	Terawat
79	Yoni Candirejo	Kec.Ungaran Barat	Tdk Terawat
80	Yoni Harjosari	Kec.Bawen	Tdk Terawat
81	Yoni Krajan Bedono	Kec.Jambu	Tdk Terawat
82	Yoni Nyemoh	Kec.Bringin	Tdk Terawat
83	Yoni Wonorejo	Kec.Pringapus	Tdk Terawat
84	Yoni Candi Asu	Kec.Bandungan	Terawat
85	Yoni Kompleks Gedongsongo	Kec.Bandungan	Terawat
86	Yoni Candirejo Tuntang	Kec.Tuntang	Tdk Terawat
87	Yoni Karangpawon Candirejo	Kec.Tuntang	Tdk Terawat
88	Yoni Kompleks Gedongsongo	Kec.Bandungan	Terawat
89	Yoni Kemiri	Kec.Suruh	Tdk Terawat
90	Yoni Kauman	Kec.Suruh	Tdk Terawat
91	Yoni Getas Pabelan	Kec.Pabelan	Tdk Terawat
92	Yoni Kompleks Ngempon	Kec.Bergas	Terawat
93	Yoni Kadipro	Kec. Ambarawa	Tdk Terawat
94	Yoni Kompleks Klero	Kec.Tengaran	Terawat
95	Al Quran Blawong (2)	Kec.Bringin	Terawat
96	Al Quran Blawong	Kec.Pringapus	Terawat
97	Arca Dewi Tara	Kec.Ungaran Barat	Terawat
98	Arca Kompleks Gedongsongo (10)	Kec.Bandungan	Terawat
99	Arca Ganesha (4)	Kec.Pringapus	Terawat
100	Arca Nandi Candirejo	Kec.Ungaran Barat	Tidak Terawat

NO	NAMA	LOKASI	KONDISI
101	Arca Nandi Lembu	Kec.Bringin	Tidak Terawat
102	Arca Dewa	Kec.Bringin	Tidak Terawat
103	Arca Dewa Wisnu	Kec.Banyubiru	Tidak Terawat
104	Arca Nandi Ngrapah	Kec.Banyubiru	Tidak Terawat
105	Nandi Wonorejo	Kec.Pringapus	Tidak Terawat
106	Ganesa Ngimbun	Kec.Bergas	Tidak Terawat
107	Ganesa Dul Jalal	Kec.Bergas	Tidak Terawat
108	Nandi Karangtalun	Kec.Bandungan	Tidak Terawat
109	Arca Kompleks Klero	Kec.Tengaran	Terawat
110	Arca Tegalwatan	Kec.Tengaran	Terawat
111	Umpak Kompleks Candi Gd.Sanga	Kec.Bandungan	Terawat
112	Umpak Kompleks Candi Ngempon	Kec.Bergas	Terawat
113	Umpak Situs Duren	Kec.Bandungan	Terawat
114	Umpak Wujil	Kec.Bergas	Terawat
115	Umpak Kompleks Candi Brawijaya	Kec.Banyubiru	Terawat
116	Umpak Kenteng	Kec.Susukan	Tidak Terawat
117	Petirtaan Kalimah Toyibah	Kec.Ungaran Barat	Terawat
118	Petirtaan Derekan	Kec. Pringapus	Tidak Terawat
119	Situs Merakrejo	Kec. Bawen	Tidak Terawat
120	Situs Watukodok	Kec. Sumowono	Tidak Terawat
121	Balai panjang	Kec.Suruh	Terawat
122	Balai panjang	Kec.Suruh	Terawat
123	Mata Uang ( 287 )	Kec.Bandungan	Terawat
124	Mimbar	Kec.Bringin	Terawat
125	Lonceng	Kec.Bringin	Terawat
126	Mimbar	Kec. Ambarawa	Terawat
127	Lonceng Gereja	Kec. Ambarawa	Terawat
128	Salib kuno bertuliskan huruf jawa	Kec.Bringin	Terawat

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

Upaya pelestarian benda cagar budaya dan situs bersejarah, antara lain :

- a. Pada tahun 2006 dilaksanakan sosialisasi dan koordinasi pada penduduk di sekitar Benteng Williem II tentang rencana akan

dialihfungsikan menjadi kantor atau museum, sehingga benteng tersebut akan terpelihara dengan baik.

- b. Pembangunan fisik berupa pembuatan pagar keliling di situs Ngempon dan Candi Klero. Banyak situs-situs di Kabupaten Semarang yang memerlukan perhatian dan revitalisasi.
3. Penyebarluasan kandungan nilai-nilai budaya dan sejarah kepada masyarakat luas berupa penyusunan Buku Sejarah Palagan sejumlah 1100, lomba cerita rakyat Kabupaten Semarang. Hasilnya telah didistribusikan melalui sekolah-sekolah maupun Kecamatan. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan penelusuran sejarah Kabupaten Semarang, untuk mengetahui hari jadi Kabupaten Semarang. Hasil penelusuran sejarah Kabupaten Semarang telah digandakan sebanyak 650 dan didistribusi ke Kecamatan maupun sekolah.
4. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis (PPTT) bidang kebudayaan. Kurun waktu 2005-2010 telah dilaksanakan kegiatan PPTT seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.85**  
**Kegiatan PPTT Bidang Kebudayaan**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	JENIS PPTT	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	PPTT Seni Tari	51		60	60	60	
2	PPTT Karawitan	51			60		
3	PPTT Menyanyi Solo	51					
4	PPTT Kethoprak			60			
5	PPTT Band			60			
6	PPTT Lukis				60		
7	PPTT Musik						60
8	PPTT Perawatan BCB	40	40	40		40	80
9	PPTT Kesejarahan	40			40	40	
10	Penyuluhan BCB	40	50	50			
11	PPTT Permuseuman	50	50	50	50		50

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang



Kegiatan PPTT bidang kebudayaan dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan para seniman-seniwati dibidangnya. Perkembangan seniman-seniwati dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.86**  
**Data Seniman dan Seniwati Kabupaten Semarang**

NO	KESENIAN	SAT	KONDISI AWAL 2005	TAHUN				
				2006	2007	2008	2009	2010
1	SENI SUARA	orang	9.334	9.929	9.993	9.995	11.690	11.739
2	SENI GERAK	orang	8.387	8.681	8.972	8.977	11.970	12.031
3	SENI TEATER	orang	5.597	5.859	5.871	5.871	6.192	6.239
4	SENI RUPA	orang	409	449	439	450	450	450
	<b>JUMLAH</b>		<b>23.727</b>	<b>24.918</b>	<b>25.275</b>	<b>25.293</b>	<b>30.302</b>	<b>30.459</b>

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

Pada tabel tampak adanya peningkatan jumlah seniman-seniwati untuk masing-masing jenis kesenian. Pelaksanaan PPTT yang belum dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2010 adalah PPTT seni teater.

- Perkembangan seniman-seniwati tidak diikuti oleh perkembangan group-group kesenian, seperti diperlihatkan tabel dibawah :

**Tabel 2.87**  
**Data Group Kesenian Kab. Semarang**  
**Tahun 2005-2010**

NO	NAMA GROUP KESENIAN	SAT	KONDISI AWAL 2005	TAHUN				
				2006	2007	2008	2009	2010
1	Samproh	group	55	55	55	55	55	55
2	Campursari	group	30	39	37	37	49	55
3	Karawitan	group	60	66	64	64	50	55
4	Berjanji	group	89	89	88	88	88	88
5	Terbang/Rebana	group	237	259	257	257	310	314
6	Band	group	23	23	22	22	10	12

NO	NAMA GROUP KESENIAN	SAT	KONDISI AWAL 2005	TAHUN				
				2006	2007	2008	2009	2010
7	Orkes Melayu	group	127	145	140	140	94	105
8	Keroncong	group	62	62	60	60	18	19
9	Macapat	group					2	2
10	Solo Organ	group					14	14
11	Thongking	group					1	1
12	Totekan Lesung	group					1	2
13	Angklung	group					4	4
14	Beladiri	group	42	42	41	41	2	2
15	Kuntulan/Kubro Siswo	group	3	3	3	3	3	3
16	Kentrung	group	14	14	13	13	1	1
17	Rodat	group	33	33	33	33	10	10
18	Kuda Lumping	group	222	235	231	233	184	205
19	Prajuritan	group	114	114	117	117	20	21
20	Tari Daerah	group	19	20	20	20	10	13
21	Balajad	group					1	1
22	Soreng	group					1	1
23	Warokan	group					7	9
24	Jemblungan	group					1	2
25	Angguk	group					2	2
26	Najrak	group	4	4	4	4	4	4
27	Nok Nik	group	6	6	6	6	4	4

NO	NAMA GROUP KESENIAN	SAT	KONDISI AWAL 2005	TAHUN				
				2006	2007	2008	2009	2010
28	Pedalangan	group	77	84	80	83	11	12
29	Wayang Orang	group	20	21	20	20	1	1
30	Wayang Kulit	group					2	2
31	Sandiwara	group	8	8	7	7	3	3
32	Kethoprak	group	145	154	150	154	55	58
33	Sandul	group					1	1
	JUMLAH	group	1390	1476	1448	1457	1019	1081

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

## 18. Urusan Wajib Pemuda Dan Olahraga

Pembangunan sektor olahraga di Kabupaten Semarang belum bisa sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini perlu dikaji agar ke depan kegiatan olahraga di Kabupaten Semarang dapat menjadi salah satu ikon penting dalam mengangkat nama daerah.

Keberadaan *training camp* untuk seluruh cabang olahraga sudah ada di kecamatan, sebagaimana tampak pada Tabel berikut :

**Tabel 2.88**  
**Training Camp Olah Raga di Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2009-2010**

NO	CABANG OLAHRAGA	2009		2010	
		TEMPAT	JML ATLET	TEMPAT	JML ATLET
1	Bola voli SMP, SMA putri	Ungaran	21	Ungaran	21
2	Bola voli SMP putri	Ungaran	20	Ungaran	20
3	Bola voli mini putri	Tuntang	25	Tuntang	25
4	Bola voli SMP, SMA putra	-	-	-	-
5	Sepakbola SD	Pabelan	20	Pabelan	20
6	Sepakbola SMP	Pabelan	32	Pabelan	32
7	Sepakbola SMA	Pabelan	20	Pabelan	20

NO	CABANG OLAHRAGA	2009		2010	
		TEMPAT	JML ATLIT	TEMPAT	JML ATLIT
8	Tenis meja SD	Ambarawa	20	Ambarawa	20
9	Bulu tangkis SD	Ungaran	25	Ungaran	25
10	Tenis lapangan	Ambarawa	20	Ambarawa	20
11	Sepak takraw	Tengaran	10	Tengaran	10
12	Pencak silat	-	-	-	-
14	catur	Bergas	6	Bergas	
15	Bola basket	-	-	-	-
16	Atletik	-	-	-	-
17	Senam Prestasi	Ungaran	18	Ungaran	18
18	Taekwondo	Ungaran	20	Ungaran	20
19	Renang	Tuntang	16	Tuntang	16
20	Sepakbola	Bancak	20	Bancak	20
21	Sepakbola	Tengaran	20	Tengaran	20
22	Sepakbola	Pringapus	20	Pringapus	20
23	Sepakbola	Bergas	20	Bergas	20
24	Karate	Ungaran	20	Ungaran	20
25	Renang	Ungaran	27	Ungaran	27
26	Sepak Takraw	Bergas	20	Bergas	20
	<b>Jumlah</b>		<b>420</b>		<b>414</b>

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

Pemusatan latihan bagi cabang olahraga unggulan sudah dilaksanakan namun belum optimal, sehingga perlu dioptimalkan untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam menyiapkan bibit-bibit cabang olahraga.

Jumlah pelatih belum memadai berdasarkan data keolahragaan. Pada tahun 2005 jumlah pelatih di Kabupaten Semarang adalah 293 orang dari 11 cabang olahraga.

Capain kinerja urusan pemuda dan olahraga sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah gelanggang/balai remaja sampai dengan tahun 2010 sebesar 10,9 per 10.000 penduduk. Sedang rasio lapangan olahraga

sebesar 21,8 per 10.000 penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.89**  
**Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemuda dan Olahraga**  
**Tahun 2005-April 2010**

NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA 5 TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga :					
	a. Rasio Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta *)	0,0011	0,0011	0,0011	0,00109	0,00109
	b. Rasio Lapangan Olahraga *)	0,0022	0,00221	0,00219	0,00218	0,00218

Sumber : Dinas Pemuda,OR, Kebudayaan dan Pariwisata

\*) Jumlah gelanggang/lapangan dibagi jumlah Penduduk X 10.000

2) Kontingen Kabupaten Semarang berhasil meraih prestasi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.90**  
**Tingkatan Prestasi Olahraga (Pelajar) Tahun 2009-2010**

NO	KEGIATAN	CAPAIAN TAHUN 2009				JML	CAPAIAN TAHUN 2010			JML
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	EMAS		PERAK	PERUNGGU		
1	pekan olahrag pelajar daerah (POPDA) SD	-	-	-	-	1	-	2	3	
2	pekan olahrag pelajar daerah (POPDA) SMP	2	3	1	6	-	-	-	-	
3	pekan olahrag pelajar daerah (POPDA) SMA	2	3	2	7	1	1	1	3	
4	Kejurnas karate	1	-	-	1	4	3	7	14	
5	kejurnas catur	1	1	2	4					
6	kejurda / kejurnas bola voli	1	1	-	2	3	1	-	4	
7	BAPOPSI catur	1	-	-	1	1	-	-	1	
8	kejurda invitasi pelajar SMA	2	4	1	7	1	1	-	2	
9	kejurda piala bupati semarang	4	4	2	10	-	-	-	-	

NO	KEGIATAN	CAPAIAN TAHUN 2009			JML	CAPAIAN TAHUN 2010			JML
		EMAS	PERAK	PERUNGGU		EMAS	PERAK	PERUNGGU	
10	kejurnas taekwondo	1	2	-	3	1	-	-	1
11	kejurda judo pelajar	3	2	5	10	-	-	-	1
12	kejurda voli	1	1	2	4	2	1	-	3
13	kejurnas voli	-	2	-	2	1	-	-	1
14	invitasi pelajar karate	2	5	2	9	-	-	-	-
15	POPNAS (pekan olahraga pelajar nasional)	-	2	2	4	-	-	-	-
16	POSPEDA (pekan olahraga pondok pesantren)	5	7	-	12	-	-	-	-
17	kejurda senam (SKJ)	1	-	-	1	1	-	-	1
18	kejurda karate	3	2	2	7	9	3	2	14
19	invitasi pelajar judo	2	1	1	4	-	-	-	-
20	PORPROV (pekan olahraga provinsi)	17			17	-	-	-	-
Total perolehan medali		49	40	22	111	25	10	12	48

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

- 3) Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.91 berikut:

**Tabel 2.91**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010**

No	Kegiatan	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Giat	1	2	2	3	3
		Orang	75	75	90	75	75
		Lokasi	18	18	18	10	10
2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Giat	1	1	1	2	2
		Orang	45	45	50	100	100

No	Kegiatan	Status	2005	2007	2008	2009	2010
3	Pekan Tamu Wicara Organisasi Pemuda	Giat	0	0	1	0	0
4	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Giat Orang	0 0	0 0	1 50	5 84	4 83
5	Pameran Prestasi Hasil	Giat Orang	0 0	0 0	1 50	0 0	0 0

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

## 19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi.

Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak merasa kalah atau dirugikan.

Capaian Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2005-2010 sebagai berikut :

- 1) Penegakan perda, peraturan kepala daerah, dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut jumlah pelanggaran yang ditemukan dan tertangani Tahun 2005 - 2010 yaitu :

**Tabel 2.92**  
**Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	Jenis Pelanggaran	Sat	2005	Tertangani	2006	Tertangani	2007	Tertangani	2008	Tertangani	2009	Tertangani	2010	Tertangani
1	Ijin Mendirikan Bangunan	kali	29	10	179	151	165	143	114	85	44	44	56	56
2	Ijin Gangguan	kali	60	30	327	306	203	178	111	103	78	76	88	88
3	Reklame	kali	33	20	364	310	642	479	519	430	350	350	456	456
4	Pedagang Kaki Lima	kali	90	31	587	356	433	381	369	285	154	150	124	115
5	Galken Golongan C	kali	19	7	-	-	6	6	1	1	9	9	10	10
6	Minuman Keras (Miras)	kali	22	11	36	25	39	27	23	19	18	16	8	8
7	Rekreasi dan Hiburan	kali	37	35	-	-	22	22	24	24	9	9	7	7
8	WTS dan Gelandangan	kali	15	6	425	364	492	317	507	410	60	48	52	50

Sumber: Satpol PP Kabupaten Semarang

Melalui kegiatan tersebut selama tahun 2010 ditemukan 801 kasus pelanggaran Peraturan Daerah, dan dapat tertangani sejumlah 790 pelanggaran.

2) Gangguan Tramtibum Tahun 2005-2010

**Tabel 2.93**  
**Kegiatan Tramtibum Tahun 2005-2010**

No.	Urutan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>1.</b>	<b>Angka Gangguan Tramtibum</b>						
	1. Miras	1	1	4	6	1	2
	2. Narkoba	2	1	1	2	1	-
	3. Daun Ganja	2	-	1	-	-	-
	4. Pengemis	1	-	2	2	2	1
	5. Gelandangan	2	1	3	3	7	2
	6. Pedagang Kaki Lima	6	2	4	7	12	4
	7. Pornografi	-	-	-	-	-	-
	8. Wanita Tuna Susila	5	2	4	4	2	9
	9. Manipulasi	-	-	-	-	-	-
	10. Selundupan	-	-	-	-	-	-
	11. Penimbunan	-	-	-	-	-	-
	12. Palsu Uang	1	-	3	2	-	-



No.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	13.Kekeringan	-	-	3	1	-	-
	14.Kecelakaan	1	8	1	2	3	-
	15.Tanah Longsor	1	-	-	4	-	-
	16.Angin Topan	-	-	-	1	-	-
	17.Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-
	18.Gas beracun	1	-	-	-	-	-
	19.Banjir	-	-	1	2	-	-
	20.Perkelahian	3	1	2	4	-	-
	21.Keracunan	1	1	-	-	-	-
	22.Bunuh Diri	2	2	-	3	1	-
	23.Kasus Tanah	-	-	1	4	1	-
	24.Ujuk Rasa	1	-	3	2	1	-
	25.Perkosaan	1	1	-	3	1	-
	26.Kebakaran	2	1	3	5	2	-
	27.Anlaya Berat	-	-	-	2	-	-
	28.Perampokan	-	-	-	1	-	-
	29.Pencurian	1	1	2	5	1	-
	30.Pembunuhan	1	1	3	5	1	-
<b>2.</b>	<b>Keg. Pemeliharaan Tramtibum</b>						
	a. Piket obyek vital Kab. Semarang (hari)	365	365	365	365	365	365
	b. Patroli Kota (kali)	24	24	24	24	24	24
	c. Patroli Wilayah (kali)	36	36	36	36	36	36
	d. Tramtibum HUT RI (hari)	3	3	3	3	3	3
	e. Tramtibum Bulan Romadhon (hari)	18	18	18	18	18	18
	f. Tramtibum Idul Fitri (hari)	16	16	16	16	16	16
	g. Tramtibum HUT Kota Ungaran (hari)	1	1	1	1	1	1
	h. Tramtibum Natal & Tahun Baru (hari)	2	2	2	2	2	2
	i. Tramtibum Unit Kerja Lain (kali)	48	48	48	48	48	48
	j. Patroli kesiagaan penjaga malam (hari)	365	365	365	365	365	365

No.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
3.	<b>Keg. Pembinaan &amp; Penyuluhan</b>						
	a. Pembinaan Penyuluhan PKL (org)	200	200	200	200	200	200
	b. Pembinaan Penyuluhan tentang Trantibmas terhadap Tokoh Masyarakat. (org)	200	200	200	200	200	200

Sumber: Satpol PP Kab. Semarang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Satpol PP, pada tahun 2010 Angka Gangguan Trantibum yang ditangani Satpol PP hanya Miras, Pengemis, Gelandangan, Pedagang Kaki Lima, dan Wanita Tuna Susila.

- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat, dilakukan melalui sosialisasi peraturan/ketentuan terkait.
- 4) Penanganan bencana alam yang lebih responsif melalui pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana maupun koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait.

## **20. Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.**

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian secara umum dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Urusan ini sebelum terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 bernama urusan pemerintahan umum.

Dalam urusan politik dalam negeri, hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi (sesuai UU No.32 Tahun 2004). Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung. Partisipasi masyarakat untuk bidang politik diwakili dalam bentuk partai politik di lembaga legislatif Kabupaten Semarang sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.94**  
**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Semarang**  
**Berdasarkan Partai Politik**

No	PARTAI	TAHUN																	
		2005			2006			2007			2008			2009			2010		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	PDI-P	12	-	12	12	-	12	12	-	12	12	-	12	7	1	8	7	1	8
2	Partai Golkar	7	1	8	7	1	8	7	1	8	7	1	8	4	1	5	4	1	5
3	PPP	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	3	2	5	3	2	5
4	PAN	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
5	PKB	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	4	1	5	4	1	5

NO	PARTAI	TAHUN																	
		2005			2006			2007			2008			2009			2010		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
6	Partai Keadilan Sejahtera	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	3	1	4	3	1	4
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	-	1	1	-	1	1
8	Partai Demokrat	3	-	3	3	-	3	3	-	3	2	1	3	3	3	6	3	3	6
9	Partai Gerindra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
10	Partai Hanura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	3
	JUMLAH	43	2	45	43	2	45	43	2	45	42	3	45	35	10	45	35	10	45

Sumber: Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk dapat menggali potensi daerah antara lain menjalin kerjasama dengan daerah lain, Pihak Ketiga maupun Luar Negeri; menyederhanakan birokrasi perijinan; menetapkan dan menegaskan batas daerah dalam rangka mengantisipasi konflik dengan daerah perbatasan; meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintahan; serta melakukan pengawasan internal dan eksternal, pengawasan masyarakat/sosial, dan pengawasan melekat (built in control)

Capaian Kinerja pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian selama tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Hukum

Bahwa pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya atau proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). Upaya dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus dalam rangka mewujudkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur

pemerintah dan masyarakat, tertib hukum serta mewujudkan situasi daerah yang kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menata Peraturan Perundang-undangan yang diimplementasikan.

Capaian kinerja dalam bidang pembangunan hukum adalah terbitnya produk-produk hukum seperti pada Tabel berikut :

**Tabel 2.95**  
**Capaian Produk Hukum Daerah**

No	Jenis Peraturan	Jumlah Produk Hukum					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Peraturan Daerah	32	27	13	26	7	12
2	Peraturan Bupati	33	29	38	72	87	113
3	Keputusan Bupati	606	750	705	546	535	629
4	Peraturan Desa	-	-	21	46	213	400

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Semarang

Produk hukum daerah sampai dengan tahun 2010 sebanyak 117 Peraturan Daerah, 372 Peraturan Bupati, 3.771 Keputusan Bupati dan 680 Peraturan Desa.

b. Pengawasan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai norma dan standar audit pemerintahan. Capaian kinerja dalam bidang pengawasan daerah sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.96**  
**Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan**

NO	URAIAN	CAPAIAN KUMULATIF KINERJA 2005-2010		
		Nilai (Rp.)	Setor (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler			
	a. Kerugian	79.906.498,00	45.211.698,00	34.694.800,00
	b. Kewajiban setor.	847.263.505,00	818.357.523,00	28.905.981,80

Sumber : Inspektorat Kabupaten Semarang

Dalam tindak lanjut pemeriksaan reguler, kerugian yang ditemukan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah Rp. 79.906.498,00, yang telah disetor sebesar Rp. 45.211.698,00 sehingga sisa kerugian yang belum disetorkan adalah Rp. 34.694.800,00.

Sementara untuk kewajiban setor nilainya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 847.263.505,00 yang telah disetor sebesar Rp. 818.357.523,00, sehingga sisa kewajiban setor adalah Rp. 28.905.981,00. Terhadap sisa yang belum disetor masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan temuan administratif, sampai dengan tahun 2010 sebanyak 806 temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 779 dan belum terselesaikan 27 temuan. Lebih jelasnya sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.97**  
**Temuan Administratif Tahun 2005-2010**

No.	Uraian	2005-2010		
		Temuan	Selesai	Belum
I.	Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler			
	a. Pelanggaran thd peraturan perundangan yg berlaku	51	51	0
	b. Pelanggaran thd prosedur dan tata kerja yg telah ditetapkan.	17	17	0
	c. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran.	129	122	7
	d. hambatan thd kelancaran proyek	18	18	0
	e. hambatan thd kelancaran tugas pokok.	70	70	0
	f. kelemahan administrasi.	474	454	20
	g. ketidalandarasan pelayanan masyarakat.	13	13	0
	h. temuan pemeriksaan lain-lain.	34	34	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>806</b>	<b>779</b>	<b>27</b>

Sumber: Inspektorat Kab. Semarang

### c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang saat ini "Wajar dengan Pengecualian". Opini laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2009 disajikan secara wajar memadai berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, terbukti dengan opininya yaitu "wajar dengan pengecualian" yang terus dipertahankan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, sedang untuk tahun 2010 sampai bulan Maret masih diaudit oleh BPK sehingga belum ada hasil opini.

**Tabel 2.98**  
**Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Ketepatan Penyusunan APBD	belum	belum	belum	sudah	belum	sudah
2	Opini Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	-

Sumber: DPPKD Kab. Semarang

#### d. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2010 sejumlah 11.105 orang, dengan komposisi pendidikan SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1 dan S2 berturut-turut adalah 2,8%; 4,2%; 24,2%; 0,7%; 23,0%; 8,18%; 0,24%; 33,72% dan 2,9%.

Berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM telah dilakukan antara lain pendidikan penjenjangan struktural prajabatan bagi CPNS, diklat teknis tugas dan fungsi dan diklat teknis fungsional.

**Tabel 2.99**  
**Capaian Kinerja Kepegawaian**

No	Uraian	Capaian Kinerja 5 Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendidikan penjenjangan struktural						
	a. Diklat PIM II (orang)	2	4	4	2	5	0
	b. Diklat PIM III (orang)	-	15	12	18	15	0
	c. Diklat PIM IV (orang)	-	40	40	40	40	40

No	Uraian	Capaian Kinerja 5 Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
2	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme						
	a. Ujian dinas	63	50	81	40	47	15
	b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	39	50	32	20	76	60
3	Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah						
	a. Prajabatan golongan III	122	-	246	95	77	188
	b. Prajabatan golongan II	151	-	308	352	312	259
	c. Prajabatan golongan I	-	-	7	132	69	-
4	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	177	170	84	120	155	62
5	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah						
	a. Diklat guru SD	40	80	-	-	-	-
	b. Diklat guru SLTP	-	-	80	80	-	-
	c. Diklat guru SLTA	-	-	-	-	80	-
6	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS						
	a. BinteK penilaian angka kredit jab.fungsional (orang)	120	85	70	180	60	40
	b. Pelantikan jabatan struktural (kaili)	4	3	5	3	2	2
	c. Pengangkatan jabatan fungsional	170	116	253	162	327	296
7	Seleksi penerimaan calon PNS	277	574	579	453	1.055	198
8	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS						
	a. SK kenaikan pangkat	2.473	1.976	2.136	1.843	1.850	2.057
	b. SPTKG PNS Gol. IV	1.307	1.151	1.200	1.494	1.397	2.218
9	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	200	100	100	100	98	100
10	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS						
	a. terselesaikannya kasus (buah)	23	28	24	25	24	24
11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	13	11	14	3	40	5
12	Penyelenggaraan sumpah janji PNS	-	299	179	250	653	394

Sumber : Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Semarang



e. Pemeliharaan dan pengamanan asset.

Dalam rangka pengamanan asset tanah, telah dilakukan pembuatan sertifikat atas tanah pemda mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, dimana total tanah yang telah disertifikatkan sebanyak 81 sertifikat tanah dan plang tanah. Asset daerah yang diasuransikan yaitu gedung dan kendaraan daerah sebanyak 1.912 unit gedung dan 2.858 unit kendaraan sampai dengan tahun 2010. Selain itu juga dilakukan pemutakhiran asset daerah pada 164 SKPD/UPTD.

**Tabel 2.100**  
**Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah**  
**Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pengamanan Tanah Pemda	Sertifika t/ plang	-/25	-/25	16/25	9/25	37/25	19/25
2	Pengamanan aset Gedung dan Kendaraan Operasional Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kendaraan	450	450	462	537	485	474
		Gedung	300	300	94	282	280	376
3	Pemutakhiran Data Aset Daerah	SKPD/UPTD	75	27	62	-	-	-

Sumber data: Bagian PSD, Setda Kab. Semarang

## 21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan pengelolaan potensi pangan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2010 terdapat 20 unit pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan, ditunjukkan dengan Tabel berikut :

**Tabel 2.101**  
**Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2010**

NO	NAMA LEMBAGA	LOKASI
1.	LPM "Rejo Makmur"	Ds. Rejosari Kec. Bancak
2.	LPM "Klp Tani Sidomukti"	Dsn. Butusari ds. Lebak, Kec. Bringin
3.	LPM "Barokah"	Dsn. Krajan, Ds. Banding, Kec. Bringin
4.	LPM "Sido Maju"	Dsn. Krajan, ds. Wiru, Kec. Bringin
5.	LPM "Green Grow"	Dsn. Dolog, ds. Bakatrejo, Kec. Susukan
6.	LPM "Rejeki Makmur"	Ds. Ngrapah, Kec. Banyubiru
7.	LPM "Klp Tani Maju Lancar"	Ds. Demakan, Kec. Banyubiru
8.	LPM "Sido Makmur 2"	Dsn. Krajan, ds. Sepakung, Kec. Banyubiru
9.	LPM "Klp Tani Al An'am"	Ds. Tegaron, Kec. Banyubiru
10.	LPM "Klp Tani Subur makmur"	Dsn. Balekambang, ds. Kandangan, Kec. Bawen
11.	LPM "Klp Tani taruna Karya"	Dsn. Jembangan, ds. Sruwen, Kec. Tengaran
12.	LPM "Klp Tani Bina Mandiri"	Dsn. Ploso, Ds. Banyukuning, Kec. Bandungan
13.	LPM "Al Muawanah"	Dsn. Banger, ds. Candirejo, Kec. Pringapus
14.	LPM "Baitul Maal"	Ds. Wates, Kec. Getasan
15.	LPM "Gondangrejo"	Ds. Karanggondang, Kec. Pabelan
16.	LPM "Klp Muda Tani Sebakung Makmur"	Dsn. Tambakrejo, ds. Tambakboyo, Kec. Ambarawa
17.	LPM "Catur Mulyo"	Lingkungan Busungan Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa
18.	LPM "Maju Makmur"	Desa Bendungan Kecamatan Pabelan
19.	LPM "Sumber Rejeki"	Dusun Watupawon Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur
20.	LPM "Sumber Rejeki"	Dusun Soldatan Desa Sambirejo Kecamatan Bringin

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang

Selain pengembangan LPM, sampai dengan Tahun 2010 telah dikembangkan 5 Desa Mandiri Pangan (DMP) yaitu Desa Wiru (Kecamatan Bringin), Desa Rejosari (Kecamatan Bancak), Desa Candirejo (Kecamatan Pringapus), Desa Duren (Kecamatan Sumowono), dan Desa Tawang (Kecamatan Susukan), serta pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan di 18 kecamatan.

## **22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 Kelurahan. Hingga kini sebagian besar penduduknya berdiam di pedesaan. Beban berat dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, karena dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008 dari jumlah Rumah Tangga sebanyak 208.699, masih terdapat 66.800 RT atau 32% tergolong RT Miskin. Kondisi ini merupakan cerminan belum terpenuhinya hak-hak dasar, ketidakberdayaan dan kerentanan masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat minimal harus diprioritaskan dan ditujukan bagi penduduk miskin atau kelompok masyarakat rentan dan tidak berdaya lainnya. Namun saat ini belum semua kelompok masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Capaian kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK/PNPM Mandiri Pedesaan) sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.102**  
**Partisipasi/ Keterlibatan Masyarakat dalam Tahapan Kegiatan**  
**PPK/PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2005-2010**

No	Kegiatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Musyawarah Antar Desa	747	848	885	658	1.118	1.316
2	Musyawarah Desa I	5.016	5.658	6.250	3.919	7.942	12.191
3	Penggalian Gagasan	51.966	54.987	45.596	25.347	28.383	47.251
4	Musyawarah Khusus Perempuan	4.347	5.489	6.223	6.551	7.451	10.107
5	Musyawarah Desa II	5.551	6.423	6.253	1.552	6.799	11.856
6	Musyawarah Antar Desa II	952	1.095	1.236	5.882	1.270	2.267
7	Musyawarah Antar desa III	982	1.495	1.522	5.526	1.059	2.437
8	Musdes III	4.526	5.652	6.322	32.888	4.408	8.460
9	Pelaksanaan Keg	7.888	6.985	7.995	8.170	3.523	103.905
10	Musdes pertanggungjawaban	7.170	8.470	7.582	5.848	311	6.445
11	Musdes serah terima	4.848	5.985	4.352	4.255	5.985	1.061
12	Pemeliharaan Hasil kegiatan	2.978	3.865	3.755	3.932	3.865	-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Semarang

- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi dan sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat, pengembangan usaha produktif dan pengembangan interaksi sosial sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.103**  
**Pelaksanaan Kegiatan PPK/PNPM Mandiri Pedesaan**  
**Tahun 2005 - 2010**

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Alokasi Kecamatan PNPM (Mpd (kec)	6	10	10	12	14	16
2	Desa Berpartisipasi (desa)	82	137	137	163	196	204
3	Swadaya Masy dim PPK	997.281.638	953.493.840	1.243.773.610	1.606.844.750	2.097.441.225	2.369.316.550
4	Sarana Prasarana/ Fisik yang dibangun (keg)	87	113	69	68	153	227
5	Dana yang dibalokasikan pada Kegiatan Ekonomi ( juta Rp)	876,150	549,050	2.501,243	3.020,649	3.735,510	6.611.240.250
6	Jumlah Kelompok Pemanfaat keg ekonomi	283	108	165	175	349	448

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Semarang

**Tabel 2.104**  
**Pelaksanaan Kegiatan PNPB Mandiri Perkotaan (sebelumnya P2KP)**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Alokasi Kelurahan / Desa P2KP (kel/desa)	21	21	43	43	43	31
2	Perkembangan Jumlah Kelompok Swadaya Masy (KSM - P2KP) (tdp)	727	768	812	864	1304	1124
3	TH Daya Ekonomi ( juta Rp )	3.427	3.562	4.467	4.612	5.724	2.577
4	Anggota KSM P2KP (orang)	5.941	6086	7606	7814	10138	5296
5	Kegiatan Pembangunan sarana prasarana (lewy)	16	45	283	310	274	-
6	Swadaya Masyarakat (juta Rp)	382	1.132,2	3.611,4	3.744,8	1.252,5	-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Semarang

Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada kegiatan PNPB Mandiri Pedesaan melalui berbagai musyawarah desa, antar desa, penggalan gagasan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Demikian pula peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi dan sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat, pengembangan usaha produktif dan pengembangan interaksi sosial. Selama kurun waktu 2005-2010 alokasi PPK telah mencapai 16 kecamatan dan sebanyak 204 desa aktif berpartisipasi, swadaya masyarakat pada tahun 2010 mencapai Rp. 2.369.316.500 untuk 227 kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana.

Pada tahun 2010 dana yang dialokasikan pada kegiatan ekonomi sebesar Rp. 6.611.240.300 dengan jumlah kelompok pemanfaat kegiatan sejumlah 448 kelompok. Pelaksanaan kegiatan PPK/PNPB Mandiri Pedesaan 2005-2010 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.103

- 3) Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.105**  
**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya**

No.	Kegiatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Terlaksananya Revitalisasi Posyandu (desa)	19	19	19	19	19	19
2.	TMMD Sengkuyung I&II (desa)	2	2	2	2	2	2
3.	Bhakti Praja Serasi	16	16	17	17	17	-
4.	Peningkatan Penguatan Kelembagaan melalui Pemugaran Rumah bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)	20	20	20	250	295	130
5.	Terlaksananya Bimbingan Motivasi Ketrampilan (desa)	19	19	19	-	-	-
6.	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (desa/kel)	208	208	208	208	208	90
7.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (desa/kel/kec/org)	208	208	208	208	208	19, 252
8.	Pelatihan Ketrampilan Manejemen BUMDes (kec/org)	-	-	-	19	-	150
9.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (desa/kel)	-	-	104	104	-	-
10.	Pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi keluarga melalui UEDSP/UP2K/LPM (desa/kel)	19	19	19	19	19	-
11.	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (desa/kel)	-	-	-	19, 3	19, 3	-
12.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (desa/kel)	208	208	208	208	208	208

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Semarang

### 23. Urusan Wajib Statistik

Saat ini kebutuhan akan ketersediaan data yang relevan, akurat dan tepat waktu semakin meningkat dan ketersediaan statistik yang bermutu menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan penyusunan perencanaan pembangunan

daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan perlu didasarkan pada fakta, data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pada proses perencanaan dan perumusan kebijakan, ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat berperan pada proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah.

Sampai dengan tahun 2010 telah tersusun secara rutin setiap tahun buku Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Harga Perdagangan Besar Konstruksi (HPBK), Buku Indikator Ekonomi serta Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi.

Data/informasi statistik yang dihasilkan oleh urusan statistik telah dipergunakan sebagai bahan perumusan dan analisis kebijakan baik dalam perencanaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang.

#### **24. Urusan Wajib Kearsipan**

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, Kantor Arsip Daerah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban melakukan penyempurnaan penyelenggaraan kearsipan nasional di daerah kearah kesempurnaan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan bidang kearsipan di Kabupaten Semarang adalah dengan merumuskan teknis pembinaan dan pengembangan ke semua SKPD, perorangan dan swasta, melaksanakan akuisisi dan pengolahan semua arsip yang diserahkan maupun melakukan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan arsip.

Masih banyaknya tantangan dan kendala yang dihadapi dalam

mengelola arsip dan dokumentasi di Kabupaten Semarang menjadi salah satu penyebab tidak terbangunnya pemahaman tentang peran pentingnya arsip bagi penunjang administrasi sehari-hari di pemerintahan dan pembangunan.

Capaian kinerja Pengelolaan arsip tahun 2005-2010 yang meliputi kegiatan pendataan, pengumpulan, penataan, penyimpanan dan penyelamatan arsip sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.106**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Tahun 2005-2010**

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja 2005-2010					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penerapan Pengelolaan arsip secara baku							
	a. Penataan arsip	boks	500	1200	500	600	400	500
	b. Pemeliharaan fisik & sarana penyimpanan arsip							
	- Termit kontrol	M <sup>3</sup>		64	160	160	320	320
	- Fumigasi	M <sup>3</sup>		224	560	560	1.120	1.000
	- Housespraying	M <sup>3</sup>			560	560	1.120	1.000
	c. Duplikasi arsip							
	- Dok/arsip	lembar			500	500		1.000
	- kaset	buah						75
2.	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan.							
	a. Bintek Kearsipan	orang		253	55	55	120	100
	b. Pembinaan & praktek pengelolaan arsip	skpd		49	79	79	79	79

Sumber: Kantor Arsip Daerah Kab. Semarang

- Terjadi kenaikan penataan arsip dari tahun 2005-2006 karena adanya kegiatan pindah kantor dari Sekretariat Daerah ke kompleks perkantoran Sewakul.
- Kegiatan Termit kontrol mengalami kenaikan terus menerus karena luas ruangan yang terus bertambah, sehingga dilakukan penyuntikan ruangan sesuai dengan luas ruangan yang ada.



- Kegiatan fumigasi adalah kegiatan melakukan penyemprotan arsip agar dokumen arsip dapat bertahan lama. Kegiatan ini juga mengalami peningkatan tiap tahun karena jumlah arsip yang terus bertambah tiap tahunnya.
- Kegiatan housespraying adalah kegiatan melakukan penyemprotan ruangan agar kondisi ruangan memadai dalam penyimpanan arsip. Kegiatan ini pun terus mengalami peningkatan karena jumlah ruangan di Kantor Kearsipan yang terus bertambah.
- Bimbingan teknis kearsipan mulai dilakukan tahun 2006 di lingkup Sekretaris Desa, tahun 2007-2010 di lingkup SKPD, sementara pembinaan dan praktek pengelolaan arsip dilaksanakan di lingkup SKPD dan kecamatan.

## **25. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika**

Pembangunan Bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan merupakan salah satu kewenangan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Informasi, Komunikasi dan Kehumasan mempunyai peran penting untuk menjelaskan seluruh kebijakan, program, kegiatan dan agenda yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Di lain pihak masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara utuh mengenai berbagai hal yang menyangkut kepentingannya.

Pada era globalisasi komunikasi, informasi sangat terbuka seolah tanpa batas setiap saat dapat dilakukan oleh siapapun, dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Masyarakat bebas memilih menggunakan teknologi untuk komunikasi dan memperoleh informasi melalui media elektronik dan media cetak. Terbuka dan bebasnya

komunikasi dan informasi, masyarakat secara cepat mengetahui perkembangan situasi dari tingkat lokal, nasional dan internasional.

Dampak positif pada era kebebasan dan keterbukaan komunikasi dan Informasi, masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat sesuai kepentingannya.

Derasnya arus komunikasi dan informasi mancanegara dapat berdampak negatif, semakin menipisnya rasa kebangsaan, semakin terdesaknya budaya bangsa Indonesia, menurunnya kebanggaan jiwa nasionalisme dan budaya sendiri.

Sampai dengan tahun 2010 pembangunan di sektor/urusan komunikasi dan Informatika yang telah dicapai antara lain :

- 1) Terbangunnya Jaringan Teknologi Informasi dan Penataan Jaringan di SKPD berupa 2 hotspot, 4 jaringan SKPD dan telah dapat dioperasionalkannya jaringan SIPKD secara online serta tersedianya peralatan untuk perbaikan jaringan.
- 2) Tersedianya Sub Admin dan Operator yang mampu mengelola teknologi informasi sebanyak 130 orang.
- 3) Tersedianya Sarana Komunikasi dan Informasi menuju E-Government berupa penyediaan bandwidth sebesar 3 Mb dan sewa hosting sebesar 5 Gb untuk seluruh SKPD serta peningkatan layanan jaringan Informasi dan komunikasi berupa Peralatan Network Operating Centre (NOC)
- 4) Terbangunnya Portal Website bagi SKPD sebanyak 25 Website SKPD serta Tersedianya Sarana prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

- 5) Terlaksananya program siaran Dialog Interaktif, Usaha Ekonomi Produktif dan Budaya Daerah melalui Operasional Radio Suara Serasi 6.935 jam selama 12 bulan meliputi 19 wilayah kecamatan.
- 6) Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat melalui Majalah Gema Serasi sebanyak 8000 eksemplar, 4 edisi selama 12 bulan.

## **26. Urusan Wajib Perpustakaan**

Urusan perpustakaan dilaksanakan sebagai urusan sendiri sejak Tahun 2008 dengan membentuk Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang. Sebelum Tahun 2008 pelaksanaan urusan perpustakaan menjadi bagian dari urusan pendidikan.

Budaya baca (*reading society*) dan budaya belajar (*learning society*) merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh perpustakaan. Berbagai upaya dilakukan oleh perpustakaan guna mewujudkannya. Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap eksistensi sebuah perpustakaan, ketersediaan buku (bahan pustaka) dan keberadaan pengunjung perpustakaan merupakan faktor yang paling dominan.

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Semarang dengan penduduk yang tersebar di berbagai wilayah, tugas perpustakaan memasyarakatkan budaya baca dan budaya belajar ke tengah-tengah masyarakat juga semakin berat. Lembaga perpustakaan tidak dapat hanya mengandalkan pelayanan di Kantor Perpustakaan Daerah saja, jika mengharapkan terwujudnya kedua budaya tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya disamping menggelar pelayanan di Kantor Perpustakaan Daerah, bentuk pelayanan perpustakaan lain seperti

perpustakaan keliling, perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, perpustakaan sekolah dan berbagai hal lain yang mendukung pemasyarakatan budaya baca dan budaya belajar.

Capaian kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut :

1) Koleksi Buku/bahan pustaka

Jumlah koleksi buku (bahan pustaka) senantiasa bertambah dari tahun ke tahun, seiring dengan peningkatan kebutuhan bahan bacaan dari pengguna perpustakaan. Pertambahan koleksi buku dari tahun 2005 sampai dengan 2010 di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut :

**Tabel 2.107**  
**Jumlah Koleksi Buku Tahun 2005-2010**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- fiksi (eks)	5.992	7.326	8.961	11.385	13.289	14.805
- non fiksi (eks)	17.737	18.996	21.940	26.302	30.533	31.944
- referensi (eks)	1.846	2.024	2.351	2.835	3.658	4.001
<b>TOTAL (eks)</b>	<b>25.575</b>	<b>28.346</b>	<b>33.252</b>	<b>40.522</b>	<b>47.480</b>	<b>50.750</b>

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang

Dalam kurun waktu 2005-2010 koleksi buku fiksi meningkat sebanyak 147,08%, koleksi buku non fiksi meningkat sebanyak 80,1%, dan koleksi buku referensi meningkat sebanyak 116,74%.

2) Perkembangan Jumlah Perpustakaan, Pengguna Perpustakaan, Peminjam Buku, dan Buku yang Dipinjam pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang.

Jumlah perpustakaan, pengguna perpustakaan, peminjam buku, dan buku yang dipinjam dari tahun 2005-2010 meningkat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.108**  
**Jumlah Perpustakaan Tahun 2005-2010**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/ MI	194	202	174	227	550	604
SMP/ MTs	81	89	29	149	120	131
SMA/ MA/ SMK	45	45	11	38	47	60
Perpustakaan Keliling	27	35	34	50	60	83
Instansi Pemerintah	-	-	25	25	25	25
Penguruan Tinggi	-	-	2	2	2	2
Umum	-	-	2	2	47	71
<b>TOTAL</b>	<b>344</b>	<b>371</b>	<b>277</b>	<b>493</b>	<b>851</b>	<b>976</b>

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang

**Tabel 2.109**  
**Data Pengguna Perpustakaan**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD	5.318	5.722	7.253	14.889	13.109	20.957
SMP	5.517	5.708	6.797	10.493	10.725	11.025
SMA	8.369	8.730	9.820	15.729	10.601	10.890
Mahasiswa	2.615	2.814	3.312	4.620	5.313	6.760
Pegawai	1.102	1.202	3.216	2.515	3.481	5.174
Umum	10.505	11.093	12.359	19.676	21.152	28.240
<b>TOTAL</b>	<b>33.426</b>	<b>35.269</b>	<b>42.757</b>	<b>67.922</b>	<b>68.183</b>	<b>83.046</b>

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang

**Tabel 2.110**  
**Data Peminjam Buku**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD	1.079	1.189	2.422	4.749	4.885	8.062
SMP	703	849	1.248	2.556	3.307	5.225
SMA	1.285	1.567	1.793	2.968	4.218	4.198
Mahasiswa	860	926	1.204	2.155	2.552	2.693
Pegawai	912	961	853	1.613	1.689	2.897
Umum	4.089	4.210	5.676	3.348	7.877	13.294
<b>TOTAL</b>	<b>8.928</b>	<b>9.702</b>	<b>13.196</b>	<b>17.389</b>	<b>24.524</b>	<b>36.369</b>

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang

**Tabel 2.111**  
**Data Buku yang Dipinjam**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Karya umum	1.215	1.265	1.147	1.045	1.314	1.522
Filsafat/psikologi	1.075	1.210	1.267	1.229	1.836	1.984
Agama	2.419	2.456	2.895	2.660	4.043	6.075
Ilmu Sosial	754	765	626	799	1.364	2.059
Bahasa	398	441	425	502	614	878
Ilmu murni	374	368	448	552	1.138	1.788
Ilmu terapan	1.589	1.766	1.878	2.071	3.473	5.266
Kesenian, OR, ketrampilan	564	654	369	472	949	2.137
Kesusastraan	430	432	512	506	1.061	2.164
Sejarah, biografi dan geografi	374	398	466	436	769	1.114
Fiksi	8.065	8.265	8.957	13.658	16.148	20.188
<b>TOTAL</b>	<b>17.257</b>	<b>18.020</b>	<b>18.990</b>	<b>23.930</b>	<b>32.709</b>	<b>45.175</b>

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengunjung, peminjam buku dan buku yang dipinjam di Kantor Perpustakaan Daerah senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

- a. Adanya penambahan buku-buku baru di perpustakaan, baik yang berasal dari APBD maupun bantuan dari Pemerintah Pusat. Koleksi buku-buku baru tentunya akan lebih menarik minat baca para pengguna perpustakaan. Hal ini menjadikan mereka lebih sering berkunjung ke perpustakaan guna memanfaatkan koleksi buku perpustakaan.
- b. Adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh perpustakaan, baik kepada kelompok masyarakat, sekolah, kelembagaan desa, dan lain-lain.

- c. Perluasan pengguna perpustakaan melalui pendirian perpustakaan desa dan pos pelayanan keliling.
- 3) Berjalannya sistem pelayanan otomatis meliputi: registrasi, sirkulasi, statistik, pencarian buku, cetak antara lain berupa pengisian buku pengunjung sistem touchscreen, pencarian judul buku sistem otomatis, peminjaman dan pengembalian menggunakan sistem barcode, penggunaan kartu anggota dengan model ID Card.
  - 4) Dibukanya pelayanan perpustakaan hingga jam 20.00 WIB
  - 5) Pendirian perpustakaan di tempat-tempat wisata melalui perpustakaan keliling
  - 6) Dibukanya 3 pos baca di RSUD Ungaran, Kecamatan Bandungan, dan Kecamatan Kaliwungu.
  - 7) Dilaksanakannya kegiatan *story telling*

## **27. Urusan Pilihan Pertanian**

Kabupaten Semarang mempunyai potensi sumberdaya alam yang didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan disektor tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu urusan pertanian menjadi salah satu urusan pilihan.

Capaian kinerja pembangunan pertanian pada tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kenaikan produktivitas semua jenis komoditi pada Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2005, kecuali pada kacang tanah dan ubi

kayu. Penurunan ini disebabkan karena beralih ke komoditi lain yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi, selengkapnya seperti Tabel 2.112 berikut :

**Tabel 2.112**  
**Luas, Produksi dan Produktivitas Padi Dan Palawija**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	JENIS KOMODITI	2005			2006		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	Padi	32.827,00	155.760,00	47,45	34.939,00	173.658,00	49,70
2	Jagung	13.207,00	52.346,00	39,64	11.886,00	45.743,00	38,48
3	Kedelai	347,00	366,00	10,55	180,00	216,00	12,00
4	Kacang Tanah	2.742,00	3.094,00	11,28	2.785,00	3.729,00	13,39
5	Ubi Kayu	2.095,00	36.641,00	174,90	1.828,00	39.117,00	213,99
6	Ubi Jalar	629,00	10.614,00	168,74	729,00	11.477,00	157,43

NO	JENIS KOMODITI	2007			2008		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	Padi	32.805,00	174.014,00	53,04	33.215,00	182.270,00	54,88
2	Jagung	10.702,00	48.709,00	45,51	12.414,00	50.966,00	41,06
3	Kedelai	142,00	169,00	11,90	775,00	1.052,00	13,57
4	Kacang Tanah	2.949,00	3.526,00	11,96	2.325,00	2.781,00	11,96
5	Ubi Kayu	1.727,00	37.783,00	218,78	1.689,00	43.244,00	256,03
6	Ubi Jalar	741,00	19.544,00	263,75	685,00	12.590,00	183,80

NO	JENIS KOMODITI	2009			2010		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	Padi	33.682,00	185.757,00	55,15	37.102,00	203.457,00	54,84
2	Jagung	12.755,00	53.254,00	41,75	12.983,00	65.333,00	50,32
3	Kedelai	682,00	966,00	14,16	1.139,00	1.472,00	12,92
4	Kacang Tanah	2.231,00	3.040,00	13,63	1.223,00	1.309,00	10,70
5	Ubi Kayu	1.058,00	20.890,00	197,45	1.908,00	33.264,00	174,33
6	Ubi Jalar	596,00	11.483,00	192,67	668,00	14.860,00	222,46

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang



- 2) Terdapat penurunan produktivitas tanaman hias pada Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2005 kecuali mawar dan sedap malam. Penurunan produktivitas disebabkan kenaikan luas lahan tidak diimbangi dengan kenaikan produksi.

**Tabel 2.113**  
**Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias**  
**Tahun 2005-2010**

NO	JENIS KOMODITI	2005			2006		
		Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Produktivitas (Tangkai/m <sup>2</sup> )	Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Produktivitas (Tangkai/m <sup>2</sup> )
1	Gladiol	7.924	285.264	36	36.050	752.500	21
2	Krisant	35.648	3.162.814	89	207.300	13.290.080	64
3	Mawar	59.820	9.185.840	154	68.020	12.585.800	185
4	Anggrek	1.342	24.473	18	200	511	3
5	Sedap Malam	92.650	1.434.750	15	14.291	1.310.875	92

NO	JENIS KOMODITI	2007			2008		
		Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Produktivitas (Tangkai/m <sup>2</sup> )	Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Produktivitas (Tangkai/m <sup>2</sup> )
1	Gladiol	10.000	203.000	20	15.410	406.075	26
2	Krisant	230.250	15.315.500	67	209.800	14.476.200	69
3	Mawar	23.900	8.992.707	376	34.100	9.421.260	276
4	Anggrek	262	4.008	15	709	1.749	2
5	Sedap Malam	17.591	509.957	29	7.800	652.050	84

NO	JENIS KOMODITI	2009			2010		
		Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Produktivitas (Tangkai/m <sup>2</sup> )	Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Produktivitas (Tangkai/m <sup>2</sup> )
1	Gladiol	6.829	221.528	32	20.529	659.728	32
2	Krisant	216.080	15.030.600	70	265.650	19.341.700	73
3	Mawar	27.564	6.330.425	230	26.381	6.019.298	228
4	Anggrek	751	14.509	19	676	10.947	16
5	Sedap Malam	25.788	3.071.314	119	37.892	2.829.840	75

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

- 3) Terdapat peningkatan produktivitas sayur-sayuran pada Tahun 2010 bila dibandingkan dengan Tahun 2005, kecuali pada tanaman cabe rawit, tomat, dan buncis. Hal ini disebabkan faktor iklim yang tidak menentu sehingga produksi tidak bisa optimal dan berakibat pula terjadinya hama penyakit tanaman.

**Tabel 2.114**  
**Luas, Produksi dan Produktivitas Sayur-sayuran Utama**  
**Tahun 2005-2010**

NO	JENIS KOMODITI	2005			2006		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	Bawang Daun	1.003	9.676	96,47	775	6.887	88,86
2	Kentang	13	254	195,38	42	916	218,10
3	Kubis	451	9.690	214,86	318	7.209	226,70
4	Petsai/ Sawi	740	7.891	106,64	650	6.856	105,48
5	Wortel	213	4.056	190,42	175	3.518	201,03
6	Cabe Besar	237	1.664	70,21	366	2.157	58,93
7	Cabe Rawit	231	736	31,86	254	1.049	41,30
8	Tomat	188	4.366	232,23	177	3.559	201,07
9	Buncis	199	2.806	141,01	174	1.501	86,26

NO	JENIS KOMODITI	2007			2008		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	Bawang Daun	833	8.092	97,14	741	8.785	118,56
2	Kentang	55	1.331	242,00	105	2.528	240,76
3	Kubis	439	10.144	231,07	502	12.899	256,95
4	Petsai/ Sawi	863	8.101	93,87	712	10.338	145,20
5	Wortel	228	4.763	208,90	318	6.859	215,69
6	Cabe Besar	334	1.989	59,55	515	3.449	66,97
7	Cabe Rawit	361	3.636	100,72	388	2.086	53,76
8	Tomat	188	3.749	199,41	280	6.125	218,75
9	Buncis	173	1.520	87,86	304	3.531	116,15

NO	JENIS KOMODITI	2009			2010		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	Bawang Daun	716	7.456	104,13	1.067	11.141	104,41
2	Kentang	114	2.738	240,18	121	2.846	235,21
3	Kubis	537	18.071	336,52	636	17.314	272,23
4	Petsai/ Sawi	697	12.885	184,86	1027	17.406	169,48
5	Wortel	341	6.560	192,30	505	12.329	244,14
6	Cabe Besar	601	3.316	55,17	760	5.827	76,67
7	Cabe Rawit	319	1.485	46,55	484	2.200	45,45
8	Tomat	276	6.137	222,36	408	8.527	209,00
9	Buncis	273	3.190	116,85	384	4.418	115,05

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

- 4) Terdapat kenaikan produktivitas tanaman biofarmaka pada Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2005 kecuali jahe. Hal ini disebabkan faktor iklim dan berakibat pada penurunan produktivitas pada tanaman jahe.

**Tabel 2.115**  
**Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Biofarmaka**  
**Tahun 2005-2010**

NO	JENIS KOMODITI	2005			2006		
		Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/m <sup>2</sup> )	Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/m <sup>2</sup> )
1	Jahe	2.777.190	7.604.782	2,74	1.663.572	4.652.339	2,80
2	Temulawak	119.166	306.193	2,57	119.390	166.243	1,39
3	Kencur	92.304	130.378	1,41	142.214	281.627	1,98
4	Kunyit	3.296.071	6.671.575	2,02	2.670.792	3.422.453	1,28

NO	JENIS KOMODITI	2007			2008		
		Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/m <sup>2</sup> )	Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/m <sup>2</sup> )
1	Jahe	3.096.373	7.585.904	2,45	2.030.026	7.585.904	3,74
2	Temulawak	86.840	226.358	2,61	103.450	207.990	2,01
3	Kencur	85.707	152.648	1,78	40.265	70.516	1,75
4	Kunyit	2.172.968	3.184.770	1,47	2.642.499	4.683.383	1,77

NO	JENIS KOMODITI	2009			2010		
		Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/m <sup>2</sup> )	Luas Panen (m <sup>2</sup> )	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/m <sup>2</sup> )
1	Jahe	3.083.562	5.795.603	1,88	2.961.442	7.625.036	2,57
2	Temulawak	181.529	400.383	2,21	246.344	650.770	2,64
3	Kencur	33.581	73.736	2,20	78.008	115.859	1,49
4	Kunyit	1.907.093	4.345.366	2,28	2.911.095	6.645.859	2,28

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

- 5) Perkembangan potensi pengembangan usaha di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.116**  
**Potensi Pengembangan Usaha**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	Uraian	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Usaha Produk Pertanian	Unit	60	201	400	714	834	846
2	Penangkar Benih	Kel	11	11	11	11	12	12
3	Usaha Pelayanan Jasa Alsintan	Unit	103	111	123	152	161	166
4	Asosiasi Petani Produsen	Kel	9	11	12	12	12	12
5	Pusat Pemasaran Hortikultura (Sub Terminal Agribisnis, Jetis)	Ton/Hr	250	280	300	327	365	450

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

- 6) Perkembangan populasi peternakan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 cenderung meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya permintaan akan hasil produksi peternakan sehingga meningkatkan minat dan motivasi masyarakat untuk beternak. Perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.117**  
**Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sapi Potong	Ekor	63.875	64.957	65.798	67.559	69.670	74.678
2	Sapi Perah	Ekor	31.888	32.627	33.467	34.067	35.451	37.999
3	Kerbau	Ekor	5.589	5.611	5.640	5.653	5.791	6.041
4	Kuda	Ekor	1.575	1.585	1.593	1.588	1.655	1.822
5	Babi	Ekor	52.027	22.784	28.543	30.568	28.963	31.878
6	Kambing	Ekor	139.868	146.657	149.532	156.226	169.831	196.685
7	Domba	Ekor	148.592	158.822	163.559	168.254	179.191	199.797
8	Kelinci	Ekor	27.152	26.854	27.115	27.056	27.461	27.658
9	Ayam Ras Petelur	Ekor	1.993.813	1.682.417	1.754.651	1.860.158	1.790.402	2.063.161
10	Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.298.738	2.715.281	2.832.596	2.967.158	11.872.193	12.725.506
11	Ayam Buras	Ekor	1.259.380	1.337.452	1.351.674	1.374.035	1.401.536	1.479.170
12	Itik	Ekor	236.731	265.869	274.945	282.654	288.307	303.577
13	Puyuh	Ekor	110.452	181.962	116.217	278.954	283.138	291.279

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

- 7) Perkembangan produksi ternak di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.118**  
**Produksi Ternak Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>A. PRODUKSI DAGING</b>								
1	Sapi	Kg	1.799.928	1.824.380	1.824.390	1.829.818	2.056.148	2.402.407
2	Kambing	Kg	222.437	235.401	258.781	275.895	276.962	314.258
3	Domba	Kg	153.067	156.571	169.602	189.125	190.025	208.441
4	Ayam Buras	Kg	931.003	656.988	544.361	544.361	548.276	697.580
5	Ayam Ras	Kg	2.341.036	3.216.056	3.225.695	3.225.695	5.842.164	6.490.409
<b>B. PRODUKSI TELUR</b>								
1	Telur Ayam Ras	butir	150.618.872	274.407.943	275.021.356	286.199.586	317.990.921	324.763.935
2	Telur Ayam Buras	butir	42.727.278	68.248.346	68.731.779	34.800.115	44.972.629	47.7729.704
3	Telur Itik	butir	6.787.972	11.462.430	11.812.337	9.050.737	10.306.776	10.935.641
4	Telur Puyuh	butir	21.676.651	32.290.923	33.529.272	33.529.272	34.634.393	36.615.848
<b>C. PRODUKSI SUSU</b>								
1	Susu Sapi	liter	21.365.294	28.802.870	30.998.000	28.668.010	30.039.838	34.568.345

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

- 8) Perkembangan konsumsi protein hewani di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.119**  
**Konsumsi Protein Hewani**  
**Di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Daging	Kg/kapita/thn	5,42	7,14	7,38	7,72	7,90	8,60
2	Susu	Kg/kapita/thn	3,31	4,09	4,20	4,55	4,70	4,80
3	Telur	Kg/kapita/thn	4,78	5,27	5,42	6,88	7,20	7,20

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

Konsumsi protein hewani di Kabupaten Semarang setiap tahun meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan karena pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang, dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani

- 9) Perkembangan jumlah kelompok tani ternak dan keterlibatan masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.120**  
**Jumlah Kelompok Tani Ternak Tahun 2005-2010**

NO	KELAS KELOMPOK TANI TERNAK	SATUAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kelas Pemula	Kelompok	273	370	499	549	559	603
2.	Kelas Lanjut	Kelompok	62	41	7	18	28	56
3.	Kelas Madya	Kelompok	3	8	-	2	2	1
4.	Kelas Utama	Kelompok	-	-	-	-	-	2

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

- 10) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peternakan tahun 2005-2010 seperti pada Tabel berikut :

**Tabel 2.121**  
**Data Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan**  
**Tahun 2005-2010**

No	JAWAN	Org	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Peternak Rakyat	Org	176.602	176.602	239.206	245.830	249.958	250.882
2	Perusahaan Peternakan							
	- Ayam Petelur	RTP	32	32	39	39	39	39
	- Ayam Pedaging	RTP	8	8	4	4	4	4
	- Sapi Potong	RTP	8	8	4	4	4	4
	- Breeder	RTP	2	2	3	3	3	3
	- Babi	RTP	17	17	15	15	15	18

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa :

- Perkembangan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peternakan dari tahun 2005-2010 mengalami peningkatan.
- Perkembangan peternak rakyat mengalami peningkatan setiap tahunnya karena semakin meningkatnya minat dan motivasi masyarakat untuk beternak. Hal ini di pengaruhi oleh permintaan pasar akan produk hasil ternak yang terus meningkat.
- Sedangkan untuk perkembangan perusahaan peternak sejak tahun 2007-2010 cenderung tidak mengalami peningkatan disebabkan oleh tingginya biaya investasi untuk mendirikan perusahaan peternakan, terutama untuk biaya produksi pakan dan bibit, sehingga kurang menarik minat investor di bidang peternakan. Masyarakat di Kabupaten Semarang, banyak yang lebih memilih usaha ternak dalam skala kecil.

## 28. Urusan Pilihan Kehutanan

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan penghijauan terus ditingkatkan, namun penebangan kayu terus meningkat akibat peluang pasar yang cukup besar dengan harga yang menguntungkan. Produksi kayu rata-rata per tahun adalah 70.000 m<sup>3</sup> yang didominasi jenis-jenis jati, sengon, suren dan mahoni.

Perkembangan jumlah potensi hutan di Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.122**  
**Jumlah Potensi Hutan Tahun 2005-2010**

NO	URAIAN	SAT	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Hutan Produksi	Ha	8.006,80	8.006,80	8.006,80	8.006,80	8.006,80	8.954,60
2	Hutan Terbatas	Ha	649,30	649,30	649,30	649,3	649,3	484,30
3	Hutan Lindung	Ha	3.277,70	3.277,70	3.277,70	3.277,70	3.277,70	2.457,77
4	Cagar Alam	Ha	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	27,40
5	Hutan Rakyat	Ha	11.589,00	13.428,00	13.428,00	13.040,00	15.194,10	13.619,00

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

Berdasarkan data diatas, disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan disekitar hutan masih cukup tinggi. Disebabkan antara lain laju penebangan hutan masih lebih tinggi dibanding laju penanaman serta kaidah konservasi belum diperhatikan dalam usaha tani.

## 29. Urusan Pilihan Energi Sumber Daya Mineral

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki potensi cukup besar dalam usaha pertambangan mineral yaitu pertambangan batuan (batu andesit dan sirtu) dan pertambangan mineral bukan logam (lempung dan bentonit). Berdasarkan laporan kajian geologi tata lingkungan untuk kelayakan penambangan bahan galian golongan C yang dilakukan



Direktorat Geologi Tata Lingkungan (GTL) dan Bappeda Kabupaten Semarang Tahun 2002, potensi tersebut adalah sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.123**  
**Potensi Eksploitasi Pertambangan Batuan**

No	Jenis Tambang	Potensi (Ha)	Cadangan (Tons/mt)
1	Batu andesit	5.341,6	2.637.261.000
2	Sirtu	24,1	168.640.000
3	Lempung	85	950.000
4	Bentonit	843	33.720.000

Sumber : B/LH Kabupaten Semarang

Pada beberapa lokasi pertambangan terdapat masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan liar (tidak berijin). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan ABT/APT hanya sampai dengan tahun 2008 yaitu sebanyak 107 buah. Hal ini disebabkan mulai tahun 2009 penerbitan rekomendasi pemanfaatan ABT/APT tidak menjadi kewenangan Kabupaten, namun menjadi kewenangan Provinsi.

Realisasi jumlah penerbitan rekomendasi pemanfaatan ABT/APT dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2.124**  
**Realisasi Jumlah Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan ABT/APT**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Penerbitan Rekomendasi	26	26	27	28	0	0

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kab. Semarang

- 2) Meningkatnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan tanah sebesar rata-rata 4,08% dan 6,01% selama periode 2005 sampai dengan tahun 2010.

**Tabel 2.125**  
**Realisasi Jumlah Pemanfaatan ABT / APT**

Pemanfaatan ABT / APT	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Perusahaan	127	134	139	145	149	186
Sumur / mata air	164	177	186	199	207	273

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kab. Semarang

- 3) Bertambahnya jumlah lampu penerangan jalan umum sebanyak 1.380 titik lampu dari kondisi awal tahun 2005 sebanyak 27.100 titik menjadi 28.480 titik lampu.
- 4) Meningkatnya jumlah dusun yang mendapat jaringan listrik sebanyak 37 dusun sampai dengan tahun 2010.

**Tabel 2.126**  
**Jumlah LPJU dan Perluasan Listrik Masuk Desa**

JENIS	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Lampu (titik)	27.100	27.612	27.612	28.112	28.262	28.480
Perluasan Jaringan Listrik (Dusun)	3	7	10	6	5	6
Efisiensi LPJU (APP)	120	139	152	231	330	347

Sumber : Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kebersihan Kab. Semarang

### 30. Urusan Pilihan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Semarang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari letak wilayah Kabupaten Semarang yang berada pada posisi strategis Yogyakarta-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR).

Dengan kondisi geografis yang strategis serta akomodasi yang dimiliki, sektor ini tidak pernah luput dari posisi tiga besar dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Jumlah PAD sektor pariwisata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah PAD sektor pariwisata Tahun 2010 sebesar Rp. 1.562.044.880,00. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata yang dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2008 yaitu sebesar 103,53% dibandingkan Tahun 2007, hal ini disebabkan berlakunya Perda baru mengenai harga retribusi obyek dan Daya Tarik Wisata (Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Wisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang). Sumbangan terbesar dengan diterapkannya perda ini adalah obyek wisata yang dikelola oleh Disporabudpar sedangkan obyek wisata yang dikelola oleh swasta mengalami penurunan seperti, Wana Wisata Air Terjun Semarang, Wana Wisata Umbul Songo dan Wana Wisata Langen Tirto. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam hal bagi hasil pendapatan dengan pihak swasta sedang dilakukan dan beberapa telah selesai. Diharapkan dengan adanya MoU ini target-target pendapatan di obyek wisata yang dikelola swasta dapat dicapai.

Capaian kinerja pembangunan pada tahun 2005-2010 yang terkait urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

a) Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara di Kabupaten Semarang selama Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.127**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2005-2010**

NO	WISATAWAN	Sat	Kondisi Awal 2005	TAHUN				
				2006	2007	2008	2009	2010
1	ASING	orang	735	797	4.624	3.634	4.523	4.806
2	DOMESTIK	orang	415.735	249.169	665.009	762.765	889.193	1.186.292
	JUMLAH		416.460	249.966	669.633	766.399	893.716	1.191.098

Sumber : Dinas Pemuda,OR,Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Semarang

Secara umum, data jumlah pengunjung baik nusantara maupun mancanegara ke Kabupaten Semarang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari keseluruhan jumlah pengunjung tersebut, wisatawan nusantara mendominasi kunjungan wisatawan di Kabupaten. Kurangnya jumlah wisatawan mancanegara, agaknya dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi dan politik yang pada akhirnya menjalar dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat atau pemerintah sendiri serta kondisi keamanan dalam negeri.

b) Perkembangan fasilitas akomodasi

Fasilitas akomodasi yang terdapat di Kabupaten Semarang terdiri dari hotel bintang satu dan dua, hotel melati dan pondok wisata. Saat ini baru terdapat dua hotel berbintang dua yang terletak di Bandungan dan hotel berbintang satu yang terletak di Ungaran. Total kamar yang tersedia dari sekitar 217 fasilitas akomodasi yang ada, berjumlah 3.597 kamar dengan 5.569 tempat tidur.

Persebaran fasilitas akomodasi yang ada di Kabupaten Semarang saat ini baru terkonsentrasi di beberapa kawasan saja seperti di Ungaran, Bandungan, Bawen, Kota Ambarawa dan Kopeng, khususnya di kawasan Bandungan, kemudian di Kecamatan Getasan yaitu di kawasan Kopeng. Sebaran fasilitas akomodasi di kedua kawasan tersebut relatif banyak sebagai dampak dari pengembangan kegiatan pariwisata yang cukup pesat.

**Tabel 2.128**  
**Akomodasi Wilayah Kopeng**

No	Klasifikasi Hotel	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pondok Wisata	33	33	33	33	33	21
2	Melati 1	49	49	49	49	56	65
3	Melati 2	3	3	3	3	3	
4	Melati 3	4	4	4	4	4	
5	Bintang 1 dan 2	0	0	0	0	0	0
Jumlah		89	89	89	89	96	86

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

**Tabel 2.129**  
**Akomodasi Wilayah Bandungan, Ambarawa, Bergas, Ungaran**

No	Klasifikasi Hotel	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Melati 1	80	80	80	80	85	86
2	Melati 2	24	24	24	24	24	23
3	Melati 3	14	14	14	14	14	14
4	Bintang 1 Dan 2	4	4	4	4	4	5
<b>Jumlah</b>		<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>128</b>

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Semarang

### 31. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Semarang, memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan usaha perikanan. Salah satu potensi yang cukup menonjol adalah kondisi agroklimat yang cocok untuk pengembangan usaha perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan air sepanjang tahun di beberapa wilayah, suhu udara optimal dan tidak terlalu panas serta adanya perairan umum yang cukup luas, yaitu Rawa Pening dan beberapa cek-dam dan sungai. Disamping itu, sudah dikenalnya kegiatan perikanan di masyarakat diharapkan akan mempermudah pengembangan usaha.

Capaian kinerja dalam urusan kelautan dan perikanan tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan skala usaha dan produksi perikanan Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.130**  
**Perkembangan Skala Usaha Perikanan**  
**Tahun 2005-2010**

No	Urutan	SaL	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kolam	ha	58,95	59,76	62,00	68,07	69,00	69,10
2	Minapadi	ha	21,64	23,50	9,10	-	-	-
3	Karamba Apung	Petak	90	98	107	115	132	133

No	Uraian	Sat.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
4	Karamba Tancap	Petak	628	640	702	705	717	723
5	Pembenihan							
	- unit pembenihan rakyat (UPR)	unit	120	195	185	190	222	302
	- balai benih ikan	unit	1	1	1	2	2	2
	- ikan hias	unit	32	37	47	48	49	46
6	Kolam Pemancingan	unit	56	58	60	61	61	62
7	Penangkapan	RTP	1.576	1.589	1.600	1.600	1.617	1.628
8	Pengolahan	RTP	122	125	126	128	130	131

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

**Tabel 2.131**  
**Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2005-2010**

No	Uraian	Sat.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kolam	ton	483,50	492,50	498,00	680,7	759,11	1.200,10
2	Minapadi	ton	9,48	5,87	9,10	-	-	-
3	Karamba Apung	ton	46,50	51,20	53,10	63,00	71	115,4
4	Karamba Tancap	ton	147,80	135	176,20	135,00	144	324,10
5	Pembenihan							
	- Unit Pembenihan Rakyat	ekor	7.250.000	9.750.000	13.788.100	7.821.000	21.434.250	36.290.580
	- Balai Benih Ikan	ekor	1.151.000	1.218.828	5.758.745	2.197.830	1.289.900	1.302.942
	- Ikan Hias	ekor	400.000	325.000	505.000	555.000	606.000	523.800
6	Kolam Pemancingan	ton	410	425	437	460,00	487	500
7	Penangkapan	ton	1.026,70	1.042,80	1092,10	1090,80	1.204	1.216,80
8	Pengolahan	ton	31.065	31.250	32.650	32.800	35.810	31.950

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

- 2) Perkembangan capaian konsumsi protein hewani asal ikan setiap tahun selalu meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar rata-rata 0,28%. Untuk lebih jelasnya perkembangan konsumsi protein hewani yang berasal dari ikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.132**  
**Konsumsi Protein Hewani Asal Ikan**

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	17,98	18,11	18,16	18,18	18,19	18,23

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

- 3) Perkembangan jumlah kelompok pembudidaya ikan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perikanan tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.133**  
**Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan**

No	KELAS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN	Sat	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kelas Pemula	Kelompok	91	182	182	182	182	182
2.	Kelas Lanjut	Kelompok	22	3	3	3	3	3
3.	Kelas Madya	Kelompok	4	4	4	4	4	4
4.	Kelas Utama	Kelompok	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

**Tabel 2.134**  
**Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perikanan**

No	URAIAN	Sat	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pembudidaya Ikan Pembesaran	RTP	4,455	4,455	3,455	2,811	2,811	2,811
2.	Pembudidaya Ikan Pembenihan	RTP	120	120	185	185	185	185
3.	Nelayan	RTP	1,576	1,412	1,589	1,607	1,607	1,607
4.	Pedagang Ikan	RTP	80	80	80	80	80	80
5.	Pengolah Ikan	RTP	122	120	120	125	125	125
6.	Pengusaha Kolam Pancingan	RTP	56	58	60	60	61	61

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

### 32. Urusan Pilihan Perdagangan

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar tradisional.

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan penerbitan SIUP dan TDP

Perkembangan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang mendukung perkembangan sektor perdagangan selama Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. :

**Tabel 2.135**  
**Data Penerbitan SIUP**

No	Bentuk Perusahaan	Kondisi awal (2005)	Penambahan penerbitan SIUP					Kondisi Akhir (2010)
			2006	2007	2008	2009	2010	
1	Perusahaan Besar	95	25	20	12	4	23	179
2	Perusahaan Menengah	452	60	47	29	22	50	660
3	Perusahaan Kecil	5.916	509	421	892	330	560	8.628
	<b>Jumlah</b>	<b>6.463</b>	<b>594</b>	<b>488</b>	<b>933</b>	<b>356</b>	<b>633</b>	<b>9.467</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

**Tabel 2.136**  
**Data Penerbitan TDP**

No	Bentuk Perusahaan	Kondisi awal (2005)	Penambahan penerbitan TDP					Kondisi Akhir (2010)
			2006	2007	2008	2009	2010	
1	PT	311	46	29	43	41	85	555
2	Koperasi	247	23	15	12	10	15	322
3	CV	673	93	75	85	92	143	1.161
4	Fa	1	0	0	0	0	0	1
5	Perorangan	7021	433	307	1091	379	557	9.788
6	Bentuk Perusahaan Lain	47	0	1	0	2	0	50
	<b>Jumlah</b>	<b>8300</b>	<b>595</b>	<b>427</b>	<b>1231</b>	<b>524</b>	<b>808</b>	<b>11.877</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

2) Perkembangan sarana perdagangan di Kabupaten Semarang

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan sebanyak 3.394 unit menjadi 17.685 unit dari 14.291 unit tahun 2005. Peningkatan sarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.137**  
**Jumlah Sarana Perdagangan Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	2005						2010					
		Toko (unit)	Kios (unit)	Warung (unit)	Bank (Unit)	Kaki lima (unit)	Pasar Non Permanen (unit)	Toko (unit)	Kios (unit)	Warung (unit)	Bank (Unit)	Kaki lima (unit)	Pasar Non Permanen (unit)
1	Ambarawa	1.673	221		12	544	1	1.756	249	173	16	549	
2	Bancak	512	19		1	35		537	49	34	2	39	
3	Bandungan	551	98			250		752	113	108	3	251	
4	Banyubiru	462	29		1	37		600	103	40	1	38	
5	Bawen	361	60		3	133		397	60	87	2	133	
6	Bergas	1.243	92		6	40		1.305	92	208	6	41	
7	Bringin	284	16		3	76		302	8	88	3	78	
8	Getasan	548	39		3	87		575	17	76	4	89	
9	Kaliwungu	264	37		3	21	5	277	71	69	3	23	5
10	Jambu	195	42		4	87	3	204	44	94	3	89	3
11	Pabelan	337	26		1		3	380	26	34	5		3
12	Pringapus	903	60		2			948	60	98	1		3
13	Sumowono	240	62		7	23		252	62	72	4	24	
14	Suruh	495	45		1		5	519	78	56	6		5
15	Susukan	356	19		2		1	462	78	43	4		1
16	Tengaran	724	93		4	27		760	368	109	2	28	
17	Tuntang	203	50		4	90	1	484	50	126	6	91	1
18	Ungaran Barat	1.348	246			194		1.415	259	113	21	195	2
19	Ungaran Timur	324	171			120	1	341		103	2	120	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.023</b>	<b>1.425</b>		<b>71</b>	<b>1.764</b>	<b>20</b>	<b>12.266</b>	<b>1.787</b>	<b>1.731</b>	<b>94</b>	<b>1.788</b>	<b>19</b>
	<b>TOTAL</b>							<b>14.291</b>					<b>17.685</b>

Sumber : Dinas Ferindustri dan Perdagangan Kabupaten Semarang

- 3) Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.138**  
**Perkembangan Jenis Pasar Per Kecamatan**  
**Tahun 2005 dibanding Tahun 2010**

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2005					TAHUN 2010				
		Pasar Perbe lanjauan	Pasar Umum	Pasar Hewan	Pasar Buah	Lain- lain (sayur)	Pasar Perbe lanjauan	Pasar Umum	Pasar Hewan	Pasar Buah	Lain- lain (sayur)
1	Ambarawa	2	3				8	3			
2	Bancak		1					1			
3	Bandungan		2			1	2	2			1
4	Banyubiru		4				2	4			
5	Bawen			1			2		1		
6	Bergas		1				3	1			
7	Bringin		3				2	3			
8	Getasan		4				2	4			

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2005					TAHUN 2010				
		Pasar Perbe- lanjauan	Pasar Umum	Pasar Hewan	Pasar Buah	Lain-lain (sayur)	Pasar Perbe- lanjauan	Pasar Umum	Pasar Hewan	Pasar Buah	Lain-lain (sayur)
9	Kaliwungu		2				2				
10	Jambu						2	2			
11	Pabelan		2				2				
12	Pringapus		2				2	2			
13	Sumowono		1				2	1			
14	Suruh		4				2	4			
15	Susukan		1				2	1			
16	Tengaran		2					2			
17	Tuntang		4					4			
18	Ungaran Barat		3				3	3			
19	Ungaran Timur	4					9				
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

- 4) Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat mulai pemasok barang hingga penyedia jasa transportasi dan tenaga kerja.

### 33. Urusan Pilihan Perindustrian

Dalam Kegiatan perekonomian di Kabupaten Semarang, sektor industri mempunyai peran yang cukup penting, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga konstan yaitu 46,32%.

Jumlah industri di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan, Industri Kecil yang terdiri dari industri formal dan non formal pada tahun 2005 berjumlah 9.773 meningkat menjadi 11.062 pada tahun 2010. Penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari 24.091 orang pada tahun 2005, menjadi 29.667 orang pada tahun 2010.

Peningkatan juga terjadi pada industri menengah besar yang pada tahun 2005 berjumlah 140 unit menjadi 176 unit tahun 2010, penyerapan tenaga kerja meningkat dari 63.763 orang pada tahun 2005 menjadi 72.246 orang tahun 2010. Rincian capaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.139**  
**Realisasi Perkembangan Industri di Kabupaten Semarang**

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>Industri Kecil</b>							
<b>Jumlah Unit Usaha :</b>							
Formal	unit	951	1.060	1.192	1.313	1.341	1.469
Non Formal	unit	8.821	8.969	9.111	9.253	9.405	9.593
<b>Jumlah</b>	<b>unit</b>	<b>9.773</b>	<b>10.029</b>	<b>10.303</b>	<b>10.570</b>	<b>10.746</b>	<b>11.062</b>
<b>Jumlah Tenaga Kerja:</b>							
Formal	orang	8.329	9.056	9.812	10.706	10.918	12.003
Non Formal	orang	15.762	16.019	16.279	16.539	16.804	17.664
Nilai Produksi	Juta- Rp	315.091	350.328	393.241	401.789	404.174	543.837
<b>Industri Menengah Besar</b>							
Jumlah Perusahaan	Unit	140	147	154	161	168	176
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	63.763	64.805	68.461	69.009	71.506	72.246

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Semarang

Jumlah industri kecil menengah formal sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 1.469 unit usaha. Terjadi kenaikan 54,47% dibanding kondisi tahun 2005 yang berjumlah 951 unit usaha. Jumlah industri kecil menengah non formal sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 9.593 unit usaha, mengalami kenaikan 8,75% dari tahun 2005 yang berjumlah 8.821 unit usaha.

Jumlah industri besar sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 176 unit usaha, mengalami kenaikan 25,71% dibanding tahun 2005 yang berjumlah 140 unit usaha.

### 34. Urusan Pilihan Transmigrasi

Kebijakan Program Pembangunan Ketransmigrasian Kabupaten Semarang secara umum diarahkan pada pengembangan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja serta dalam rangka mempercepat pengentasan masalah kemiskinan dan pengangguran serta upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang melalui Program Transmigrasi. Peminat mengikuti transmigrasi di Kabupaten Semarang masih besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya kesempatan kerja dan menurunnya lahan garapan produktif dipedesaan karena terjadinya alih fungsi.

Dalam rangka menumbuhkan minat/animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Semarang, setelah dilakukan penyuluhan dan pembinaan diharapkan tumbuh minat/animo masyarakat untuk bertransmigrasi.

Capaian kinerja dalam urusan transmigrasi tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah pendaftar calon transmigrasi tahun 2005-2010 ditunjukkan

Tabel berikut :

**Tabel 2.140**  
**Jumlah Pendaftar Calon Transmigran**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	Kecamatan	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Ungaran Barat	5	17	3	13	2	9	4	17	4	14	6	21
2	Ungaran Timur											6	21
3	Bergas	4	19	0	0	3	13	2	7	1	4	1	4
4	Pringapus	14	44	16	67	9	38	10	42	9	35	3	8
5	Bawen	3	12	4	18	3	14	6	26	7	28	3	14
6	Arbarawa	4	17	2	9	4	18	3	11	2	7	2	5
7	Sumowono	4	13	2	7	12	42	19	78	12	47	2	8

No	Kecamatan	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
8	Jambu	7	26	1	4	3	11	4	15	2	8	3	11
9	Banyubiru	9	35	4	14	9	34	18	73	16	67	7	24
10	Tuntang	14	40	9	37	14	53	13	49	14	48	2	7
11	Bringin	2	9	6	23	12	41	8	34	12	47	17	55
12	Bancak	3	10	2	9	7	27	6	21	7	29	0	0
13	Pabelan	14	50	12	47	16	67	13	53	18	75	10	32
14	Suruh	4	14	13	54	17	64	12	46	17	69	9	33
15	Getasan	9	32	4	15	8	33	7	27	12	46	6	20
16	Tengaran	13	37	6	23	12	51	9	38	15	62	1	5
17	Susukan	5	17	2	7	7	26	16	63	24	93	4	15
18	Kaliwungu	11	32	6	26	13	37	12	46	14	49	9	33
19	Bandungan											4	14
	<b>Jumlah</b>	<b>119</b>	<b>424</b>	<b>92</b>	<b>373</b>	<b>151</b>	<b>578</b>	<b>162</b>	<b>646</b>	<b>186</b>	<b>728</b>	<b>95</b>	<b>330</b>

Sumber : Dirsosnakertrans Kabupaten Semarang

Pada tahun 2010 terjadi penurunan pendaftar calon transmigran, hal ini disebabkan program transmigrasi dari Pusat ditempatkan hanya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Transmigran asal Kabupaten Semarang hanya berminat di Provinsi Sumatera, sedang di Provinsi Kalimantan dan Sulawesi peminatnya sedikit.

- a) Perkembangan jumlah dan tujuan pemberangkatan transmigrasi Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.141**  
**Jumlah dan Tujuan Pemberangkatan Transmigrasi**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2005-2010**

No	Tahun	Lokasi Penempatan	Jumlah	
			KK	Jiwa
1	2005	UPT. Randau Pandan Kab. Bungo Prov. Jambi	10	32
		UPT. Sulliran Kab. Bungo Prov. Kalimantan Timur	20	64
2	2006	UPT. Tanjungbuka Prov. Kalimantan Timur	3	9
		UPT. Janukedi Prov. Maluku Utara	20	70
3	2007	UPT. Janukedi Prov. Maluku Utara	11	39
		UPT. Karangcayo, Prov. Bengkulu	15	41
4	2008	UPT. Talangdonok. Prov. Bengkulu	10	39
		UPT. Patlean SP 2 Prov. Maluku Utara	12	52

No	Tahun	Lokasi Penempatan	Jumlah	
			KK	JIWA
		UPT. Capkala SP 3 Prov. Kalimantan barat	5	19
		UPT. Tebingjaya Prov. Jambi	10	31
		UPT. Parit SP 2 Prov. Sumatera Selatan	25	87
5	2009	UPT. Tanahbang Prov. Sumsel	10	31
		UPT. Keban Prov. Sumsel	15	45
		UPT. Kokobuka Prov. Sulteng	12	37
		UPT. Kepala Burung Prov, Kalbar	10	40
6	2010	UPT. Kondang Prov.Kalteng	10	39
		UPT. Pongan Kab.Boo Prov. Sulteng	9	35
		UPT. Tanjung Aur Prov. Bengkulu	10	32
		UPT. Kallorang Prov. Kaltim	14	46

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang

Kondisi penempatan transmigrasi umum dipengaruhi adanya Perjanjian Kerjasama antara daerah asal dengan daerah tujuan. Sebelum penempatan transmigrasi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan survey lokasi penempatan daerah tujuan oleh tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, Legislatif dan Instansi terkait.

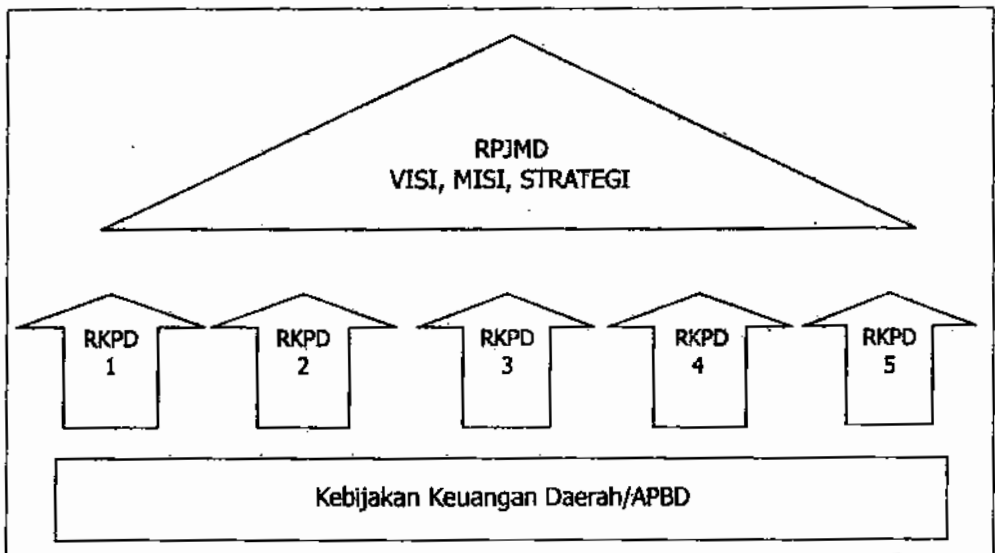
Setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Daerah Asal dan Pemerintah Daerah Tujuan diterbitkan Memorandum of Understanding (MoU) yang berisikan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Kéuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/ APBD**  
**Dengan RKPD dan Visi Misi, Strategi RPJMD**

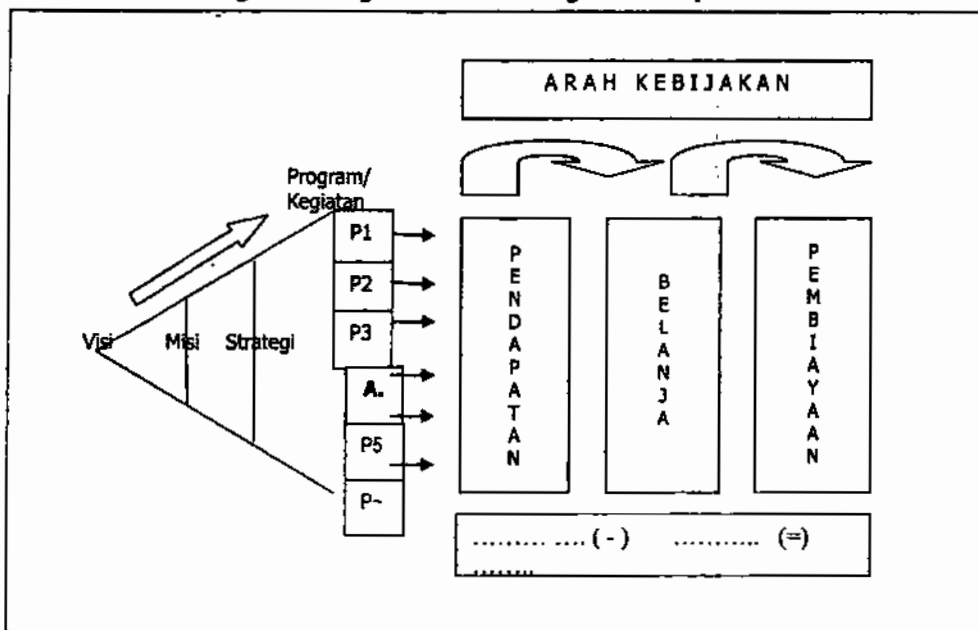


Arah kebijakan keuangan daerah yang dirumuskan oleh Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan belanja APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan prioritas strategis jangka menengah lima tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan struktur APBD, kebijakan keuangan daerah juga perlu dirinci berdasarkan komponen masing-masing, yang meliputi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini :

**Gambar 3.2**  
**Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD**





Gambar di atas menunjukkan pola hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan aktifitas keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian arah kebijakan belanja Kabupaten Semarang pada prinsipnya adalah agar belanja dapat lebih optimal dalam mendukung seluruh kegiatan. Adapun belanja yang tidak memiliki nilai tambah (*non value-added*) diminimalisir.

#### **A. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan keuangan Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

##### **1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Struktur APBD Kabupaten Semarang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, (3) Pembiayaan Daerah. Pada struktur pendapatan daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang sah meliputi Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya pada komponen Belanja Daerah terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Pada struktur Pemblayaan Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari: (1) Pemblayaan penerimaan meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Dana Talangan, (2) Pembiayaan pengeluaran meliputi Penyertaan modal (Investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, Pengeluaran dana talangan.

a. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2006–2010 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari Rp.571.988.038.000,00 menjadi Rp.843,410,270.000,00. Pendapatan dan belanja daerah tahun 2006 – 2010 memberikan gambaran pertumbuhan yang positif, walaupun pemulihan ekonomi nasional akibat krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya mengalami pasang surut.

• Secara lebih terperinci kontribusi sumber pendapatan daerah dapat dilihat seperti Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010 (%)**

NO	URAIAN	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010*
<b>1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	11,65	10,79	11,09	11,57	11,72
1.1	Hasil Pajak Daerah	2,63	2,42	2,40	2,62	3,11
1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,15	5,76	5,68	6,68	7,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,39	0,31	0,39	0,51	0,53
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,48	2,3	2,62	1,76	1,07
<b>2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	82,41	80,79	79,42	79,27	72,47
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Pusat	4,78	4,67	6,04	5,81	5,99
2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,09	-	-	-	0,06
2.3	Dana Alokasi Umum	72,11	69,45	65,65	65,13	60,34
2.4	Dana Alokasi Khusus	4,95	6,66	7,73	8,33	6,08
2.5	Dana Penyeimbang (AD HOC-DPU)	0,48	-	-	-	0,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	5,94	8,42	9,49	9,15	15,81
3.1	Hibah	-	-	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4,86	4,44	4,75	5,02	4,44
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	1,55	1,17	0,04	7,39
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,08	2,42	3,56	2,17	3,05
3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	1,92	0,93
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: DPPKD, diolah \* tahun 2010, data unaudited

Dari proporsi kontribusi sumber pendapatan sebagaimana tabel 3.1 di atas, diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Semarang masih didominasi dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, yaitu berkisar 80 % dan menurun pada kisaran 70 % pada tiga tahun terakhir.

Pada beberapa sumber pendapatan tertentu yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus adalah sumber pendanaan yang sudah ditentukan alokasi penggunaannya. Pada tabel 3.2 dibawah ini menggambarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan yang belum terikat alokasi penggunaannya.

**Tabel 3.2.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2006-2010**  
**Kabupaten Semarang**

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 <sup>1)</sup> (Rp)	
1	PENDAPATAN <sup>2)</sup>	537.465.899.430	596.868.189.767	663.171.299.180	695.634.670.915	755.494.974.306	8,91
1.1	Pendapatan Asli Daerah	66.625.755.644	70.860.501.623	82.942.880.537	90.399.871.349	98.831.140.360	10,43
1.1.1	Pejak daerah	15.028.514.397	15.895.420.593	17.943.901.028	20.439.129.487	26.228.584.340	15,24
1.1.2	Retribusi daerah	35.263.864.308	37.623.778.526	42.495.508.727	52.201.869.822	59.029.289.724	13,93
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.237.094.058	2.045.079.283	2.908.977.565	4.018.979.431	4.510.450.025	21,01
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	14.164.185.881	15.096.322.211	19.590.493.217	13.729.892.609	9.062.816.271	-6,09
1.2	Dana Perimbangan	440.298.798.309	486.668.126.023	535.888.358.053	550.694.056.001	556.878.397.681	6,13
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	27.828.796.209	30.678.126.023	44.722.482.053	41.989.139.001	47.961.378.681	16,03
1.2.2	Dana alokasi umum	412.468.000.000	455.990.000.000	491.166.076.000	508.704.917.000	508.915.019.000	5,47
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.543.347.977	39.339.563.121	44.339.860.590	54.550.743.566	99.747.436.265	36,85
1.3.1	Retah	-	-	-	-	-	0,00
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya <sup>3)</sup>	27.794.347.977	29.166.103.561	35.539.971.176	39.193.915.585	37.413.360.665	8,13
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus <sup>4)</sup>	2.749.000.000	10.173.459.560	8.779.889.414	15.356.828.000	62.334.075.600	110

Sumber: DPPKD Kabupaten Semarang  
<sup>1)</sup> tahun 2010, data unaudited

<sup>2)</sup> Tidak termasuk pendapatan yang bersumber dari DAK, DBHCT, Bantuan Keuangan Provinsi

Pada Tabel 3.2 tersebut di atas disajikan data rata-rata pertumbuhan pendapatan, yang dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama lima tahun, baik menurut jenis maupun rincian, selanjutnya akan dijadikan dasar perhitungan proyeksi pendapatan daerah pada lima tahun ke

depan, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

b. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja yang penganggarannya didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah.

Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Proporsi realisasi belanja daerah adalah sebagaimana Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Proporsi Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja**  
**Tahun 2006-2010 (%)**

NO	BELANJA DAERAH	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010*
1	Belanja Tidak Langsung	59,347	55,379	58,69	66,947	70,948
1.1	Belanja pegawai	49,594	45,396	50,528	52,752	61,489
1.2	Belanja bunga	0,004	0	0,003	0,002	0,001
1.3	Belanja subsidi	0	0,001	0,002	0,007	0,012
1.4	Belanja hibah	3,5	3,586	2,529	7,866	3,988

NO	BELANJA DAERAH	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010*
1.5	Belanja bantuan sosial	0,342	1,517	1,089	1,024	1,009
1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,07	0,009	0	0,043	0,020
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Lainnya	5,649	4,724	4,502	5,148	4,331
1.8	Belanja tidak terduga	0,188	0,146	0,039	0,104	0,097
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>40,653</b>	<b>44,621</b>	<b>41,31</b>	<b>33,053</b>	<b>29,052</b>
2.1	Belanja pegawai	2,883	5,088	5,116	4,162	3,969
2.2	Belanja barang dan jasa	18,518	18,169	15,534	17,279	16,090
2.3	Belanja modal	19,252	21,364	20,659	11,612	8,993
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Apabila dilihat dari proporsi realisasi belanja pada tabel 3.3, maka belanja tidak Langsung tahun 2006 persentasenya mencapai 59,34% dan pada tahun 2010 mencapai 70,94%. Kenaikan proporsi belanja tidak langsung ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji PNSD dan kenaikan penghasilan guru. Sebaliknya pada proporsi belanja langsung cenderung mengalami penurunan mulai Tahun 2008, 2009 dan Tahun 2010.

#### c. Kinerja Realisasi Pembiayaan

**Pembiayaan** (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Dana Talangan, dan hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara

pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal daerah, Pengeluaran dana Talangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, secara terperinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006-2010**

No	Pembayaran Daerah	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010*
1	Penerimaan Pembiayaan	71.511.917.000	106.982.782.000	118.717.744.000	64.653.892.000	54.339.288.000
	Penggunaan SILPA	70.100.415.000	106.019.102.000	109.933.734.000	61.439.178.000	53.658.435.000
	Pencadangan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Pengisian Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	784.010.000	1.189.354.000	523.930.000
	Penerimaan Dana Talangan	-	-	-	2.000.000.000	2.500.000.000
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	1.411.801.000	963.650.000	-	-	-
	Penerimaan Pengembalian Pinjkt Deposito Mandiri	-	-	-	25.000.000	-
	Koreksi Pemindahbukuan Kas BP ke TGR	-	-	-	-	(343.076.000)
	Koreksi Pemindahbukuan Kas BP ke Piutang Lainnya	-	-	-	-	(0,9)
2	Pengeluaran Pembiayaan	69.13.403.000	1.329.227.000	3.011.845.000	2.219.211.000	2.517.266.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.891.711.000	35.261.000	2.971.635.000	204.000.000	-
	Pembayaran Pokok Hutang	17.267.000	956.975.000	15.210.000	15.211.000	17.266.000
	Pembelian Pinjaman Daerah	1.404.425.000	336.961.000	-	-	-
	Kesalahan Pinjkt Deposito Mandiri	-	-	25.000.000	-	-
	Pengeluaran Dana Talangan	-	-	-	2.000.000.000	2.500.000.000
	Pembiayaan Netto	65.198.514.000	105.653.535.000	107.705.898.000	62.434.321.000	53.822.822.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SILPA)	106.019.102.000	109.933.734.000	61.439.178.000	53.645.356.000	51.727.093.000

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Dari Tabel 3.4 diketahui pembiayaan netto untuk menutup defisit daerah terbesar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, yang selama dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.

## 2. Neraca Daerah:

Neraca daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, yang meliputi asset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Neraca memiliki arti penting untuk :

- a. Memberikan informasi bagi manajemen pemerintah daerah mengenai likuiditas keuangan daerah, artinya neraca akan memberikan informasi tentang asset-asset pemerintah daerah yang dapat dijadikan uang kas dalam waktu dekat atau dalam satu tahun anggaran, dan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dalam satu anggaran berikutnya.
- b. Memberikan informasi bagi manajemen pemerintah daerah mengenai fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan menggunakan asset-asset keuarigan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dengan kualitas asset yang dimilikinya, manajemen dapat memanfaatkannya secara lebih terarah dalam upaya untuk mendapatkan pendapatan bagi daerah yang berasal dari kegiatan operasional, serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- c. Diharapkan akan tercipta adanya tata pemerintahan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif, artinya dengan adanya neraca maka segala kebijakan yang dibuat oleh



manajemen pemerintah daerah akan tercermin di dalam informasi yang disajikan secara transparan di dalam neraca, dan masyarakat dapat menilai hasil-hasil dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagaimana yang tercermin di neraca.

Perkembangan Neraca daerah Kabupaten Semarang 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Neraca Daerah Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2006-2010\***

No	Berkas	Tabel					Saldo Awal Periode	Saldo Akhir Periode
		2006	2007	2008	2009	2010		
1	ASET							
1.	ASET LANCAR							
1.1	Kas di Kas Daerah	103.635.936,789,00	106.171.981.438,00	60.522.405.407,00	52.890.151.040,00	51.685.298.113,00	(7,96)	
1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.403.165.359,00	1.761.752.848,00	1.174.639.772,00	1.663.824.658,00	71.834.129,00	(28,34)	
1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-		
1.4	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-		
1.5	Piutang Pajak	79.577.995,00	233.635.780,00	1.499.515.706,00	2.077.061.662,00	462.802.644,00	87,69	
1.6	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah							
1.7	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah							
1.8	Bagian Lancar Tagihan Perjualan Angsuran							
1.9	Bagian Lancar Tuntutan Perbandharaan							
1.10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2.910.000,00	2.910.000,00					
1.11	Piutang Lainnya	6.218.947.543,00	2.498.197.956,00	1.261.402.639,00	2.011.720.917,00	4.328.096.985,75	11,36	
1.12	Perediaan	4.499.441.529,00	7.031.996.206,00	8.531.668.114,00	2.317.288.972,00	7.417.812.967,75	(1,39)	
1.13	Salanj Dibeayar Dimuka	329.598.756,00	2.125.205.886,00	440.282.570,00	644.148.740,25	549.562.954,84	25,81	
	Jumlah Aset Lancar	117.149.477.571,00	121.825.880.114,00	73.389.894.108,00	66.582.184.972,00	64.274.637.706,34	(8,15)	
2.	INVESTASI JANGKA PANJANG							
2.1	Investasi Nonpermanen							
	1 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara							
	2 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah							
	3 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya							
	4 Investasi dalam Surat Utang Negara							
	5 Investasi dalam Proyek Pembangunan							
2.1.1	Investasi Non Perannan Lainnya	8.126.083.500,00	11.852.440.842,00	11.305.748.282,00	9.988.571.356,00	14.849.223.231,00	207,05	
	Jumlah Investasi Nonpermanen	8.126.083.500,00	11.852.440.842,00	11.305.748.282,00	9.988.571.356,00	14.849.223.231,00	207,05	
2.2	Investasi Persehan							
2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23.749.811.962,00	24.193.553.315,00	26.641.553.315,00	26.846.553.315,00	26.847.567.715,00	7,95	

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2006	2007	2008	2009	2010	
2.2.2	Investasi Permanen Lainnya						
	Jumlah Investasi Permanen	23.749.811.962,00	24.193.553.315,00	26.641.553.315,00	26.845.553.315,00	26.847.567.715,00	7,55
	Jumlah Investasi Jangka Panjang (A + B)	31.875.895.462,00	36.045.994.157,00	37.947.301.597,00	36.834.124.671,00	41.696.790.946,00	18,14
<b>3.</b>	<b>ASET TETAP</b>						
3.1	Tanah	468.470.728.098,00	536.065.492.448,00	537.352.023.915,00	538.177.308.415,00	542.441.469.115,00	2,25
3.2	Peralatan dan Mesin	103.800.794.505,00	130.640.614.663,00	150.626.846.305,00	187.126.700.506,00	211.161.931.561,63	19,81
3.3	Gedung dan Bangunan	338.694.059.118,00	406.109.999.068,00	470.233.561.341,00	540.314.816.877,63	563.541.368.073,00	11,76
3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	386.256.809.950,00	430.727.126.796,00	495.760.779.990,00	529.777.669.763,00	561.779.590.441,00	9,44
3.5	Aset Tetap Lainnya	29.105.365.245,00	31.530.483.085,00	32.335.827.794,00	35.628.123.441,00	36.883.524.625,00	7,41
3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.480.994.550,00	4.893.575.151,00	5.934.373.516,61	3.072.586.000,00	8.808.078.000,00	343,85
3.7	Akumulasi Penyusutan						
	Jumlah Aset Tetap	1.351.808.771.466,00	1.539.967.291.210,61	1.692.263.412.861,61	1.834.097.205.002,63	1.924.615.961.815,63	8,60
<b>4.</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						
4.1	Dana Cadangan						
	Jumlah Dana Cadangan						
<b>5.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
5.1	Tegihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
5.2	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
5.3	Tuntutan Ganti Rugi	383.785.310,00	350.683.310,00	353.595.310,00	352.995.310,00	695.636.310,00	17,81
5.4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
5.5	Aset Tak Berwujud	1.217.401.000,00	2.024.909.100,00	2.442.685.081,00	2.608.634.081,00	3.224.850.921,00	30,78
5.6	Aset Lain-Lain	-	4.661.546.791,00	6.823.771.941,00	9.983.112.148,00	9.694.793.558,00	12,01
	Jumlah Aset Lainnya	1.601.186.310,00	7.037.139.20,00	9.620.052.332,00	12.944.741.539,00	13.575.280.789,00	84,99
	JUMLAH ASET (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.502.435.330.809,00	1.704.876.304.682,61	1.813.220.660.898,61	1.950.458.256.185,56	2.044.162.691.346,97	8,25
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	257.846.953,00	873.539.953,00		14,10
1.2	Utang Bunga						
1.3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	35.261.416,00	33.249.483,00	29.145.765,37	27.088.745,94	25.031.727,14	(8,10)
1.4	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemda						
1.5	Bagian Lancar Utang D.N - Lembaga Kau- Bank						
1.6	Bagian Lancar Utang D.N - Lembaga Kau bukan Bank						
1.7	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi						
1.8	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya						
1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.173.383.066,00	2.539.987.380,61	664.606.715,00	2.985.628.995,94	2.087.770.759,00	23,39
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.208.644.484,00	2.573.236.863,61	951.599.433,37	3.886.257.694,88	2.112.802.486,14	36,85
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
2.1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	208.106.267,00	174.856.784,00	144.232.017,67	115.141.659,10	88.108.319,33	(20,09)
2.2	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
2.3	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
2.4	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keu. bukan Bank						
2.5	Utang Dalam Negeri - Obligasi						

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	Persentase Realisasi
2.6	Utang Jangka Panjang Lainnya						
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	208.106.267,00	174.856.784,00	144.232.017,67	115.141.659,10	88.108.319,33	(20,89)
	JUMLAH KEWAJIBAN (1 + 2)	1.416.750.751,00	2.748.093.647,61	1.095.831.451,94	4.001.399.353,98	2.200.910.805,47	19,87
III	EBLITAS DANA						
2.	EBLITAS DANA LANCAR						
1.1	Sisa Lebih Pembelian Anggaran (SILPA)	106.019.102.146,00	109.933.734.286,00	61.439.170.226,00	83.658.036.737,00	51.727.092.244,00	(6,42)
1.2	Cadangan Piutang	8.301.336.138,00	2.734.843.734,00	2.720.918.240,00	4.088.782.569,88	4.580.989.628,75	12,28
1.3	Cadangan Persediaan	4.489.441.529,99	7.031.996.704,00	8.531.668.114,00	7.317.285.972,80	7.417.012.967,75	(1,28)
1.4	Cadangan Belanja Biaya Pemeliharaan	329.598.756,00	2.125.205.886,00	446.282.570,00	646.140.740,25	549.562.954,84	35,81
1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembiayaan Utang Jangka Pendek	(1.208.644.984,00)	(2.573.216.863,61)	(683.752.480,37)	(3.012.717.741,88)	(2.112.802.486,14)	20,22
	Jumlah Eblang Dana Lancar	115.546.833.067,00	119.252.643.290,39	72.438.294.674,03	62.698.227.274,00	62.181.855.318,26	(6,88)
2.	EBLITAS DANA JANGKA PANJANG						
2.1	Direalisasikan dalam Investasi Jangka Panjang	31.875.825.463,00	36.045.994.157,00	37.947.301.997,00	26.834.124.671,00	41.686.790.946,00	18,44
2.2	Direalisasikan dalam Aset Tetap	1.351.808.771.466,00	1.539.967.291.210,61	1.692.263.412.862,34	1.894.097.285.002,63	1.824.615.961.815,63	4,88
2.3	Direalisasikan dalam Aset Lainnya	1.601.186.310,00	7.037.138.201,00	9.620.052.332,00	12.944.741.539,00	11.575.280.789,00	84,98
2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembiayaan Utang Jangka Panjang	(208.106.267,00)	(174.856.784,00)	(144.232.017,67)	(115.141.659,10)	(88.108.319,33)	(20,89)
	Jumlah Eblang Dana Investasi	1.385.077.746.971,00	1.592.875.567.784,61	1.739.688.534.779,57	1.883.760.829.833,53	1.979.799.925.231,30	6,86
3.	EBLITAS DANA CADANGAN						
3.1	Direalisasikan dalam Dana Cadangan						
	Jumlah Eblang Dana Cadangan						
	JUMLAH EBLITAS DANA (1 + 2 + 3)	1.301.018.580.058,00	1.782.128.211.035,00	1.612.124.829.448,20	1.546.456.656.831,58	2.041.961.780.541,50	8,24
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EBLITAS DANA (II + III)	1.302.435.330.809,00	1.781.876.304.682,61	1.813.220.660.899,24	1.930.459.296.185,56	2.044.162.091.346,57	8,25

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Data pada Tabel 3.5 tersebut di atas dapat dilakukan analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran

2010, pada perhitungan rasio lancar yang merupakan rasio antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek diperoleh angka 30,42, sehingga dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang sangat mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan pada rasio quick yang dihitung dengan formula aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek diperoleh angka 26,91, sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Semarang sangat mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meskipun sudah dikurangi jumlah persediaan atau tidak ada persediaan.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio total hutang Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap total asset adalah sebesar 0,0010767, dari rasio tersebut maka jumlah asset yang dimiliki jauh lebih besar dibanding jumlah hutang jangka panjangnya, sehingga Pemerintah kabupaten Semarang sangat mampu dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada rasio hutang terhadap modal yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah modal dengan hutang jangka panjang, maka diperoleh angka rasio sebesar 0,00107784, sehingga diketahui bahwa Kabupaten Semarang sangat mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Rasio Aktifitas digunakan untuk melihat tingkat aktifitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Pada perhitungan rata-rata umur piutang yang membandingkan antara jumlah hari dalam satu tahun dengan perputaran piutang diperoleh angka 1,88, maka dapat diketahui rata-rata umur piutang yang ada di Kabupaten Semarang berlangsung lebih dari satu tahun, atau dapat diartikan bahwa setiap piutang yang ada, baru dapat tertagih 1 (satu) tahun

lebih 9 (sembilan) bulan dalam tahun berikutnya. Selanjutnya pada perhitungan rata-rata umur persediaan yang membandingkan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun dengan perputaran persediaan diperoleh angka 1,01, sehingga diketahui rata-rata umur persediaan yang ada di Kabupaten Semarang berlangsung selama 1 (satu) tahun, atau dapat diartikan bahwa penggunaan persediaan di Kabupaten Semarang hampir sama untuk tiap tahunnya.

Perkembangan rasio keuangan Kabupaten Semarang Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 dapat diketahui dari Tabel 3.6 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Rasio Keuangan**  
**Kabupaten Semarang**

NO	Uraian	Tahun		
		2008	2009	2010*
1.	Rasio lancar (current ratio)	77,122	17,132	30,42
2.	Rasio quick (quick ratio)	68,16	15,25	26,91
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,000604356	0,002051518	0,0010767
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,000604722	0,002055735	0,00107784
5.	Rata-rata umur piutang	1,330202222	1,591216336	1,88
6.	Rata-rata umur persediaan	0,903642749	1,076622226	1,01

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Dari Tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam tiga tahun memiliki likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan solvabilitas guna pemenuhan kewajiban jangka panjangnya.

## **B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan

daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

#### 1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu wujud penggunaan anggaran adalah untuk memenuhi kebutuhan belanja. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama.

Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015 ini, kategori belanja aparatur didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. yang selanjutnya dirinci pada Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010\***

NO	URAIAN	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010* (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	401.390.065.609,00	416.636.481.268,00	519.896.532.530,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	364.950.274.816,00	411.492.603.519,00	481.069.317.688,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	30.952.025.000,00	-	34.207.296.000,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.844.675.000,00	2.544.000.000,00	2.668.000.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2.643.090.793,00	2.599.877.749,00	1.951.918.842,00
B	<b>Belanja Langsung</b>	<b>51.407.699.176,00</b>	<b>42.632.169.561,00</b>	<b>39.172.200.181,00</b>
1	Belanja Honorarium PNS	4.379.722.800,00	4.691.525.000,00	4.862.878.450,00
2	Belanja Uang Lembur	1.658.041.313,00	2.192.055.850,00	2.035.202.550,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	27.000.000,00	-	6.750.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.016.561.800,00	-	-
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	896.719.180,00	855.674.954,00	707.926.631,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	8.997.618.179,00	11.466.976.876,00	10.723.378.400,00
7	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	1.932.763.439,00	117.417.500,00	134.235.000,00
8	Belanja Pakalan Khusus dan Hari-hari Tertentu	783.119.300,00	697.829.500,00	537.203.500,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	17.286.072.539,00	15.781.998.850,00	16.109.810.000,00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	139.750.000,00	136.500.000,00	187.500.000,00
12	Belanja Modal (Alet-alat angkutan darat bermotor, peralatan perkengkapan kantor, komputer, mebelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga)	11.290.330.626,00	6.692.191.831,00	3.947.315.650,00
	<b>TOTAL</b>	<b>452.797.764.785,00</b>	<b>459.268.650.829,00</b>	<b>559.068.732.711,00</b>

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Pada Tabel 3.7 menunjukkan bahwa realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur semakin meningkat pada tiga tahun terakhir, selanjutnya dapat dihitung prosentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

**Tabel 3.8.**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Semarang**

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
1	Tahun Anggaran 2008	452.797.764.785,00	797.408.226.134,00	56,7
2	Tahun Anggaran 2009	459.268.650.829,00	792.014.226.474,00	57,99
3	Tahun Anggaran 2010*	559.068.732.711,00	848.022.470.007,00	65,93

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dibandingkan dengan APBD selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang relatif besar yakni 56,78% pada tahun 2008, sebesar 57,99% pada Tahun 2009 dan 65,93% pada tahun 2010. Hal ini terjadi disebabkan karena terjadinya pergeseran alokasi Belanja Langsung ke Belanja Tidak Langsung karena kenaikan Gaji PNSD sebesar 10% pada Tahun 2009 dan 5% pada Tahun 2010 yang tidak diimbangi dengan kenaikan alokasi DAU.

## 2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

Pada Tabel 3.9 di bawah ini disajikan perhitungan defisit riil Kabupaten Semarang Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010.



**Tabel 3.9**  
**Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010\***

NO	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	748.129.660.574	781.019.129.985	843.410.273.414
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	794.396.380.841	789.795.015.474	845.505.203.279
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.011.845.293	2.219.211.000	2.517.266.728
	Defisit riil	(49.278.565.560)	(10.995.096.489)	(4.612.196.593)

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Pada Tabel 3.9 di atas ditunjukkan bahwa realisasi pendapatan pada tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan, tetapi juga diimbangi dengan peningkatan realisasi belanja yang signifikan, pada realisasi pengeluaran pembiayaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan defisit riil. Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir defisit riil semakin menurun, hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang semakin memperhitungkan prediksi kemampuan keuangan, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya efisiensi belanja pada masa tersebut.

Selanjutnya Tabel 3.10 di bawah ini akan menyajikan komposisi penutup defisit riil pada Tahun 2008, 2009 dan Tahun 2010.

**Tabel 3.10.**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010**

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2008		2009		2010*	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	109.933.734.286	223,09	61.439.178.226	558,79	53.658.435.737	1.163,40
2	Pencairan Dana Cadangan						
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	784.009.500	1,59	1.189.354.000	10,82	523.930.000	11,36

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2008		2009		2010*	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	1.000.000.000	9,09	1.250.000.000	27,10
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	1.000.000.000	9,09	1.250.000.000	27,10
6	Penerimaan Piutang Daerah		-	25.000.000	0,23	-	-
7	Koreksi kas BP ke TGR		-		-	(343.076.800)	(7,44)
8	Koreksi kas BP ke piutang lainnya		-		-	(900)	(0,00)
9	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	61.439.178.226	124,68	53.658.435.737	488,02	51.727.092.244	1.121,53

Sumber : DPPKD, dicah \*tahun 2010, data unaudited

Tabel 3.10 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan komposisi penutup defisit riil, maka komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya memiliki proporsi yang paling tinggi. Seiring dengan kecenderungan penurunan defisit riil maka pada kondisi tiga tahun terakhir, jumlah maupun proporsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya juga semakin menurun.

Pada Tabel 3.11 di bawah ini akan ditampilkan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2008-2010\***

No.	Uraian	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010*	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1.	Jumlah SILPA	109.933.734.286	178,93	61.439.178.226	114,5	53.658.435.737	103,73
2.	Pelampauan penerimaan PAD	2.886.271.537	4,7	(2.195.176.651)	-4,09	(4.253.034.640)	-8,22
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	6.153.608.053	10,02	(3.046.696.929)	-5,68	718.362.778	1,39

No.	Uraian	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010*	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.972.479.682	4,84	21.534.520.565	40,13	477.028.276	0,92
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	44.487.986.670	72,41	33.151.434.526	61,78	55.044.981.721	106,41
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7.	Kegiatan lanjutan	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Dari perhitungan pada Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar Komposisi SILPA didominasi dari realiasi Sisa Penghematan Belanja yang perkembangannya mengalami fluktuasi yakni pada Tahun 2008 sebesar Rp. 44.487.487.986.670, pada tahun 2009 turun menjadi Rp. 33.151.434.526 dan naik kembali pada tahun 2010 menjadi Rp. 55.044.981.721. Sedangkan pada Pos Pelampauan Penerimaan PAD justru mengalami penurunan yakni dari Rp. 2.886.271.537 pada tahun 2008 menjadi (Rp.2.195,176.651) dan pada Tahun 2010 turun lagi menjadi (Rp.4.253.034.640).

### C. Kerangka Pendanaan

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah,

maka realisasi APBD pada masa lalu dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menyusun proyeksi kerangka pendanaan untuk perencanaan pembangunan daerah pada tahun selanjutnya. Pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015 ini, kerangka pendanaan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni melalui analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, serta penghitungan kerangka pendanaan.

1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis pengeluaran periodik wajib mengikat serta prioritas utama berfungsi untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan pengeluaran belanja maupun pembiayaan yang bersifat wajib serta sangat prioritas. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka disajikan data dan perhitungan rata-rata pertumbuhan sebagaimana Tabel 3.12 di bawah ini.

**Tabel 3.12**  
**Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Kabupaten Semarang**

NO	URAIAN	TAHUN			Rata-rata
		2008	2009	2010*)	Pertumb
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	412.720.096.478,00	463.847.970.620,00	529.575.599.314,00	13,28
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	364.950.274.816,00	411.492.603.519,00	481.069.317.688,00	14,83
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.844.675.000,00	2.544.000.000,00	2.668.000.000,00	-2,85

NO	URAIAN	TAHUN			Rata-rata Pertambah (%)
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010* (Rp)	
3	Belanja Bunga	20.051.707,00	15.936.378,00	11.823.631,00	-23,17
4	Belanja Subsidi	13.600.000,00	57.748.000,00	100.880.000,00	199,65
5	Belanja Bantuan Sosial	8.649.650.000,00	8.086.482.211,00	8.529.457.995,00	-0,52
6	Belanja Bagi Hasil	169.746.500,00	169.746.500,00	172.225.000,00	0,73
7	Belanja Bantuan Keuangan	35.763.668.455,00	40.659.691.011,00	36.203.682.000,00	1,37
8	Belanja Tidak Terduga	308.430.000,00	821.763.001,00	820.213.000,00	83,12
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>61.777.062.384,00</b>	<b>60.543.974.847,00</b>	<b>64.688.742.951,00</b>	<b>2,42</b>
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	44.595.100.433,00	42.928.820.997,00	45.143.034.036,00	0,71
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	27.000.000,00	-	6.750.000,00	-50,00
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	17.154.961.951,00	17.635.153.850,00	19.535.958.913,00	6,79
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	0,00
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	0,00
<b>C</b>	<b>Pembayaran Pengeluaran</b>	<b>3.011.845.293,00</b>	<b>219.211.000,00</b>	<b>17.266.728,00</b>	<b>-92,00</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal	2.971.635.000,00	204.000.000,00	-	-96,57
3	Pembayaran Pokok Utang	15.210.293,00	15.211.000,00	17.266.728,00	6,76
4	Pemindahbukuan ke Piutang	25.000.000,00	-	-	-50,00
	<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>477.509.004.155,00</b>	<b>524.631.156.467,00</b>	<b>594.278.608.993,00</b>	<b>11,57</b>

Sumber : DPPKD, diolah \*tahun 2010, data unaudited

Dari perhitungan tabel di atas diketahui bahwa dilihat dari total pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama maka rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 11,57%. Apabila dihitung berdasarkan masing-masing varian pengeluaran, maka belanja gaji dan tunjangan memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu 14,83%.

## 2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi yang disusun berdasarkan data realisasi masa sebelum tahun perencanaan, penyusunan proyeksi pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 ini adalah berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi lima tahun yang meliputi proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi pengeluaran yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada Tabel 3.13 di bawah ini.

**Tabel 3.13**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah**

Uraian	Rata-rata Pertumb %	Proyeksi				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>PENDAPATAN</b>	8,91	756.128.374.546	756.802.375.045	834.601.659.199	920.398.709.765	1.015.015.697.129
Pendapatan Asli Daerah	10,43	98.934.231.463	99.037.430.141	109.218.477.960	120.446.137.494	132.828.000.428
Pajak daerah	15,24	26.260.545.586	26.308.567.716	29.013.088.477	31.995.633.573	35.284.785.145
Retribusi daerah	13,93	59.111.505.608	59.193.836.002	65.278.962.343	71.989.639.672	79.390.174.630
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	21,01	4.519.927.182	4.529.424.251	4.995.049.064	5.506.540.108	6.074.818.031
Lain-lain PAD yang sah	-6,89	9.056.572.772	9.050.333.574	9.990.707.866	11.006.724.634	12.138.215.927
Dana Perimbangan	6,13	557.217.916.488	557.559.644.740	614.876.776.219	678.086.108.815	747.793.360.801
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	16,03	48.038.272.758	48.115.290.116	53.061.541.940	58.516.268.451	64.531.740.848
Dana alokasi umum	5,47	509.193.369.895	509.471.673.034	561.845.581.582	619.603.307.368	683.298.527.366
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	36,85	100.114.983.055	100.483.884.173	110.813.627.466	122.205.268.369	134.767.969.958
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	8,13	37.443.790.722	37.474.245.530	41.326.597.970	45.574.972.242	50.260.079.388
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	110	62.334.075.600	62.334.075.600	62.334.075.600	62.334.075.600	62.334.075.600

Sumber : DPPKD Kabupaten Semarang, diolah

Pada tabel 3.13 tersebut di atas diproyeksikan pendapatan daerah, berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Apabila dilihat secara totalitas pendapatan, maka rata-rata pertumbuhannya adalah 8,91%. Sedangkan apabila dilihat secara sektoral masing-masing jenis pendapatan maka rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar 10,43%, dan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan diproyeksikan sebesar 6,13%. Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi tidak dilakukan proyeksi karena sifat peruntukannya serta alokasi yang diterima tidak bisa dipastikan, karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 3.14 di bawah ini akan menyajikan proyeksi pengeluaran periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 3.14**  
**Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama**

URAIAN	Tingkat Pertumbuhan (%)	Perkiraan				
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Belanja Tidak Langsung		601.490.328.087,50	681.300.062.420,66	775.399.081.124,29	883.408.073.757,41	1.007.379.071.260,05
Belanja Gaji dan Tunjangan	14,83	552.415.350.930,32	631.842.513.070,81	725.548.293.536,69	833.153.462.234,03	956.716.101.602,05
Belanja Pembinaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	-2,85	2.592.021.504,37	2.518.206.817,91	2.446.494.143,76	2.376.823.679,82	2.309.137.288,66
Belanja Bunga	-23,17	9.084.635,29	6.980.139,89	5.363.180,04	4.120.760,61	3.166.168,44
subsidi	199,65	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	-0,52	8.485.407.827,18	8.441.585.155,33	8.397.968.804,54	8.354.617.608,00	8.311.470.396,90
Belanja Bagi Hasil	0,73	173.482.344,52	174.748.968,40	176.024.638,65	177.309.722,78	178.604.188,79
Belanja Bantuan Keuangan	1,37	36.697.980.785,81	37.199.028.368,32	37.706.916.890,70	38.221.739.754,16	38.743.591.635,21
Belanja Tidak Terpajak	83,12	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Langsung		66.329.462.528,89	68.067.187.397,58	69.904.202.348,61	71.846.629.328,47	73.901.244.408,21
Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	0,71	45.463.867.294,07	45.786.980.724,27	46.112.390.533,88	46.440.113.043,35	46.770.164.689,14
Belanja Bantuan Pendidikan PNS	-50,00	3.375.000,00	1.687.500,00	843.750,00	421.875,00	210.937,50

URAIAN	Tingkat Pertumbuhan (%)	PROYEKSI				
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Belanja Jasa Kantor (Gedung tagihan buku-buku kantor sopir listrik, ak, telepon dan selularnya)	6,79	20.862.220.284,82	22.278.519.173,31	23.790.968.064,73	25.406.094.411,12	27.130.868.801,58
Pembayaran Pendidikan		18.434.196,89	19.680.292,75	21.010.620,91	22.430.879,23	23.947.134,44
Pembentukan Dana Cadangan	0,00					
Pembayaran Pokok Utang	6,76	18.434.196,89	19.680.292,75	21.010.620,91	22.430.879,23	23.947.134,44
<b>TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITY UTAMA</b>		<b>667.838.224.863,27</b>	<b>749.388.930.110,98</b>	<b>845.324.294.145,01</b>	<b>956.274.133.962,12</b>	<b>1.081.304.262.822,70</b>

Sumber : DPPKD Kabupaten Semarang, diolah

Dari Tabel 3.14 di atas, proyeksi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib serta prioritas utama menunjukkan pertumbuhan yang cenderung naik dari tahun ke tahun.

### 3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama lima tahun mendatang. Besaran jumlah kapasitas riil akan dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan daerah serta pengeluaran periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama pada setiap tahun rencana, sehingga pertumbuhan naiknya jumlah pengeluaran tersebut tidak serta merta akan mengurangi kapasitas riil apabila dalam suatu tahun rencana diperoleh penerimaan dalam jumlah yang cukup atau berlebih yang mampu mengimbangi kenaikan pengeluaran.

Proyeksi atas kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada tabel 3.15 di bawah ini.



**Tabel 3.15**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Semarang**

URAIAN	Tingkat Pertumbuhan (%)	PROYEKSI				
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Pendapatan <sup>1)</sup>	8,91	822.794.998.336,51	896.137.602.256,83	976.017.846.246,29	1.063.018.484.875,76	1.157.774.218.587,88
Pencairan Dana Cadangan (sekaligus Perda)		-	-	-	-	17.500.000.000,00
Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran	-9,30	44.918.872.099,22	40.740.170.391,90	36.950.203.911,95	33.512.809.494,94	30.395.185.154,31
Total Penerimaan		867.713.870.435,72	936.877.772.648,73	1.012.968.050.158,24	1.096.531.294.370,88	1.205.669.406.662,18
Dikurangi:						
Selanjut dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	11,57	667.838.224.863,27	749.386.930.110,98	845.324.294.143,91	955.274.133.962,12	1.081.304.262.622,70
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN		199.875.645.572,45	187.490.842.537,74	167.643.756.014,33	141.257.160.408,57	124.365.143.839,48

Sumber : DPPKD Kabupaten Semarang, diolah

<sup>1)</sup> Tidak termasuk pendapatan yang bersumber dari DAK, DBHCT, Bantuan Keuangan Provinsi

Dari tabel 3.15 di atas diketahui bahwa berdasarkan perhitungan data realisasi tahun-tahun sebelumnya, komponen penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah diproyeksikan akan tumbuh naik sebesar 8,91% tetapi pada komponen sisa lebih riil perhitungan anggaran diproyeksikan akan tumbuh negatif 9,30% atau cenderung semakin menurun. Pada komponen pengeluaran yang wajib, mengikat serta prioritas utama diproyeksikan akan tumbuh positif 11,57%. Dengan demikian dapat dihitung kapasitas riil kemampuan keuangan yang merupakan total penerimaan dikurangi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama, pada tabel tersebut diperoleh gambaran proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan semakin menurun.

Setelah dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka akan dapat disusun rencana penggunaannya. Tabel 3.16 di bawah ini merupakan gambaran rencana penggunaan didasarkan pada pertumbuhan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 3.16**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Semarang**

NO	KATEGORI	Salah Tahun Dasar (Rp)	% Pembelian (%)	PROYEKSI				
				Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
I	Stipendium RI kemampuan keuangan	226.282.546.071,53		199.875.645.572,65	187.490.842.537,74	207.643.756.814,32	141.257.160.408,57	124.366.143.839,46
	Eksekusi Hibah Pengembangan Pemerintah I							
II.a	Belanja Langsung	885.586.278.851,49	-4,28	136.162.360.298,00	1.42.382.256.498,00	136.212.598.172,00	127.883.435.985,00	118.628.131.638,00
II.b	Pembelian Darah Cadangan (Sisa-sisa) I			2.980.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	4.880.000.000,00
II.c	Subsidi langsung yang tidak dapat pengikat untuk pembelian barang	64.688.742.851,00	2,41	66.329.042.378,00	64.887.247.397,00	69.804.202.348,61	1.048.625.328,47	72.982.244.428,21
II.d	Pengeluaran pembelian yang wajib dapat pengikat untuk pembelian barang	12.267.098,00	0,76	16.434.195,00	13.689.882,75	22.816.650,81	22.438.675,25	22.647.124,44
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b+II.c+II.d)	100.000.304.980,00		91.374.663.693,00	88.765.898.798,00	89.790.746.962,47	83.845.375.793,00	80.382.968.092,70
	Sisa kemampuan riil kemampuan keuangan daerah setelah pengikatan akibat pengeluaran prioritas I (I-II)	286.006.268.578,53		306.628.981.892,00	308.724.883.788,25	307.853.008.111,86	1.972.794.634,62	74.161.183.796,73
	Relevansi Anggaran Pengeluaran Prioritas II							
III.a	Belanja Tidak Langsung	388.878.315.831,00	18,11	388.544.059.481,00	431.920.448.138,00	388.511.211.866,86	1.107.805.504.958,97	1.379.128.125.804,33
	Belanja Tidak Langsung yang wajib dapat pengikat untuk pembelian barang	629.875.899.314,00		601.498.228.067,00	601.360.062.400,00	779.885.681.174,26	881.405.873.751,91	1.007.378.671.260,00
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a+III.b)	76.000.416.517,00		387.045.761.384,00	1.48.560.385.738,00	313.227.034.702,46	28.439.632.207,06	171.750.854.544,33
	Sisa kemampuan riil setelah pengikatan (I-III-III.a)	29.999.848.663,00		3.583.214.465,00	(48.800.001.858,25)	(136.588.838.699,61)	(242.225.723.873,84)	(287.886.879.792,63)

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang, diolah

Pada gambaran tabel tersebut di atas, prioritas pengeluaran yang harus didahulukan adalah yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas utama baik pada belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan, maupun yang berada pada belanja tidak langsung.

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **A. Permasalahan Pembangunan**

Dari kondisi umum daerah sebagaimana diuraikan pada Bab II, dapat diidentifikasi permasalahan daerah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan, yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah Keluarga Pra KS yaitu diatas 32% dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia dimana sebagian besar penduduk pada umumnya berpendidikan Sekolah Dasar (lebih dari 50%).
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat pedesaan, terutama fasilitas pendidikan dasar, kesehatan, air bersih, transportasi, perumahan, jalan lingkungan, saluran limbah dan irigasi.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang memadai seperti jalan-jalan perkotaan, saluran, air bersih, persampahan, trotoar, taman kota, penerangan jalan, arena bermain dan olah raga.
5. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditunjukkan dengan distribusi nilai PDRB per kecamatan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna serta terbatasnya akses permodalan dan akses informasi, yang berakibat pada menurunnya produktivitas dan rendahnya kualitas produk pertanian dan industri kecil/rumah tangga serta produk jasa pariwisata.
7. Menurunnya kualitas SDA sebagaimana dapat terlihat dengan semakin sulitnya mendapatkan air bersih dan menurunnya debit air dari sumber-sumber air irigasi dan air baku.

8. Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat karena rendahnya kinerja aparatur, belum efektif dan efisiennya sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, yang berakibat pada rendahnya daya saing daerah, dimana berada pada peringkat 22 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
9. Masih terbatasnya peran masyarakat dan peran desa/kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan publik, penganggaran dan pengawasan.

## **B. Identifikasi Faktor Lingkungan**

Keberhasilan pembangunan daerah selain dipengaruhi oleh kondisi umum, kemampuan keuangan daerah dan permasalahan pokok daerah sebagaimana uraian sebelumnya, juga dipengaruhi oleh permasalahan dari luar daerah baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Global. Beberapa permasalahan tersebut antara lain makin pesatnya persaingan perdagangan global, perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, bencana alam, krisis pangan dan energi, serta adanya kebijakan pemerintah baik yang terkait bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan, dan lain-lain.

Guna mengetahui sampai sejauh-mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dilakukan identifikasi faktor lingkungan tersebut. Berdasarkan hasil survey dengan menggunakan angket berupa kuesioner dari berbagai lapisan masyarakat dan kajian melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), dapat diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Faktor-faktor lingkungan tersebut dikelompokkan ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, yaitu sebagai berikut :

## **1. Kekuatan :**

- a. Letak Kabupaten Semarang yang berada di jalur lintasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, lintasan pantai utara ke daerah pedalaman, dan segitiga emas transportasi regional Jogjakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar) merupakan posisi strategis yang dapat mendorong pembangunan daerah.
- b. Kondisi kerukunan hidup antar umat beragama yang kondusif, keragaman budaya masyarakat, dan sikap saling menghormati serta toleransi merupakan kekuatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
- c. Kabupaten Semarang memiliki sumberdaya alam yang cukup besar meliputi sumberdaya lahan, air, mineral, panas bumi, dan lain-lain, apabila dikelola dengan baik akan menjadi modal utama dalam pembangunan daerah.
- d. Sektor Industri, jasa (pariwisata) dan pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Semarang yang banyak menyerap tenaga kerja dan merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang bisa dikembangkan menjadi daya saing daerah.
- e. Penduduk Kabupaten Semarang sebagian besar merupakan kelompok usia produktif (66,3%) dan menjadi sumber tenaga kerja yang potensial.
- f. Kabupaten Semarang memiliki kearifan lokal seperti gotong royong dan semangat kejuangan yang apabila dipelihara dan ditingkatkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di segala sektor.
- g. Kondisi geografis daerah yang sebagian berupa pegunungan dan perbukitan dengan udara sejuk dan panorama alam yang indah dapat menjadi potensi pembangunan pariwisata.

- h. Semakin baiknya pelaksanaan demokrasi, penegakan hukum dan pemahaman HAM berpengaruh dalam penciptaan situasi yang kondusif di bidang politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan, sehingga dapat mendorong pelaksanaan pembangunan.
- i. Meningkatnya kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam.
- j. Meningkatnya partisipasi masyarakat termasuk LSM, Dunia Usaha, dan lain-lain dalam proses pembangunan menjadi sangat penting karena pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.
- k. Komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program yang sudah direncanakan menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.
- l. Kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- m. Kuantitas dan kualitas aparat pemerintah daerah yang memadai menjamin ketepatan dan kecepatan pelayanan publik untuk mendukung terciptanya *good governance*.

## **2. Kelemahan :**

- a. Rendahnya kualitas sebagian pelayanan publik menyebabkan iklim investasi kurang kondusif sehingga dapat melemahkan daya saing daerah.

- b. Pelaksanaan regulasi yang kurang konsisten terutama berkaitan dengan pemanfaatan tata guna lahan.
- c. Rendahnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja dan kemandirian perekonomian daerah.
- d. Rendahnya pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sarpras, dan lain-lain) menyebabkan masih tingginya jumlah penduduk miskin.
- e. Belum meratanya pembangunan antar wilayah kecamatan, terutama pada wilayah perbatasan menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan.
- f. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pembangunan daerah menyebabkan ketergantungan pada dana pusat (komposisi Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,57% sedangkan Dana Perimbangan dan lain-lain sebesar 88,43%).
- g. Kondisi topografi yang berupa bukit dan gunung menyebabkan rawan longsor, kekeringan dan menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan rendahnya aksesibilitas/ keterjangkauan wilayah.

### **3. Peluang :**

- a. Masih tingginya minat investor untuk berinvestasi.
- b. Perkembangan penerapan teknologi informasi di berbagai bidang pembangunan diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pola pikir dan kehidupan masyarakat, serta proses pembangunan.

- c. Semangat pemerintah mereformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance dapat mendorong peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah sehingga mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat.
- d. Adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan "pembangunan berkelanjutan" berupa keterpaduan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang menjamin upaya daerah dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik.
- e. Kebijakan pemerintah tentang RTRW Nasional bahwa Kabupaten Semarang masuk didalam Kawasan Strategis Kedungsapur yang berpotensi mendorong berkembangnya ekonomi kawasan.
- f. Kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur strategis skala nasional berupa jalan tol Semarang-Solo diharapkan mendorong kelancaran lalu-lintas regional, sehingga dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat.

#### **4. Tantangan :**

- a. Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang belum mampu mengatur secara penuh pengalihan hak atas tanah dan tata guna lahan untuk keperluan pembangunan.
- b. Adanya kecenderungan perubahan iklim global yang berakibat pada perubahan sistem pola tanam, bencana alam, dan menurunnya kualitas sumberdaya alam.
- c. Adanya *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* yaitu perdagangan bebas kawasan ASEAN dan China, dapat melemahkan daya saing produk lokal.



### C. Isu Strategis

Dari hasil identifikasi faktor lingkungan strategis tersebut dapat diketahui beberapa faktor dominan dan potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dari faktor-faktor tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Semarang 2010-2015 yaitu :

- a. Rendahnya pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sarpras, dan terbatasnya lapangan kerja) sehingga angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
- b. Rendahnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Semarang sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja,
- c. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah serta belum optimalnya penataan dan pengembangan kota.
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses perijinan dan kepastian hukum sehingga berpotensi menghambat minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Semarang,
- e. Kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian, industri kecil, pemanfaatan obyek wisata serta kurangnya peran jasa pendukung.
- f. Kurang optimalnya peran dan fungsi birokrasi dalam mewujudkan *good governance*.
- g. Kurang optimalnya partisipasi Kelembagaan Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan termasuk pembangunan berperspektif gender.
- h. Menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta upaya pelestariannya.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **A. Visi**

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

#### **TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA**

Dengan Visi tersebut Bupati Semarang periode 2010-2015 hendak mewujudkan Kabupaten Semarang dengan kondisi :

**Mandiri** : artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

**Tertib** : artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat di tunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.

**Sejahtera** : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan

ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga Pra Sejahtera.

## **B. Misi**

Guna mewujudkan Visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.
2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumberdaya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.

Infrastruktur yang memadai, layak dan merata di seluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi.

Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktifitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung pada adanya kerja sama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh-kembangnya anak.

6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Potensi sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya.

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan misi pembangunan tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan.

3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal
4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi
6. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
7. Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak – hak anak.
8. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

#### **D. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu masa bakti Bupati Semarang 2010-2015 dirumuskan sesuai dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran :

- a. Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);
- d. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;

- e. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;
- f. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;
- g. Terwujudnya sarana prasarana kesehatan di wilayah selatan.

Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;
- b. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal;
- c. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standard kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan Spiritual Quotient;
- d. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- e. Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing;
- f. Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;
- g. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.

Tujuan 3 : Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dengan sasaran :

- a. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing;

- b. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
- c. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;
- d. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;
- e. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;
- f. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;
- g. Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

**Tujuan 4 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran :**

- a. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);
- b. Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;
- c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah;
- d. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive



gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal;

Tujuan 5 : Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, dengan sasaran :

- a. Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- c. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;
- d. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi.

Tujuan 6 : Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, dengan sasaran :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;
- b. Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;
- c. Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
- e. Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- g. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;
- h. Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan.

Tujuan 7 : Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup.
- c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta.
- d. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.

**Tujuan 8 : Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran:**

- a. Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam.
- b. Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- c. Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan.
- d. Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat.
- e. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian
- f. Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi Pembangunan Daerah**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, mengacu pada upaya pencapaian sasaran pokok kebijakan pembangunan tahapan ke-2 RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025, dan dirumuskan sebagai berikut :

a. **Strategi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta tersedianya tenaga terdidik, sehingga mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Strategi peningkatan sumberdaya manusia diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal

b. **Strategi untuk penguatan daya saing perekonomian daerah.**

Penguatan daya saing perekonomian daerah tercermin dari meningkatnya investasi daerah baik oleh swasta maupun masyarakat yang dapat mendorong berkembangnya potensi daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini diwujudkan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur daerah baik berupa sarana dan prasarana umum, penataan ruang

maupun pengelolaan lingkungan hidup. Penguatan daya saing daerah juga tidak terlepas dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah.

c. Strategi perwujudan kondisi aman dan damai.

Perwujudan kondisi aman dan damai tercermin dari menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparatur daerah.

Strategi ini diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

## **B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan agar dalam pelaksanaannya akan lebih terfokus.

Kebijakan pembangunan daerah yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi-misi Bupati Semarang periode 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui :

- a. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu hamil, balita dan perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga.
- b. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui penyediaan kebutuhan

- permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air bersih.
- c. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSU dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan Posyandu.
  - d. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut usia dan masalah sosial lainnya.
  - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, melalui :
- a. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas guna wujudkan pendidikan murah dan terjangkau untuk pendidikan yang setingkat SD, SMP, SMA-maupun SMK.
  - b. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan.
  - c. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa laboratorium dan perpustakaan.
  - d. Perbaikan sistem pendidikan, termasuk metode penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar-mengajar.
  - e. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka pembentukan karakter anak-anak/anak usia dini.
  - f. Pengembangan pendidikan formal maupun non formal dalam rangka pembentukan karakter bangsa (muatan lokal).

- g. Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan penyediaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait.
3. Menyediakan infrastruktur daerah sebagai pendorong investasi dan perekonomian.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui :

- a. Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal yang didukung dengan penyediaan air bersih dan listrik.
- b. Penyediaan infrastruktur jalan dan pengembangan moda transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
- c. Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan, jembatan, irigasi, embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta lainnya.
- d. Penataan infrastruktur perkotaan berupa trotoar, drainase, manajemen trafik, ruang terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain.
- e. Penyediaan prasarana dan ruang publik perkotaan seperti gedung olah raga, taman, gedung olah raga serta ruang publik lainnya.
- f. Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah.

4. Mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi daerah dan termanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, melalui :

- a. Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing.
  - b. Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran serta teknologi pertanian.
  - c. Diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian
  - d. Fasilitasi pengembangan objek-objek wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, dengan memanfaatkan sumberdaya alam (agrowisata).
  - e. Penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal serta pelestarian sumberdaya alam
  - f. Pembentukan jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan.
  - g. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. serta pelestarian sumber-sumber air.
5. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak - hak anak, melalui :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan dan peran serta masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan daerah.
  - b. Pemberdayaan penyandang masalah sosial guna peningkatan kualitas hidup.
  - c. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta.
  - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan.
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kepastian hukum.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui :

- a. Penerapan jaringan *Information Comunication and Technology* (ICT) melalui E-Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- b. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik.
- c. Peningkatan disiplin, kompetensi, profesionalisme dan pemerataan penempatan aparatur pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah.



- e. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.
- f. Penerapan pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel yang mengacu pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan.
- g. Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum.

### **C. Agenda Pembangunan Tahunan**

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka pada pada setiap tahun anggaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015 dijabarkan dalam agenda tahunan sebagai berikut :

1. Tahun 2010 : merupakan tahun pentahapan sosialisasi dan konsolidasi visi-misi pasca pemilihan kepala daerah, dan lanjutan pelaksanaan pembangunan sesuai RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2010.
2. Tahun 2011 : merupakan tahun pementapan konsolidasi dan pembenahan infrastruktur dasar dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar menuju masyarakat yang mandiri, tertib dan sejahtera. Pada tahun ini difokuskan pada dua hal, yaitu:
  - a. Konsolidasi dan penyiapan instrumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang

lebih baik. Serta penyiapan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melalui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.

b. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan dasar diprioritaskan pada :

- 1) Pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- 2) Melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjamin proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik.
- 3) Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melalui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses Informasi bagi masyarakat.

3. Tahun 2012 - 2013 : merupakan tahun percepatan pencapaian masyarakat yang mandiri, tertib dan sejahtera melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, peningkatan SDM dan pelayanan publik. Pada tahun ini pembangunan difokuskan pada lima hal, yaitu:

- a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik aparat maupun masyarakat.
- b. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui UMKM secara mandiri.
  - d. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terutama di kawasan perdesaan dan perbatasan, revitalisasi kawasan Bandungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah,
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat.
4. Tahun 2014 - 2015 : merupakan tahun perwujudan masyarakat Kabupaten Semarang yang berdaya saing tinggi, mandiri, tertib dan sejahtera. Pembangunan pada tahun ini difokuskan pada dua hal, yaitu:
- a. Memantapkan pemanfaatan sumberdaya daerah secara berkelanjutan serta pengembangan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui UMKM yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri.
  - b. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.
  - c. Mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **A. Kebijakan Umum Pembangunan**

Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh secara kewilayahan yang mencakup wilayah perdesaan dan perkotaan. Keterpaduan pelaksanaan pembangunan juga mencakup pada semua aspek pembangunan baik urusan yang menjadi kewenangan daerah maupun urusan pemerintah provinsi dan pemerintah.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Semarang 2010-2015, maka dalam perencanaan pembangunan perdesaan dan perkotaan dirumuskan dengan semangat "Mbangun Deso Nata Kutho". Sedangkan keterpaduan pembangunan antar urusan dilaksanakan dalam rangka :

- Penanggulangan Kemiskinan (*pro poor*)
- Menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro job*)
- Memacu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*)
- Mendukung kelestarian lingkungan (*pro environment*)
- Mendukung pelayanan prima (*pro public service*)

Selanjutnya mengingat kompleksnya urusan yang harus ditangani, maka dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan prioritas pembangunan dan pengelompokan program-program yang bersifat lintas urusan.

#### **1. Prioritas Pembangunan**

Agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2010-2015 dapat tercapai sesuai dengan kemampuan sumber daya pembangunan yang dimiliki perlu dirumuskan sejumlah prioritas pembangunan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang 2010-2015 dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan non formal yang dititik beratkan pada aspek keterjangkauan, peningkatan mutu dan relevansi terhadap kebutuhan dunia usaha, serta efisien dan akuntabel dalam pengelolaan pendidikan guna peningkatan kecerdasan, keluhuran budi pekerti dan kemandirian masyarakat serta penguatan karakter bangsa menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif serta memberdayakan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.
- c. Penyediaan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan, yang dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan.
- e. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

- f. Pemberdayaan lembaga desa/kelurahan dan masyarakat serta perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.
- g. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititik-beratkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi.
- h. Pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana.
- i. Pengembangan dan perlindungan budaya, karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat jati diri.

## **2. Pembangunan Kewilayahan**

### **a. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan**

Salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025 adalah meningkatkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pelayanan publik dan hasil pembangunan sebagai akibat dari adanya perbedaan kondisi sumberdaya alam, terbatasnya infrastruktur wilayah dan terkonsentrasinya investasi swasta hanya pada wilayah tertentu.

Oleh karena itu dalam pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang kebijakan pembangunan kewilayahan diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal sesuai potensi sumberdaya alam yang dimiliki, dengan prioritas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Strategi Pembangunan Kewilayahan

Dalam pengembangan ekonomi lokal tersebut, setiap kecamatan mempunyai potensi sektor ekonomi tertentu baik yang sudah berkembang maupun potensial akan berkembang di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis Location Quotion (LQ) dan Shift-share terhadap data PDRB tiap kecamatan, serta memperhatikan potensi geografis wilayah diperoleh potensi ekonomi lokal, maka strategi pembangunan kewilayahan pada setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

1) Percepatan Pembangunan Perekonomian Kawasan Tertinggal, meliputi :

a) Kecamatan Bancak.

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan terutama jenis kedelai dan melon, tanaman perkebunan rakyat seperti jenis wijen, dan tanaman hutan rakyat.
- pengembangan sektor transportasi, agroindustri dan kegiatan perdagangan dan jasa yang terkait dengan pengembangan pertanian dalam arti luas.
- pemanfaatan potensi pertambangan dan galian dengan mengacu peraturan yang berlaku, diarahkan pada jenis pertambangan rakyat, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

b) Kecamatan Kaliwungu

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan terutama jenis kedelai dan ubi kayu, tanaman perkebunan, serta sektor peternakan.

- pemanfaatan sumberdaya air untuk air minum atau mendukung perekonomian produktif lain seperti sektor pariwisata dan perikanan.
  - sektor transportasi, agroindustri, perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pertanian dalam arti luas.
- c) Kecamatan Bringin
- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis padi, jagung, kacang tanah, tanaman buah (misalnya jenis mangga), tanaman biofarmatika (jenis kencur dan kunyit), tanaman perkebunan jenis karet, kapuk dan tebu, dan tanaman hutan rakyat.
  - pengembangan sektor transportasi, agroindustri dan kegiatan perdagangan dan jasa yang terkait dengan pengembangan pertanian dalam arti luas.
- d) Kecamatan Suruh
- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis padi, kacang tanah, ubi kayu, tanaman biofarmatika misalnya jenis temulawak, jahe, tanaman perkebunan jenis kelapa deres dan cengkeh, serta sektor peternakan dan perikanan.
  - pengembangan agroindustri, sektor perdagangan dan jasa yang dapat meningkatkan sektor pertanian dalam arti luas.
- e) Kecamatan Susukan
- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis padi, kedelai, ubi kayu, tanaman buah jenis



mangga dan rambutan, tanaman biofarmatika misalnya jenis temulawak, tanaman perkebunan/hutan rakyat, sektor peternakan dan perikanan.

- pengembangan kegiatan agroindustri, perdagangan dan jasa yang terkait dengan pengembangan pertanian dalam arti luas.
- Pengembangan sektor pertambangan dan galian pada jenis bahan tambang bentonit dengan terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakan ekonomi dan lingkungan.

f) Kecamatan Pabelan

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis padi, tanaman perkebunan jenis tebu, peternakan, dan perikanan.
- pengembangan sektor perkotaan (konstruksi), agroindustri, perdagangan dan jasa untuk mengimbangi perkembangan perkotaan Salatiga.

2) Penguatan Pembangunan Perekonomian Lokal, meliputi :

a) Kecamatan Bandungan

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman buah jenis alpukat, pisang, salak, kelengkeng, tanaman hias jenis gladiol, krisant, mawar, anggrek, sedap malam, tanaman sayur-sayuran jenis bawang daun, kubis, sawi, wortel, cabe besar, cabe rawit, tomat, dan buncis.
- Pengembangan, penataan dan revitalisasi sektor pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya perlu

juga memperhatikan wilayah ini sebagai kawasan lindung dan penyangga Gunung Ungaran. Keberadaan objek wisata yang mendukung sektor perdagangan – hotel - restoran diarahkan pada pariwisata yang berbasis agrowisata, agroindustri sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian.

b) Kecamatan Jambu

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis jagung, tanaman buah-buahan jenis kelengkeng, nangka, dan durian, tanaman perkebunan jenis kopi, panili dan kakao, tanaman hutan rakyat, sektor peternakan, sektor perikanan, serta sektor perdagangan dan jasa-jasa (termasuk Industri agro dan kerajinan rakyat).
- pengembangan sektor ekonomi di kawasan ini dengan memperhatikan peran kawasan sebagai daerah tangkapan air Rawa Pening dan kondisi fisik lahan yang didominasi jenis tanah yang rawan longsor.

c) Kecamatan Sumowono

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis jagung dan ubi jalar, tanaman buah-buahan jenis alpukat, pisang dan nangka, tanaman sayur-sayuran jenis bawang daun, kubis, sawi, wortel, cabe besar, cabe rawit, tomat, dan buncis, tanaman biofarmatika jenis jahe, tanaman perkebunan jenis kopi, aren, panili, dan kakao, tanaman hutan rakyat, sektor peternakan.

- Pembangunan pembangkit listrik panas bumi Gunung Ungaran, pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan agro serta agroindustri yang dapat memacu perekonomian kawasan ini.
- Hal yang menjadi perhatian di kawasan ini adalah menjaga peran utama kawasan sebagai kawasan lindung dan penyangga di Gunung Ungaran, terutama dalam pengembangan sektor pertambangan dan galian harus dikaji mendalam tentang dampak negatif yang mungkin timbul.

d) Kecamatan Getasan

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis jagung, tanaman buah-buahan jenis alpukat dan manggis, tanaman sayur-sayuran jenis bawang daun, kentang, kubis, sawi, wortel, cabe besar, cabe rawit, tomat, dan buncis, tanaman perkebunan jenis tebu, dan sektor peternakan terutama produk susu, daging sapi, ayam petelur dan ayam pedaging.
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menunjukkan kegiatan wisata di Getasan (terutama di kawasan Kopeng) tidak memberikan sumbangan yang signifikan dalam perekonomian lokal. Untuk itu, dalam perkembangan selanjutnya kegiatan pariwisata perlu dikaitkan dengan pengembangan sektor agro (agrowisata yang bertumpu pada sektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan).

- pengembangan kegiatan agro industri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan peternakan.
- Pengembangan ekonomi di Getasan juga harus mempertimbangkan fungsi ekosistem kawasan mengingat peran utama kawasan sebagai kawasan lindung dan penyangga bagi kawasan di bawahnya.

e) Kecamatan Banyubiru

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial tanaman pangan jenis padi dan ubi jalar, tanaman buah-buahan terutama jenis durian, tanaman perkebunan jenis aren, panili, dan tembakau, tanaman hutan rakyat, sektor perikanan dan peternakan.
- Pengembangan sektor perkebunan dan kehutanan tersebut diperlukan mengingat peranan kawasan ini sebagai bagian dari catchment area Rawa Pening dan sebagai kawasan lindung dari Gunung Telomoyo.
- Pengembangan sektor perikanan di Rawa Pening perlu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak mengurangi kualitas dan kuantitas air baku yang ada.
- Demikian pula maka perkembangan kawasan terbangun perlu dikendalikan agar tidak mengganggu fungsi dan kelestarian Rawa Pening. Pada kawasan ini potensial menjadi kawasan jasa pariwisata karena mempunyai potensi daya tarik wisata (obyek wisata).

f) Kecamatan Bawen

- Pengembangan sektor unggulan dan potensial yaitu sektor industri pengolahan, pertambangan dan galian. Peran sektor industri di kawasan ini cukup signifikan sehingga berpeluang untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
- Pengembangan industri yang ramah lingkungan melalui upaya pembentukan kawasan industri.
- Sementara itu untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kawasan ini perlu didukung dengan sektor pertanian dengan potensi tanaman biofarmaka misalnya jenis kencur, tanaman perkebunan jenis kapuk dan kakao.

3) Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Kawasan, meliputi :

a) Kecamatan Tengaran.

- Penguatan sektor unggulan dan potensial tanaman buah-buahan jenis manggis, tanaman biofarmatika seperti jenis jahe, tanaman perkebunan jenis cengkeh dan kelapa deres, sektor peternakan, dan sektor transportasi dan komunikasi.
- Sektor industri di Tengaran saat ini belum memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian regional. Sementara itu sektor industri yang sedang berkembang belum memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian daerah.

- Meski demikian, dengan memperhatikan potensi geografis kawasan Tenganan, sektor ini dapat dikembangkan di masa mendatang. Berkembangnya sektor konstruksi dan perdagangan menunjukkan wilayah ini sedang tumbuh menjadi kawasan perkotaan.

**b) Kecamatan Tuntang**

- Penguatan sektor unggulan dan potensial pertanian tanaman buah-buahan terutama jenis durian, tanaman biofarmatika seperti jenis kencur, tanaman perkebunan jenis kelapa, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor transportasi dan komunikasi. Pada kawasan ini potensial menjadi kawasan jasa pariwisata karena letaknya strategis di jalur nasional serta mempunyai potensi daya tarik wisata (obyek wisata). Sementara itu berkembangnya sektor konstruksi dan perdagangan menunjukkan wilayah ini sedang tumbuh menjadi kawasan perkotaan, dalam hal ini adalah imbas perkembangan perkotaan Salatiga. Meski demikian, dengan memperhatikan peran kawasan ini sebagai penyangga utama kawasan konservasi Rawa Pening, maka perkembangan perkotaan Tuntang perlu dikendalikan agar tidak mengganggu fungsi dan kelestarian Rawa Pening.

c) Kecamatan Ambarawa

- Penguatan sektor unggulan dan potensial sektor pertanian tanaman pangan jenis padi, peternakan, perikanan, konstruksi, perdagangan-hotel-restoran, jasa-jasa. Perkembangan sektor perdagangan-hotel-restoran serta sektor jasa merupakan pendukung dari sektor pariwisata yang ada, serta menunjukkan semakin berkembangnya kawasan ini menjadi kawasan perkotaan. Mengingat letak kawasan ini berada di sekitar Rawa Pening, maka perkembangan kawasan terbangun perlu dikendalikan agar tidak mengganggu fungsi dan kelestarian Rawa Pening.

d) Kecamatan Pringapus

- Penguatan sektor unggulan dan potensial pertanian tanaman pangan jenis padi, tanaman perkebunan terutama jenis kapuk, tanaman hutan rakyat, sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa. Peran sektor industri di kawasan ini cukup signifikan sehingga berpeluang untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Di masa mendatang diperlukan pengembangan industri yang ramah lingkungan melalui upaya pembentukan kawasan industri di wilayah ini. Selain perlu dikembangkan sektor transportasi yang membuka wilayah serta mendorong perkembangan sektor pertanian.

e) Kecamatan Bergas

- Penguatan sektor unggulan dan potensial tanaman buah-buahan seperti jenis mangga, tanaman perkebunan misalnya jenis kapuk, tanaman hutan rakyat, sektor industri, sektor transportasi-komunikasi, sektor pertambangan dan galian, serta keuangan-persewaan-jasa perusahaan. Peran sektor industri di kawasan ini cukup signifikan sehingga berpeluang untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Di masa mendatang diperlukan pengembangan industri yang ramah lingkungan dan mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal. Sementara sektor pertambangan dan galian dibatasi pada kawasan pertambangan Gunung Mergi.

f) Kecamatan Ungaran Timur

- Penguatan sektor unggulan dan potensial adalah tanaman hutan rakyat, tanaman biofarmatika, tanaman perkebunan, sektor industri, konstruksi, serta keuangan-persewaan-jasa perusahaan. Alokasi industri di kawasan ini dibatasi sampai dengan yang ada saat ini. Kawasan ini potensial dikembangkan kegiatan perkotaan terutama dengan dibukanya akses jalan tol Semarang-Solo pada kawasan ini.

g) Kecamatan Ungaran Barat

- Penguatan sektor unggulan dan potensial pertanian tanaman buah-buahan jenis rambutan, manggis, tanaman hias jenis anggrek, tanaman biofarmatika,



sektor industri, konstruksi, dan sektor listrik-gas-air minum. Alokasi industri di kawasan ini dibatasi sampai dengan yang ada saat ini. Hal yang perlu diperhatikan di kawasan ini adalah mengendalikan perkembangan perkotaan dengan tetap menjaga fungsi kawasan lindung dan penyangga Gunung Ungaran.

### **3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

#### **a. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Tingginya angka kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat penting sehingga memerlukan perhatian yang sangat serius dalam pembangunan Kabupaten Semarang 2010 - 2015.

Guna mengatasi permasalahan tersebut kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah diarahkan pada 4 (empat) upaya pokok sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
- 3) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- 4) Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga miskin, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan akses

pelayanan sosial dasar dan perlindungan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosialnya.

**b. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ditetapkan 4 (empat) strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Semarang yaitu :

- 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, melalui kelompok program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil melalui kelompok program yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, terutama program-program yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin .

Strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa pendekatan antara lain :

- 1) Meningkatkan kapasitas produksi yang dilaksanakan melalui:
  - Fasilitasi jaringan pengembangan permodalan;
  - Fasilitasi pemberian Pelatihan dan alat kerja;
  - Fasilitasi Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas peningkatan kualitas hidup yang dilaksanakan melalui :
  - Fasilitasi penyediaan layanan pendidikan
  - Fasilitasi penyediaan layanan kesehatan
  - Pembangunan infrastruktur

Program percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Semarang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah (DSPKD) yang mengatur secara rinci dan untuk selanjutnya dalam implementasinya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Semarang, dunia usaha dan masyarakat serta pemerintah di atasnya.

#### **4. Pembangunan Responsif Gender**

Perencanaan pembangunan responsif gender pada dasarnya adalah upaya untuk mentransformasikan pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan nyata institusi sektoral dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, seperti yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dengan demikian Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan dan masuk dalam setiap tahapan rencana pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah Kabupaten/Kota bahkan tingkat desa.

Perencanaan pembangunan yang peka gender dilakukan untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar mempunyai akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan; berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan; memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan; dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Dalam rangka pembangunan responsif gender di Kabupaten Semarang, terkait dengan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD salah satu strategi dan program yang dilakukan adalah pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender melalui kegiatan revitalisasi kelembagaan perempuan, revitalisasi posyandu dan pelatihan ketrampilan serta bantuan modal.

Dua program besar yang berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan adalah, Pertama, Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dengan sasaran berupa peningkatan kualitas dan peranan perempuan terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kedua, Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Kelembagaan Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender, dengan sasaran berupa peningkatan peran aktif masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan, tersedianya data dan informasi gender berupa kajian dan penyusunan rencana induk pengarusutamaan gender, meningkatnya kemampuan dan kapasitas institusi pemerintah dalam pengarusutamaan gender pada setiap tahap dan proses pembangunan serta meningkatnya peran dan kualitas lembaga masyarakat khususnya organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender.

Didalam melaksanakan pembangunan yang selaras dengan RPJMN terdapat 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan, yaitu pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pengarusutamaan gender dilakukan dengan cara yang terstruktur sebagai berikut :

- pengarusutamaan gender merupakan upaya yang tidak terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral;
- pengarusutamaan gender tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan;
- pengarusutamaan gender dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan gender.

a. Sasaran

Adapun sasaran pengarusutamaan gender dalam RPJMD adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan:

- 1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumberdaya, dan politik;

- 2) meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan;
- 3) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

b. Strategi

Strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, melalui peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait dengan pentingnya pembangunan yang responsif gender.
- 2) Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.

5. Pembangunan Perdesaan

Wilayah NKRI terdiri Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, RT (dukuh) yang semuanya menjadi satu kesatuan dan tidak

bisa dipisah-pisahkan. Jika kita membangun NKRI dari segi manusianya, kelembagaannya maupun infrastrukturnya harus dimulai dari Desa/Kelurahan. Dan jika melaksanakan pembangunan di desa aspek manusia, kelembagaan maupun infrastrukturnya maka kita sudah membangun NKRI.

Wilayah Kabupaten Semarang terdiri dari 208 desa, 27 kelurahan dan 19 Kecamatan, dimana masing-masing wilayah memiliki sumberdaya dan potensi serta permasalahan yang bermacam-macam. Sejak jaman pemerintahan orde baru sampai sekarang sudah cukup banyak bantuan dan fasilitasi terhadap pembangunan yang ada di desa antara lain, Program Bantuan Desa (Bandes) yang berganti nama menjadi Dana Pembangunan Desa Kelurahan (DPD/K), dan berubah lagi menjadi Dana Alokasi Umum Desa. Program lain baik dari pusat maupun Daerah seperti Kredit Bimas, KUT, PDMDKE, UED-SP, IDT, PPK, KUB, P3DT, PMTAS, PPIP, PNPM Mandiri Pedesaan, Pansimas, LKD, LUEP, TMMD, BPS, LPMD, Bantuan bidang kesehatan, Bidang Sosial, yang semuanya lokusnya adalah di desa.

Kondisi perdesa di Kabupaten Semarang, berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Tanggal 11 September 2008 No. 141/0499/2008, desa dapat digolongkan menjadi Desa Sangat Maju berjumlah 79 desa, Desa Maju berjumlah 94 desa, Desa Tertinggal berjumlah 53 desa dan Desa Sangat Tertinggal berjumlah 9 Desa Fokus perhatian kita adalah pada pembagunan perdesaan yang masih dalam kategori sangat tertinggal yang berjumlah 9 desa yang juga merupakan kantong-kantong kemiskinan.

Kondisi perdesaan Kabupaten Semarang yang kita dambakan adalah suasana desa yang memiliki fasilitas perkotaan (Bangga Suka Desa) yang ditandai dengan :

- Infrastruktur perhubungan dan transportasi yang memadai;
- Tersedia fasilitas sumber air bersih, sanitasi lingkungan, sarana kesehatan, dan perumahan yang memadai;
- Tersedia jaringan komunikasi (telepon, Hp, TV) yang memadai;
- Memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan yang layak dan memadai;
- Tersedia lapangan pekerjaan yang didukung suasana yang aman dan tentram;
- Tersedianya akses permodalan untuk mengembangkan usaha dan pemasaran terhadap hasil produksi masyarakat.
- Kondisi alam dan budaya yang terjaga dari kerusakan lingkungan.

a. Sasaran

Untuk mewujudkan kondisi tersebut sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Berkembangnya SDM dan kelembagaan perdesaan yang mampu memanfaatkan sumberdaya lokal berwawasan lingkungan yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan dan berkembangnya kemampuan aparatur serta kelembagaan perdesaan untuk meningkatkan pelayanan;
- 3) Meningkatnya PADes melalui intensifikasi BUMDES dan kerjasama desa;
- 4) Meningkatnya keswadayaan masyarakat untuk mempercepat laju pembangunan perdesaan dan kelurahan;



- 5) Meningkatnya infrastruktur perdesaan yang mendukung perekonomian desa;
- 6) Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran bagi masyarakat perdesaan yang mendukung dan mendorong usaha UMKM;
- 7) Meningkatnya peran dan partisipasi Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk mewujudkan suasana bangga suka desa (suasana kota di desa).

**b. Strategi**

Untuk mencapai kondisi yang kita harapkan dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa bahwa untuk membangun perdesaan diperlukan strategi antara lain :

- 1) Menyusun perencanaan pembangunan perdesaan melalui identifikasi potensi desa, kalender musim dan bagan kelembagaan di desa, menuju perwujudan desa mandiri (bangga suka desa);
- 2) Memfasilitasi pelatihan dan magang untuk memanfaatkan sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan menuju meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pelayanan SDM aparatur Pemerintah Desa melalui pemantauan kedisiplinan, pembinaan mental dan peningkatan kesejahteraan;
- 4) Menggali dan mengembangkan potensi kekayaan desa yang dapat dijadikan BUMDes;

- 5) Mendorong kesadaran partisipasi masyarakat melalui berbagai media untuk mempercepat laju pembangunan;
- 6) Meningkatkan kelembagaan desa (LKMD, PKK, Posyandu, RT, RW, Lembaga Social Kemasyarakatan) yang mampu menjadi motivator, dinamisator, dan katalisator pembangunan di desa;
- 7) Membangun prasarana ekonomi perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan;
- 8) Membangun dan meningkatkan jaringan kemitraan (permodalan) dan pemasaran dengan BUMN dan lembaga keuangan lainnya;
- 9) Mensinergikan kegiatan Pemerintah Desa (SKPD), LSM dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan laju pembangunan perdesaan.

## **B. Program Pembangunan Urusan Kewenangan**

Penyusunan program pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 meliputi program Kewenangan Urusan Wajib dan program Kewenangan Urusan Pilihan.

### **1. Program Pembangunan Urusan Wajib**

#### **a. Urusan Wajib Pendidikan**

##### **1) Permasalahan**

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD.

- b) Masih adanya gedung sekolah yang kurang layak.
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk menamatkan pendidikan pada sekolah menengah pertama.
- d) Belum terpenuhinya sarana prasarana minimal pendidikan.
- e) Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- f) Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- g) Belum adanya hubungan yang sinergi antara sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

2) Program

- a) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b) Program Pendidikan Dasar.
- c) Program Pendidikan Menengah.
- d) Program Pendidikan Non Formal.
- e) Program Pendidikan Khusus.
- f) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- g) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

b. Urusan Wajib Kesehatan

1) Permasalahan

- a) Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang.
- b) Sarpras kesehatan belum memadai.
- c) Belum optimalnya usaha penyehatan lingkungan.
- d) Kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah.
- e) Belum optimalnya pelayanan kesehatan.

2) Program

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- c) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
- e) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.
- f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- g) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- h) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- i) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- j) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
- k) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
- l) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
- m) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
- n) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
- o) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
- p) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
- q) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya sarana prasarana jalan dan jembatan di daerah perbatasan.
- b) Masih rendahnya pengembangan kapasitas jaringan jalan.
- c) Tingginya kerusakan jalan.

- d) Tidak berfungsinya jalan dan jembatan karena bencana alam.
- e) Masih lemahnya pengembangan kelembagaan P3A
- f) Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- g) Masih tingginya usaha pertambangan tanpa ijin yang berpotensi merusak lingkungan.
- h) Pemanfaatan air tanah yang berlebihan berpotensi mengurangi Cadangan Air Tanah.

2) Program

- a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- b) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
- c) Program Pembangunan turap/talud/brojong.
- d) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
- f) Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan.
- g) Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan.
- h) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.
- i) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
- j) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- k) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
- l) Program pengendalian banjir.
- m) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- n) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan.

d. Urusan Wajib Perumahan

1) Permasalahan

- a) Masih rendahnya penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman.

- b) Belum adanya acuan dalam pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman (dokumen RP4D).
- 2) Program
- a) Program Pengembangan Perumahan.
  - b) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
  - c) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan.
  - d) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
- e. Urusan Wajib Penataan Ruang
- 1) Permasalahan
- a) Belum semua Ibukota Kecamatan mempunyai rencana detail tata ruang.
  - b) Belum adanya acuan detail tata ruang pada wilayah strategis.
  - c) Kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder mengenai tata ruang.
- 2) Program
- a) Program Perencanaan Tata Ruang.
  - b) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
- 1) Permasalahan
- a) Lemahnya data pendukung baik dari sisi validitas maupun ketepatan waktu.
  - b) Lemahnya Koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah dan wilayah.
  - c) Belum optimalnya sistem informasi perencanaan pembangunan.
  - d) Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi.

2) Program

- a) Program Pengembangan data/informasi.
- b) Program Kerjasama Pembangunan.
- c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh.
- d) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- e) Program perencanaan pembangunan daerah.
- f) Program perencanaan pembangunan ekonomi.
- g) Program perencanaan sosial budaya.

g. Urusan Wajib Perhubungan

1) Permasalahan

- a) Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.
- b) Masih kurangnya rambu-rambu jalan.
- c) Belum optimalnya uji kelaikan operasional kendaraan bermotor.

2) Program

- a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- c) Program peningkatan pelayanan angkutan:
- d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- e) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.

h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1) Permasalahan

- a) Meningkatnya Kerusakan lahan dan lingkungan akibat penambangan liar dan perubahan penggunaan lahan.

- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.
- c) Terbatasnya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
- d) Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan pupuk organik.
- e) Belum optimalnya upaya pengelolaan sampah tuntas ditempat.
- f) Pembuangan sampah dan limbah rumah tangga maupun industri yang menimbulkan pencemaran air dan udara.
- g) Menurunnya kualitas udara dampak dari kegiatan industri dan transportasi.
- h) Penurunan kualitas air sungai akibat kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga.
- i) Semakin berkurangnya keanekaragaman hayati akibat eksploitasi sumberdaya yang kurang memperhatikan aspek kelestarian.

2) Program

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
- d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- e) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- f) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

i. Urusan Wajib Pertanahan

1) Permasalahan

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pertanahan.
- b) Belum adanya sistim informasi pertanahan.



- 2) Program
  - a) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah.
  - b) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  
- j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 1) Permasalahan
    - a) Kurangnya informasi tentang pentingnya administrasi kependudukan.
    - b) Belum optimalnya fungsi data base kependudukan.
    - c) Masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM pelayanan kependudukan.
  - 2) Program
    - a) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
  
- k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - 1) Permasalahan
    - a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gender, KDRT dan Trafficking.
    - b) Belum optimalnya kebijakan pelaksanaan pembangunan berperspektif gender.
    - c) Rendahnya jejaring kelembagaan dalam proses pembangunan yang berperspektif gender.
  - 2) Program
    - a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan.
    - b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

- c) Program peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
  - d) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
  - e) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- I. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 1) Permasalahan
    - a) Masih tingginya jumlah keluarga Pra KS.
    - b) Rendahnya partisipasi Laki-laki terhadap program keluarga berencana.
    - c) Kurangnya pemahaman terhadap program KB Mandiri.
    - d) masih kurangnya jumlah alat kontrasepsi.
  - 2) Program
    - a) Program Keluarga Berencana.
    - b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
    - c) Program pelayanan kontrasepsi.
    - d) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
    - e) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.
    - f) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- m. Urusan Wajib Sosial
- 1) Permasalahan
    - a) Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

- b) Kurang optimalnya peran kelembagaan sosial termasuk dunia usaha dalam pemecahan masalah sosial.

2) Program

- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- c) Program pembinaan anak terlantar.
- d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
- e) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.
- f) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
- g) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- h) Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan.

n. Urusan Wajib Tenaga Kerja

1) Permasalahan

- a) Masih rendahnya kualitas SDM TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan).
- b) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan tenaga kerja tentang peraturan ketenagakerjaan.

2) Program

- a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- c) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

o. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Permasalahan

- a) Kurang kondusifnya iklim usaha terutama berkaitan dengan peraturan dan kebijakan yang berpihak pada KUMKM tentang pemberian kesempatan berusaha, pengamanan kawasan usaha, kepastian tempat usaha dan komitmen instansi terkait dalam fasilitasi dan pengembangan KUMKM.
- b) SDM KUMKM yang tersedia kurang berdaya saing, belum trampil, kurang memiliki kreatifitas dan inovasi, terbatasnya kemitraan, belum memanfaatkan teknologi yang memberikan nilai tambah dan belum memiliki manajemen pengelolaan secara baik.
- c) Terbatasnya permodalan yang dimiliki UMKM, aset jaminan dan administrasi kurang memenuhi persyaratan perbankan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengakses dana yang disediakan pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana pemasaran, informasi pasar dan promosi dagang serta belum adanya klaster UMKM yang representatif.
- d) Redahnya kapasitas pemahaman tentang perkoperasian yang dimiliki pengelola, pengawas, pengurus dan anggota sehingga kurang sesuai dengan nilai, identitas dan jatidiri koperasi. SDM Koperasi kurang memiliki keahlian teknis kompetensi, jiwa kewirausahaan rendah dan manajemen kurang baik.
- e) Kualitas dan kuantitas aparatur dan sarana prasarana penunjang tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah koperasi dan UMKM. Juga meningkatnya respon kebebasan berpendapat, dinamika masyarakat dan

kebutuhan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan perkoperasian dan UMKM.

2) Program

- a) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
- b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- c) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- d) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

p. Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah

1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya usaha industri yang memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- b) Rendahnya investasi PMA.
- c) Rendahnya investasi non fasilitas.
- d) Rendahnya penerapan sistem informasi sumber daya, sarana dan prasarana sebagai daya tarik investasi.
- e) Kurangnya produk hukum sebagai instrumen regulasi kepada investor dalam rangka pelayanan penanaman modal yang berorientasi kepada insentif.

2) Program

- a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

q. Urusan Wajib Kebudayaan

1) Permasalahan

- a) Kurangnya sarana dan prasarana apresiasi seni budaya.

- b) Kurang optimalnya pengelolaan aset budaya.
  - c) Kurangnya penanaman nilai-nilai budaya bagi anak usia dini.
- 2) Program
- a) Program Pengembangan Nilai Budaya.
  - b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
  - c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
  - d) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
  - e) Program pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.
- r. Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
- 1) Permasalahan
- a) Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
  - b) Masih rendahnya peran kelembagaan/organisasi olah raga kepemudaan.
  - c) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda.
  - d) Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga.
  - e) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga.
  - f) Belum tersedianya sarana parasaran kegiatan kepemudaan.
- 2) Program
- a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
  - b) Program peningkatan peran serta kepemudaan.
  - c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
  - d) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
  - e) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.

- f) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
  - g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
- s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 1) Permasalahan
    - a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    - b) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi partai politik dan organisasi masyarakat.
    - c) Belum optimalnya hasil dari sosialisasi wawasan kebangsaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
    - d) Masih minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
    - e) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan perundang-undangan.
  - 2) Program
    - a) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
    - b) Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
    - c) Program pengembangan wawasan kebangsaan.
    - d) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
    - e) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
    - f) Program pendidikan politik masyarakat.
    - g) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

t. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Permasalahan

- a) Kurang optimalnya peran lembaga perwakilan rakyat daerah.
- b) Masih lemahnya pelayanan kedinasan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah.
- c) Belum optimalnya penggunaan data dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran daerah.
- d) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
- e) Belum optimalnya pembinaan dan penugasan pegawai sesuai dengan kompetensi.
- f) Masih lemahnya pengelolaan aset daerah.
- g) Masih lemahnya jaringan kerjasama antar daerah.
- h) Fungsi pengawasan masih melekat pada jabatan struktural, sehingga terdapat fungsi ganda.
- i) Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ketahun.
- j) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat atau pengendalian internal di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan BUMD.
- k) Masih lemahnya sistim pembinaan dan pengembangan aparatur.
- l) Kurangnya peran dan fungsi lembaga dan aparatur.



2) Program

- a) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
- b) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- c) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan.
- d) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- e) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- f) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- g) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
- h) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- i) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
- j) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- k) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/ Kelurahan.
- l) Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah.
- m) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah.
- n) Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan.
- o) Program Pendidikan Kedinasan (kepegawaian).
- p) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (kepegawaian).

- q) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (kepegawaian).
  - r) Program Pelimpahan Kewenangan.
- u. Urusan Wajib Ketahanan pangan
- 1) Permasalahan
    - a) Kurang optimalnya koordinasi tentang ketahanan pangan.
    - b) Tidak meratanya distribusi pangan.
    - c) Belum memasyarakatnya pola konsumsi pangan bergizi, berimbang, sehat dan aman.
  - 2) Program
    - a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Permasalahan
    - a) Masih rendahnya SDM aparatur pemerintah desa.
    - b) Kurang optimalnya fungsi lembaga perekonomian pedesaan.
    - c) Kurang optimalnya swadaya gotong royong masyarakat desa.
    - d) Masih kurangnya sarana dan prasarana pemerintah desa.
    - e) Masih kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.
  - 2) Program
    - a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
    - b) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
    - c) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
    - d) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
    - e) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

w. Urusan Wajib Statistik

1) Permasalahan

- a) Belum adanya pengembangan data dan informasi statistik daerah.

2) Program

- a) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

x. Urusan Wajib Kearsipan

1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelola kearsipan.
- b) Belum adanya sistim informasi arsip daerah.
- c) Kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip.

2) Program

- a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
- b) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- c) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
- d) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1) Permasalahan

- a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- b) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang komunikasi dan informasi.

- 2) Program
  - a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
  - b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
  - c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
  - d) Program kerjasama informasi dan media massa.
- z. Urusan Wajib Perpustakaan
  - 1) Permasalahan
    - a) Masih rendahnya minat baca masyarakat.
    - b) Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai.
    - c) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan.
  - 2) Program
    - a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

## **2. Program Pembangunan Urusan Pilihan**

- a. Urusan Pilihan Pertanian
  - 1) Permasalahan
    - a) Masih rendahnya mutu/kualitas pertanian.
    - b) Masih rendahnya produktivitas usaha tani/ternak.
    - c) Banyaknya jaringan irigasi usahatani yang rusak.
    - d) Merebaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
    - e) Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan kaidah konservasi.

- f) Diberlakukannya sistem persaingan pasar bebas.
- g) Belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit.
- h) Terjadinya kelangkaan pupuk terutama pada saat-saat musim tanam.
- i) Rendahnya akses permodalan dan pemasaran.
- j) Rendahnya posisi tawar peternak baik saat membeli maupun menjual.
- k) Rendahnya produktifitas usaha peternakan sebagai akibat rendahnya kualitas bibit, kurangnya penguasaan teknologi serta kurang profesionalnya manajemen usaha.
- l) Banyaknya kegagalan usaha akibat berkembangnya penyakit pada ternak.
- m) Rendahnya kemampuan kelembagaan peternak.

## 2) Program

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- b) Program Peningkatan Produksi Pangan.
- c) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan.
- d) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan.
- e) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- f) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.
- g) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
- h) Program peningkatan produksi hasil peternakan.
- i) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
- j) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

b. Urusan Pilihan Kehutanan

1) Permasalahan

- a) Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan kaidah konservasi.
- b) Masih banyaknya penambahan Galian C secara liar.
- c) Terbatasnya bangunan sipil teknis konservasi dikawasan lereng-lereng pegunungan.
- d) Kurangnya penghijauan, khususnya di sekitar kawasan mata air.
- e) Masih rendahnya produktivitas usaha kehutanan.
- f) Masih rendahnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang, sehingga alih fungsi lahan konservasi masih terjadi.
- g) Adanya kecenderungan meningkatnya lahan kritis akibat laju penebangan kayu dengan laju penanaman belum sebanding.

2) Program

- a) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
- b) Program rehabilitasi hutan dan lahan.
- c) Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan.
- d) Program pemanfaatan kawasan baton industri.
- e) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.

c. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

1) Permasalahan

- a) Masih tingginya usaha pertambangan tanpa ijin yang berpotensi merusak lingkungan.
- b) Pemanfaatan air tanah yang berlebihan berpotensi mengurangi Cadangan Air Tanah.

- 2) Program
  - a) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
  - b) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
  - c) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
  
- d. Urusan Pillhan Pariwisata
  - 1) Permasalahan
    - a) Belum dimilikinya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPKD).
    - b) Rendahnya daya saing objek wisata di Kabupaten Semarang.
    - c) Masih rendahnya kualitas produk wisata, baik obyek wisata, penginapan, restoran, transportasi, (AMENITAS – AKSESIBILITAS – ATRAKSI).
    - d) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisata.
    - e) Lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata dan lemahnya pemberdayaan kelompok sadar wisata.
    - f) Lemahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik pemerintah daerah, pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat disekitar obyek wisata serta lembaga publikasi/informasi pariwisata.
    - g) Belum optimalnya pola kemitraan kepariwisataan di Kabupaten Semarang.
  - 2) Program
    - a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
    - b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
    - c) Program Pengembangan Kemitraan.

e. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang ada.
- b) Masih rendahnya kemampuan Sumberdaya Manusia yang professional di bidang perikanan.
- c) Rendahnya produktifitas usaha perikanan sebagai akibat rendahnya kualitas benih, kurangnya penguasaan teknologi serta kurang profesionalnya manajemen usaha.
- d) Belum dikembangkannya manajemen pengendalian pertumbuhan Enceng Gondok di Rawa Pening yang efektif.
- e) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan Sumberdaya Perikanan terutama perikanan minapadi.
- f) Rendahnya kemampuan kelembagaan pembudidayaan ikan/nelayan.
- g) Masih rendahnya permodalan di tingkat petani perikanan.

2) Program

- a) Program pengembangan budidaya perikanan.
- b) Program pengembangan perikanan tangkap.
- c) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- d) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

f. Urusan Pilihan Perdagangan

1) Permasalahan

- a) Masih terjadinya distorsi distribusi yang mengakibatkan terjadinya hambatan distribusi barang.



- b) Rendahnya daya saing dan kepedulian masyarakat untuk menggunakan produk lokal.
  - c) Rendahnya pemahaman masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha.
  - d) Banyaknya alat ukur yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e) Kurangnya penguasaan informasi dan akses pasar.
  - f) Keterbatasan *database* tentang harga pokok bahan pokok masyarakat.
  - g) Kurangnya sarana prasarana perdagangan.
  - h) Kurang optimalnya pengelolaan pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima.
- 2) Program
- a) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
  - b) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  - c) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - d) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
- g. Urusan Pilihan Perindustrian
- 1) Permasalahan
- a) Lemahnya prasarana dan sarana industri.
  - b) Keterbatasan produksi bahan baku dan setengah jadi.
  - c) Belum adanya kawasan industri.
  - d) Keterbatasan Kemampuan SDM terhadap penguasaan teknologi, permodalan dan akses pasar domestik.
  - e) Belum kuatnya peran industri kecil dan menengah.

- f) Masih lemahnya keterkaitan antar industri baik hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan menengah.
- g) Belum terbangunnya struktur klaster yang saling mendukung.
- h) Rendahnya daya saing produk lokal.

2) Program

- a) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d) Program Penataan Struktur Industri
- e) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

h. Urusan Pilihan Transmigrasi

1) Permasalahan

- a) Kuota transmigran dari pusat terbatas baik jumlah maupun jangka waktunya.
- b) Calon transmigran tidak mempunyai skill yang memadai.

2) Program

- a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
- b) Program Transmigrasi Lokal.

**C. Proporsi Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan ketersediaan sumber-sumber penerimaan, baik pendapatan maupun pembiayaan (penerimaan).

Kebijakan anggaran pemerintah daerah harus didasarkan pada Kemampuan Fiskal Daerah (KFD), yang merupakan pencerminan dari

besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, serta besaran dana perimbangan baik yang diperoleh melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian maupun bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pada dasarnya dikelompokkan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terutama belanja pegawai (Gaji PNS) diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Kenaikan belanja pegawai sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS, kebijakan tunjangan profesi guru PNS dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta adanya kebijakan daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD. Sedangkan belanja tidak langsung yang berupa subsidi, hibah dan bantuan sosial diarahkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan pada pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, serta dalam rangka efisiensi maka secara bertahap belanja hibah dan bantuan sosial akan dikurangi.

Pendanaan pada kelompok belanja langsung, merupakan pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintah daerah yang ditangani. Berdasarkan tren rata-rata pertumbuhan belanja langsung akan meningkat, tetapi proporsi terhadap APBD diperkirakan akan mengalami penurunan, diperkirakan akan berbanding terbalik dengan peningkatan belanja gaji dan tunjangan.

Kemampuan pendanaan untuk belanja langsung juga akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan

pembiayaan pengeluaran, dimana untuk lima tahun mendatang akan membentuk dana cadangan pilkada dan penyertaan modal pada BUMD.

Perkiraan peningkatan pendapatan daerah yang tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan belanja pegawai dapat menimbulkan pengalihan sebagian belanja langsung guna pemenuhan gaji dan tunjangan. Karena belanja gaji PNSD merupakan kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat, maka terlebih dahulu harus ditetapkan besarnya, sehingga dapat diketahui gambaran Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (*Fiscal Space*), yakni gambaran dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel. *Fiscal Space* juga dapat dipergunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan belanja tidak langsung non gaji dan belanja langsung yang akan menjadi prioritas daerah.

Dari proyeksi kemampuan pendanaan APBD dari sisi pendapatan, serta diperbandingkan dengan proyeksi terhadap kebutuhan belanja pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan sebelumnya diketahui terjadi penurunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah selama 5 tahun mendatang. Oleh karena itu diperlukan perumusan kebijakan yang mengarah pada efisiensi tanpa mengurangi efektifitas fungsi pelaksanaan pemerintah daerah. Diperlukan upaya selektif dalam menyusun prioritas program dan kegiatan disertai dengan penetapan proporsi pendanaan pada setiap urusan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan agenda pembangunan tahunan. Perumusan proporsi pendanaan belum memperhitungkan dana untuk program pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun provinsi yang sifatnya mengikat seperti DAK, Bantuan Keuangan Provinsi,

DBHCHT, Tugas Pembantuan dan lain-lain. Dengan demikian setiap urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan upaya pencapaian visi-misi Kepala Daerah. Disamping itu diperlukan penggalan sumber-sumber pendanaan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan Pendapatan Daerah, tetapi juga sumber pendanaan lainnya seperti dana tugas pembantuan dan dana masyarakat atau pihak ketiga.

Proporsi belanja pada setiap urusan pemerintah daerah tahapan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2011 - 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**  
**Proporsi Kebutuhan Pendanaan Pada Setiap Urusan Pemerintahan Terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015**

NO.	URUSAN	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
<b>1.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>87.987</b>	<b>89.363</b>	<b>88.617</b>	<b>88.681</b>	<b>88.485</b>
1.01.	PENDIDIKAN	14.749	15.591	15.751	15.560	15.777
1.02.	KESEHATAN	27.170	28.770	28.970	29.015	29.170
1.03.	PEKERJAAN UMUM	10.885	12.806	12.070	11.757	11.182
1.04.	PERUMAHAN	2.408	2.534	2.534	3.002	3.002
1.05.	PENATAAN RUANG	0.244	0.308	0.324	0.207	0.244
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	0.798	0.798	0.798	0.798	0.798
1.07.	PERHUBUNGAN	0.941	1.041	0.951	0.841	0.841
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
1.09.	PERTANAHAN	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0.642	0.642	0.642	0.642	0.642
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0.618	0.618	0.618	0.618	0.618
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090
1.13.	SOSIAL	0.272	0.272	0.272	0.272	0.272
1.14.	KETENAGAKERJAAN	0.755	0.455	0.357	0.352	0.322
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0.667	0.456	0.427	0.424	0.424
1.16.	PENANAMAN MODAL	0.199	0.299	0.239	0.220	0.220
1.17.	KEBUDAYAAN	0.989	0.599	0.599	0.599	0.599
1.18.	PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.644	0.753	0.644	0.643	0.643
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	0.806	0.658	0.759	0.858	0.858
1.20.	OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	13.462	13.227	13.226	13.236	13.236

NO.	URUSAN	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.21.	KETAHANAN PANGAN	0.187	0.134	0.134	0.134	0.134
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.335	1.233	1.133	1.335	1.335
1.23.	STATISTIK	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
1.24.	KEARSIPAN	0.188	0.140	0.140	0.140	0.140
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0.973	0.973	0.973	0.973	0.973
1.26.	PERPUSTAKAAN	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
<b>2.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>12.013</b>	<b>10.637</b>	<b>11.383</b>	<b>11.319</b>	<b>11.516</b>
2.01.	PERTANIAN	2.912	2.294	2.408	2.812	3.008
2.02.	KEHUTANAN	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.804	6.478	6.678	6.210	6.210
2.04.	PARIWISATA	0.593	0.459	0.593	0.593	0.593
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	0.295	0.195	0.295	0.295	0.295
2.06.	PERDAGANGAN	0.626	0.526	0.626	0.626	0.626
2.07.	PERINDUSTRIAN	0.468	0.370	0.468	0.468	0.468
2.08.	TRANSMIGRASI	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149
	<b>JUMLAH</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang berhubungan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan dengan program kepala daerah terpilih, atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas. Program prioritas dirumuskan berdasarkan kebijakan umum dan masing-masing memuat fokus kegiatan yang saling berkaitan dengan indikator kinerja (outcome) yang dipersyaratkan.

Program prioritas pada RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015 dirumuskan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang selanjutnya akan dituangkan menjadi program dan kegiatan di dalam Renstra SKPD. Perumusan program pembangunan meliputi program strategis dan non strategis. Program strategis merupakan program dengan fokus kegiatan yang langsung mendukung pencapaian visi-misi Kepala Daerah, sedangkan program non strategis merupakan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan wajib pemerintahan yang diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak secara langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan demikian perumusan program prioritas pada beberapa urusan tidak serta merta harus yang langsung terkait dengan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, sehingga urusan lain diabaikan.

Pencapaian kinerja program-program strategis secara operasional merupakan tanggung jawab Kepala SKPD, namun demikian pada tingkat kebijakan tetap menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, sedangkan program pendukung menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala SKPD

Perhitungan indikatif pendanaan masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program-program strategis dan pagu indikatif untuk program-program non strategis. Setelah pagu setiap program diketahui kemudian perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD, dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2010-2015.

Secara lebih jelas program prioritas pembangunan, indikator kinerja dan indikatif pendanaan tertuang pada Tabel 8.1 sebagai berikut :



Tabel B.1  
 Realisasi Rencana Program Prioritas Tahun Statistik Pelaksanaan Pendidikan

KODE BUDIDAYA	NOMOR	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEMUKAKAN JANUARI 2011	KEMUKAKAN JULI 2011	2011		2012		2013		2014		2015		KETERANGAN					
						2011		2012		2013		2014		2015							
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1		PROBLEMA PADA BENTANG MIPA																			
1	80	Program Peningkatan Adaptabilitas Perilaku	Terbaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	100	100	100	200.411,74	1.363,88	100	142.710,81	1.361,81	100	495.495,24	1.361,81	100	126.202,52	1.361,81	100	308.114,47	1.361,81	Servis SDO
1	81	Program Peningkatan Penyerapan & Penerimaan Inovasi	Terbaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	100	100	100	305.114,27	1.363,88	100	541.160,61	1.361,81	100	308.355,11	1.361,81	100	494.741,65	1.361,81	100	421.697,24	1.361,81	Servis SDO
1	82	Program Peningkatan Keterampilan Akademik	Adaptabilitas keterampilan membaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	100	100	100	56.495,15	1.363,88	100	94.172,75	1.361,81	100	18.395,64	1.361,81	100	70.244,11	1.361,81	100	75.141,48	1.361,81	Servis MPO
1	84	Program Fasilitas Pembelajaran	Terbaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	275	491	647	148,11	1.363,88	447	133,82	1.363,88	440	132,45	1.363,88	440	111,50	1.363,88	440	160,48	1.363,88	SDP
				250	280	380			150			100			130			100			
				15	25	30			21			17			15			15			
1	85	Program Peningkatan Keterampilan Berbahasa Inggris	Terbaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	100	100	100	21.141,50	1.363,88	100	21.240,12	1.363,88	100	21.207,88	1.363,88	100	26.362,47	1.363,88	100	25.714,12	1.363,88	Servis SDO Bersifat Transmisi dan Fidusia
1	86	Program Peningkatan Penguasaan Bahasa Inggris	Terbaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	100	100	100	11.495,24	1.363,88	100	18.270,48	1.363,88	100	18.332,48	1.363,88	100	15.118,84	1.363,88	100	15.072,24	1.363,88	Servis SDO
1	87	Program Peningkatan Keterampilan Berbahasa Inggris	Terbaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	100	100	100	22.291,31	1.363,88	100	21.240,12	1.363,88	100	26.257,88	1.363,88	100	26.112,47	1.363,88	100	26.112,47	1.363,88	Servis SDO
1	88	Program Peningkatan Keterampilan Berbahasa Inggris	Terbaca & berprestasi dengan adaptabilitas performance (100%)	100	100	100	11,48	1.363,88	100	11,48	1.363,88	100	11,48	1.363,88	100	11,48	1.363,88	100	11,48	1.363,88	Servis SDO Kejuruan Kejuruan Kejuruan

## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penggunaan indikator kinerja pembangunan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator kinerja juga digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMD pada setiap agenda pembangunan tahunan, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara berkesinambungan menuju perwujudan visi-misi yang telah ditetapkan.

Pencapaian pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro dan indikator kinerja kunci sasaran pembangunan daerah. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Semarang tahun 2010-2015 tidak terlepas dari kondisi ekonomi global, nasional maupun regional. Kontribusi PDRB Kabupaten Semarang didominasi oleh sektor industri pengolahan, dimana sebagian besar merupakan komoditas ekspor. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2010-2015 tidak akan terlepas dari dinamika ekonomi global, sehingga besarnya tidak akan jauh berbeda dengan pertumbuhan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi ekonomi nasional tahun 2010-2014 diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 6,3–6,8% sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,38-6,66%. Dengan mengacu pada pertumbuhan tersebut maka kondisi ekonomi makro Kabupaten Semarang 2010-2015 diperkirakan sebagaimana pada Tabel 9.1

**Tabel 9.1**  
**Kondisi Ekonomi Makro Pembangunan Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2011-2015**

No	INDIKATOR	Kondisi Awal (2009)	Capaian 2010	TARGET				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB ADHB (Rp. milyar)	10.066,84	11.268,92	12.631,77	14.183,04	15.577,27	17.189,65	18.907,94
2	PDRB ADHK (Rp. milyar)	5.300,72	5.532,67	5.777,83	6.038,23	6.480,47	6.839,03	7.222,36
3	PDRB ADHB per kapita (Rp)	9.621.069	10.504.937	13.430.482	14.927.711	16.566.967	18.330.171	20.220.939
4	PDRB ADHK per kapita (Rp)	5.056.033	5.192.801	6.143.161	6.355.259	6.569.700	6.791.013	7.018.290
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,98	4,38	4,5 - 5,0	5,0 - 6,0	5,5 - 6,3	6,0 - 7,0	6,5 - 7,3
6	Inflasi (%)	3,17	6,29	5,0 - 6,0	4,5 - 5,5	5,0 - 6,0	6,0 - 6,5	5,5 - 6,0

Sumber : BPS, 2010, diolah

Selain indikator ekonomi makro tersebut, untuk mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2015 digunakan indikator kinerja kunci baik dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Indikator kinerja tersebut sebagaimana pada Tabel 9.2

**Tabel 9.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2009-2015**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.</b>									
<b>A. Pendidikan</b>									
1	Angka Partisipasi PAUD	%	33,06	33,70	35,03	36,42	37,86	39,36	40,92
2	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	- SD/MI	%	94,95	94,98	95,02	95,05	95,08	95,11	95,13
	- SMP/MTs	%	81,50	81,56	81,62	81,67	81,73	81,78	81,84
	- SMA/SMK/MA	%	34,34	39,12	39,30	39,50	39,70	39,90	40,10
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	- SD/MI	%	104,95	103,30	104,89	104,91	104,93	104,95	104,98
	- SMP/MTs	%	95,77	95,82	95,86	95,91	95,95	96,00	96,04
	- SMA/SMK/MA	%	40,90	47,91	48,00	49,00	50,00	51,00	52,91
4	Angka Kelulusan								
	- SD/MI	%	98,04	99,88	99,97	99,97	99,97	99,97	99,98
	- SMP/MTs	%	88,13	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	99,65
	- SMA/SMK/MA	%	92,17	99,23	99,00	99,02	99,03	99,04	99,05
5	Angka Putus Sekolah								
	- SD/MI	%	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- SMP/MTs	%	0,71	0,66	0,61	0,58	0,52	0,45	0,21
	- SMA/SMK/MA	%	1,26	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70
6	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
	- SD/MI	%	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,80
	- SMP/MTs	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31
	- SMA/SMK/MA	%	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
7	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,03	90,50	90,80	91,00	91,20	91,50	92,00
8	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	67,63	67,90	68,00	68,30	60,60	60,80	69,00
9	Angka Melek Huruf usia > 15 th	%	99,50	99,68	99,81	99,87	99,94	99,97	99,98
10	Guru yang berpendidikan S1/D-IV								
	- TK/RA, SD/MI	%	30,00	33,09	39,00	43,00	48,00	52,00	61,00
	- SMP/MTs	%	69,00	79,57	82,00	86,00	88,00	90,00	94,00
	- SMA/MA/SMK	%	86,00	91,36	93,00	94,00	95,00	97,00	98,00
11	Guru bersertifikat pendidik								
	- SD	%	27,00	31,33	40,00	55,00	68,00	72,00	84,00
	- SMP	%	24,00	43,91	50,00	60,00	66,00	74,00	85,00
	- SMA/SMK	%	28,00	37,48	45,00	54,00	66,00	78,00	89,00
12	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	%	44,06	60,00	62,00	64,59	71,01	82,23	90,00
13	Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar	%	86,75	87,00	88,01	88,90	89,34	89,75	90,00
14	Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar	%	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2008)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>B. Kesehatan</b>									
1	Angka Harapan Hidup <sup>a)</sup>	tahun	72,4	72,4	72,4	7,4	72,5	72,5	72,5
2	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	8,17	10,46	8,14	8,11	8,09	8,06	8,00
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	125,66	101,92	123,00	118,00	112,00	107,00	102,00
4	Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	5,83	11,56	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0
5	Persentase balita gizi buruk	%	0,14	0,06	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11
6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	22	22,17	22	22	22	22	22
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pusda per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,35	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,003	0,003	0,0004	0,004	0,004	0,004	0,004
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,11	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,2	0,25	0,27	0,28	0,3	0,3	0,31
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,10	92,90	93,50	93,75	94,00	94,50	95,00
13	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	97,02	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	22,17	25,48	40,00	48,00	52,00	60,00	70,00
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin								
	- Jembermas	%	12,96	13,36	17,38	17,94	17,41	18,91	17,05
	- Jemberda	%	8,44	7,17	8,89	9,26	9,44	9,92	4,78
18	Cakupan kurungan bayi	%	92,96	100,07	90,00	91,00	91,00	92,00	92,00
19	Cakupan puskesmas	%	136,84	136,84	136,84	136,84	136,84	136,84	136,84
20	Cakupan pembantu puskesmas	%	28,94	28,94	28,94	28,94	28,94	28,94	28,94
<b>C. Ketahanan-karjawa</b>									
1	Rasio penduduk yang bekerja	%	51,27	51,45	51,67	51,85	51,91	52,10	52,20
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	90,86	78,11	86,85	86,85	87,05	87,15	87,25
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	4,04	5,58	5,10	4,80	4,10	3,70	2,45
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	13,313	13,02	13,04	17,01	18,01	19,95	21,25
5	Keselamatan dan perlindungan	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	73,00	75,00
<b>D. Transmigrasi</b>									
1	Transmigrasi swakarsa	%	33,19	31,81	35,71	38,46	38,46	38,46	38,46

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>a. Perpustakaan</b>									
1	Jumlah perpustakaan	unit	851	976	1.009	1.042	1.075	1.108	1.114
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	64.381	83.046	85.146	91.052	94.186	97.236	100.000
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul eksemplar	26.167 43.797	28.944 5.750	29.254	29.584	29.909	30.400	30.817 67.731
<b>F. KB dan KS</b>									
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	3,44	3,42	3,40	3,35	3,25	3,1	3,22
2	Rasio akseptor KB	%	105,47	103,22	104	105	106	107	110
3	Keluarga Pra KS dan KS1	%	32,21 dan 13,76	27,84 dan 16,43	27 dan 15	26 dan 18	25 dan 20	20 dan 22	22,1 dan 23,2
4	Cakupan peserta KB aktif	%	83,90	81,76	81,00	81,5	82,0	82,5	82,67
<b>G. Pemuda dan Olah Raga</b>									
1	Jumlah organisasi pemuda	buah	15	15	16	16	17	17	18
2	Jumlah organisasi olahraga	buah	50	75	90	100	115	140	150
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg; lok; orang	9; 10 ;256	10 ; 11 ; 270	10 ; 11 ; 275	11; 12 ; 280	11; 12 ; 280	12 ; 13 ; 300	12; 13; 300
4	Jumlah kegiatan olahraga	cabang	27	30	30	30	30	32	32
5	Jumlah klub olahraga	buah	308	400	500	600	1000	1250	1500
6	Jumlah gedung olahraga	buah	0	1	1	1	1	1	1
<b>H. Budaya</b>									
1	Jumlah grup kesenian	Group	1019	1096	1116	1127	1132	1154	1200
2	Jumlah gedung kesenian	buah	0	0	0	1	1	1	1
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	4	4	4	4	10	10	10
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	1	5	5	5	5	5	5
5	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	lokal	34	34	34	34	34	34	34
<b>MISI 2 : Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (Intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan</b>									
<b>A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	43,98	4,38	4,51	4,54	5,53*	5,61	6,1
2	Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	89,34	89,95	90,67	91,40	92,12*	92,85	93,57
3	Prosentase Penduduk miskin	%	10,66	10,06	9,33	8,61	7,88*	7,16	6,43
4	PDRB ADHB	Rp. (Juta)	10.066.845,50	11.208.917,95	12.631.770,8	14.183.042,60	15.577.270,9	17.189.645,2	18.907.935,0
5	PDRB ADHK	Rp. (Juta)	5.300.723,40	5.532.672,50	5.777.827,11	6.038.226,64	6.480.466,8	6.839.026,3	7.222.358,4
6	PDRB ADHB per kapita	Rp	9.621.069,88	10.504.937,56	13.430.481,51	14.927.711,46	16.566.967	18.330.171,0	20.220.939,0
7	PDRB ADHK per kapita	Rp	5.056.033,42	5.192.801,06	6.143.160,89	6.355.258,72	6.569.700,5	6.791.013,0	7.018.290,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>B. Pertanian</b>									
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	53,15	53,57	53,98	54,40	54,81	55,23	55,65
2	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	772.910,7	873.269,1	1.025.603,3	1.123.058,8	1.223.193,7	1.326.008,0	1.431.501,7
3	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	115.846,2	131.144,3	140.196,3	150.964,9	161.838,7	172.817,5	183.901,5
4	Cakupan bina kelompok tani	%	13,64	3,03	8,64	8,94	9,09	9,24	9,39
<b>C. Ketahanan Pangan</b>									
1	Ketersediaan pangan utama	%	116,25	141,216	156,69	159,56	161,85	164,04	165,81
2	Pola pangan harapan	stok	74	84,2	85	86	87	88	90
3	Regulasi ketahanan pangan	Buah	1	-	1	1	-	1	3
<b>D. Kehutanan</b>									
1	Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis	%	13,10	15,50	17,90	20,40	22,80	25,20	27,60
2	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	114.600,6	133.386,1	103.460,0	102.237,8	101.171,6	100.227,4	99.380,8
<b>E. Energi dan Sumber Daya Alam</b>									
1	Rasio ketersediaan daya listrik	%	99,00	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100
3	Pertambangan tanpa tlin	unit	27	24	20	16	12	6	0
4	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Rp. (Juta)	12.280,4	13.606,7	14.815,5	16.050,5	17.285,3	18.519,9	19.754,5
5	Kontribusi sektor listrik, gas dan air minum terhadap PDRB	Rp. (Juta)	130.744,8	144.253,4	156.922,6	170.342,4	184.255,9	198.663,0	213.563,7
<b>F. Pariwisata</b>									
1	Kunjungan wisata	Orang	999.755	877.731	965.504	1.062.054,4	1.168.258,8	1.285.084,6	1.305.100
2	Jumlah, kelas dan jenis restoran	unit	153	136	150	165	182	199	200
3	Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel	hotel	223	217	239	263	289	315	340
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi)	Rp. (Juta)	2.070.685,2	2.280.078,5	2.296.905,5	2.488.512,9	2.684.874,4	2.881.783,0	3.080.587,6
<b>G. Kelautan dan Perikanan</b>									
1	Produksi perikanan	ton	965	1.639,6	2.043,0	2.808,0	3.612,0	4.489,0	3.921,0
2	Produksi perikanan tangkap	ton	1.205	1.215,8	1.225,5	1.236,2	1.247,4	1.258,7	1.270,3
3	Konsumsi ikan	Kg/kapita	18,18	18,23	18,24	18,26	18,3	18,33	18,4
4	Cakupan binaan kelompok nelayan	kep	30	32	35	38	37	38	40
5	Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	14.880,0	17.934,3	20.029,2	23.083,1	26.476,2	30.208,4	34.279,8
<b>H. Perdagangan</b>									
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$ 000	252.683,80	361.339,26	255.210,64	257.737,48	260.269,31	262.791,15	265.317,99
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	17,29	29,24	41,19	53,14	65,09	77,04	89,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>I. Perindustrian</b>									
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Rp. (Juta)	4.364.042,7	4.800.513,3	5.139.446,4	5.542.975,1	5.948.970,0	6.357.431,1	6.768.358,4
2	Pertumbuhan industri	%	2,25	3,38	4,51	5,64	6,77	7,90	9,04
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	36,00	39,30	42,60	45,90	49,20	52,50	56,00
<b>J. Koperasi dan UMKM</b>									
1	Bertambahnya jumlah koperasi	unit	605	622	641	660	680	700	721
2	Persentase koperasi aktif	%	90,74	88,59	87,73	86,87	86,03	85,19	92,30
3	Peningkatan koperasi aktif	Unit	549	551	562	573	585	596	608
4	Jumlah UKM non BPR/LKM/UKM	Org	25.496	25.709	25.922	26.135	26.348	26.561	26.771
5	Terbinanya pelaku UMKM	Org	5.932	6.221	6.470	6.729	6.998	7.278	7.569
6	Jumlah BPR/LKM	Unit	859	876	895	914	934	954	975
7	Kontribusi sektor Lemb. Keu. Jasa dan Persewaan terhadap PDRB	Rp. (Juta)	421.871,2	484.274,4	554.521,2	629.789,2	711.168,8	798.660,0	892.262,8
8	Usaha mikro dan kecil	%	23,30	24,20	25,00	25,70	26,60	27,40	28,30
<b>K. Penanaman Modal</b>									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	bh	10	4	5	6	7	8	16
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. milyar	226,484	142,576	149,700	157,000	165,000	173,000	401,230
3	Lama proses perijinan	hari	3 s.d. 14	3 s.d. 14	3 s.d. 14	3 s.d. 14	3 s.d. 14	3 s.d. 14	3 s.d. 14
4	Pameran / ekspo	kl	1	1	1	2	2	2	2
5	Kenalkan/penurunan nilai Realisasi PMDN	Rp. milyar	164,84	82,9	7,124	7,3	8	8	36,48
<b>MISI 3 : Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan efisien serta kinerja aparatur yang kompeten dan profesional, dengan pemanfaatan teknologi informasi</b>									
<b>A. Komunikasi dan Informatika</b>									
1	Jumlah jaringan komunikasi	unit	44	44	71	100	150	200	250
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	7	7	12	12	12	12	12
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	buah	8	9	9	9	9	9	9
4	Web Site milik pemerintah daerah	Sub domain	3	26	26	30	30	35	40
<b>B. Keastuan Bangsa dan Politik</b>									
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	52,00	52,00	60,00	68,00	76,00	84,00	86,00
2	Jumlah linmas per Jumlah 10.000 penduduk	%	103,33	103,38	103,38	103,38	103,38	103,38	104,100
3	Rasio Siskamling per Jumlah desa/kelurahan	%	13,481	13,481	13,481	13,481	13,481	13,481	13,481
4	Angka kriminalitas	kasus	622	477	550	535	530	540	535
5	Jumlah demo	kegiatan	12	16	15	15	18	22	14
6	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	1	2	2	2	2	2	2
7	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	Kegiatan	1	0	1	0	0	0	1
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kegiatan	411	425	444	463	482	501	503



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, kenyamanan dan keindahan)	%	97,16	52,00	61,00	70,00	79,00	88,00	100
10	Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Petugas Perindungan Masyarakat (Lhmas)	%	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
12	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032
13	Forum Kawaspadsan Diri Masyarakat (FKDM)	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1
14	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	1
<b>C. Kependudukan dan catatan sipil</b>									
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	%	69,10	70,00	77,00	87,00	90,00	95,00	100
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	orang	442	498	617	725	834	943	1.000
3	Rasio pasangan ber-akta Nikah	%	51,22	52,50	54,00	56,00	57,00	58,70	60,00
4	Rasio bayi berakte kelahiran	%	78,76	81,00	100	100	100	100	100
5	Kepemilikan KTP	orang	550.425	551.510	590.116	649.127	668.661	702.031	737.133
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	50,00	75,00	100	100	100	100	100
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	85,00	90,00	100	100	100	100	100
8	Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,90	0,90	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
<b>D. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
1	Sistem Informasi Manajemen Perda	buah	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah paket daerah	Jenis	7	7	9	9	9	10	10
3	Jumlah retribusi daerah	Jenis	31	31	19	19	19	19	31
4	Penegakan Perda	kasus	198	195	192	189	186	182	184
5	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	paket	1	1	1	1	1	1	1
<b>E. Keairan</b>									
1	Penerapan pengelolaan air sipi secara baku	%	30,00	56,00	50,00	52,00	50,00	60,00	50,00
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola air	Kegiatan	3	2	2	2	3	3	15
<b>F. Statistik</b>									
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	dokumen	4	5	5	6	6	6	6
2	Buku PORB Kabupaten	dokumen	3	3	3	3	3	3	3
<b>G. Perencanaan Pembangunan</b>									
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA	buku	1	-	-	-	-	-	1
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	buku	1	-	1	-	-	-	1
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA	buku	1	1	1	1	1	1	6
4	Pelebaran Program RPJMD ke dalam RKPD	buku	1	1	1	1	1	1	6

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>MISI 4 : Menyediakan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas guna mendukung peningkatan pelayanan dasar di setiap wilayah</b>									
<b>A. Pekerjaan Umum</b>									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	32,96	28,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00
2	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	41,71	46,49	51,27	56,05	60,83	65,61	70,39
3	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%	48,00	50,00	55,00	60,00	63,00	67,00	70,00
4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend> 40 km/jam)	%	60,00	42,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00
5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (lebar > 1,5 m)	%	13,12	15,00	17,00	19,00	23,00	26,00	29,35
6	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	50,24	53,00	57,00	61,00	63,00	65,00	65,35
7	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	19,82	20,26	36,51	50,69	58,90	69,39	70,39
<b>B. Penataan Ruang</b>									
1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	35,00	42,50	50,00	57,50	65,00	72,50	80,00
2	Luas wilayah produktif	Ha	42.475	42.783	43.091	43.399	43.707	44.015	44.325
3	Luas Wilayah Industri	Ha	1.525	1.591	1.657	1.723	1.789	1.855	1.925
4	Luas wilayah keberjiran	Ha (Perkotaan)	0,25	0,25	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12
5	Luas wilayah kekeringan	Ha	4.125	4.125	4.125	4.107	4.085	4.035	4.000
6	Luas wilayah perkotaan	Ha	8.404,286	8.404,286	8.524,286	8.604,286	8.684,286	8.744,286	8.824,500
<b>C. Perhubungan</b>									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	8.968.430	8.992.699	9.082.625	9.172.552	9.262.479	9.352.406	9.416.850
2	Rasio ljin trayek	%	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	2.627	2.783	2.810	2.852	2.894	2.922	2.951
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	terminal	1 tipe B 4 tipe C	1 tipe B 4 tipe C	1 tipe B 4 tipe C	1 tipe B 4 tipe C	1 tipe A tipe C	1 tipe A 4 tipe C	1 tipe A 7 tipe C
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,0054	0,0054	0,0054	0,0053	0,0053	0,0052	0,0052
6	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang ton	8.968.430 230,58	9.043.167 232.502	9.117.903 234.423	9.192.640 236.345	9.237.377 238.266	9.342.112 240.187	9.416.850 242.109
7	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	orang ton	8.968.430 230,58	9.043.167 232.502	9.117.903 234.423	9.192.640 236.345	9.237.377 238.266	9.342.112 240.187	9.416.850 242.109
8	Angkutan Darat	%	0,0185	0,0185	0,0185	0,0185	0,0185	0,0185	0,0185
9	Kepemilikan KIR angkutan umum	kendaraan	7.377	7.425	7.580	7.702	7.826	7.981	8.120
10	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30	30	30	30	30	30	30
11	Pemasangan rambu-rambu	bush	566	542	578	614	690	686	722

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>D. Perumahan</b>									
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	78,96	78,96	80,21	85,34	89,43	90,01	93,64
2	Persentase rumah tinggal bersantasi	%	29,15	29,35	36,24	42,54	47,32	55,09	62,20
3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	88,08	88,08	89,08	89,08	90,19	91,07	92,35
4	Rasio rumah layak huni	%	51,99	55,99	61,99	67,69	73,45	78,80	82,54
5	Rasio permukiman layak huni	%	63,25	63,25	66,27	69,34	73,25	76,23	79,68
6	Lingkungan permukiman	ha	19.704	19.704	19.920	20.325	20.620	20.975	21.325
7	Lingkungan permukiman kumuh	ha	1.137	1.100	1.007	997	980	972	962
8	Rumah layak huni	%	67,69	69,69	75,54	78,69	80,60	81,59	82,54
9	Rumah tangga pengguna listrik	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
MISI 5 : Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan									
<b>A. Pemberdayaan masyarakat dan desa</b>									
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	org	235	235	235	235	235	235	235
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	klmpk	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
3	Jumlah LSM	org	5	9	5	6	7	9	11
4	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Rp	5.459.893.280	6.005.882.608	6.500.470.858	7.261.117.954	7.787.229.749	7.987.952.723	8.189.839.920
5	PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Posyandu aktif	%	99,40	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	89,00	90,50	93,00	95,00	97,00	98,00	100
<b>B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>									
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5,34	5,36	5,38	5,40	5,42	5,44	5,44
2	Rasio KDRT	%	0,020	0,020	0,020	0,015	0,015	0,015	0,015
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,97	0,97	1,72	0,97	0,96	0,96	0,95
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	24,40	33,70	25,80	26,65	27,75	29,00	30,18
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	0,010	0,013	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030
<b>C. Sosial</b>									
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dari panti rehabilitasi	buah	31	33	38	37	38	39	40
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	1,74	1,12	1,28	1,54	1,80	2,06	2,17

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2009)	CAPAIAN * (2010)	TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	TARGET 2014	KONDISI AKHIR (2015)
<b>MISI 6 : Mendorong terciptanya pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya</b>									
<b>A. Lingkungan Hidup</b>									
1	Persentase penanganan sampah	%	78,57	78,57	78,77	78,96	79,05	79,20	79,50
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,11	0,11	0,15	0,16	0,21	0,23	0,25
3	Persentase penduduk berakses air minum	%	53,26	59,73	65,20	71,20	77,24	83,12	89,36
4	Persentase luas permukiman yang tertata	%	35,00	39,10	43,21	45,59	48,64	51,46	55,21
5	Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air	Titik	24	24	9	9	9	9	45
6	Cakupan penghindaran wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha	-	-	14	14	14	14	70
7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL	Pelaku Usaha	20	10	-	13	13	13	52
8	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan	Kasus	10	10	10	10	10	10	50

-Catatan : \*) angka semetara

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **A. Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sampai dengan tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pasangan Bupati – Wakil Bupati terpilih dilantik. Oleh karena itu penyusunan RKPD dan anggaran tahun 2011 dan tahun 2016 belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebagaimana diamanatkan pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan pembangunan Provinsi. Dengan demikian RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 yang telah disusun dan digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran 2011 tidak perlu dirubah sepanjang tidak bertentangan dengan Visi-Misi Bupati - Wakil Bupati periode 2010-2015. Sedangkan dalam penyusunan RKPD tahun 2016, RPJMD 2010-2015

dapat diberlakukan sebagai pedoman sementara sebelum tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2015-2020 yang memuat penjabaran visi-misi Kepala Daerah terpilih periode berikutnya.

Mengingat dokumen RPJMD ini memiliki masa berlaku selama 5 tahun, di tengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid term evaluation*) untuk mengetahui sejauhmana terjadi ketidaksesuaian atau distorsi. Jika hal semacam ini terjadi maka perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dokumen. Oleh karena itu diperlukan tim monitoring untuk melaksanakan evaluasi secara reguler maupun periodik.

## B. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran dari visi-misi dan program pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dikampanyekan pada saat menjelang pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang telah diselaraskan dengan visi-misi daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025. Penyelarasan tersebut telah melalui berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yaitu melalui forum musrenbang, dengan harapan program-program yang ada di dalam RPJMD ini sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan dan perumusan program dan indikator kinerja dalam RPJMD ini mengacu sejumlah program yang tercantum dalam dokumen perencanaan

yang lebih tinggi yaitu RPJM-Nasional 2009-2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013, dan RPJPD Kabupaten Semarang 2005-2025 serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah RTRW Kabupaten Semarang.

Dokumen RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015 memuat seluruh program-program atau rencana kerja Bupati meliputi tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas-tugas pemerintahan umum serta tugas dari provinsi yang sifatnya sektoral. Pelaksanaan program dalam rangka menjalankan tugas-tugas di luar tugas desentralisasi perlu sinkronisasi dengan program pembangunan tingkat nasional maupun provinsi, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat sejalan dengan pembangunan provinsi maupun nasional.

RPJMD ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan periode yang sama yaitu 2010-2015. Disamping itu RPJMD ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun anggaran. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pada tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir penyusunan RKPD untuk tahun 2016 sebagai RKPD Transisi.

RPJMD ini nantinya juga akan menjadi dasar bagi Bupati - Wakil Bupati dalam menyusun LKPJ dan LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Bupati - Wakil Bupati dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan penilaian. RPJMD ini merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap *stakeholder* yang ada di Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015.